

litrus.

M.ALIMIN MAIDIN | NOER BAHRY NOOR | NURMALA SARI
SHEINNI PARADISE | EVAWATY | MUHAMMAD NURUNG
ILMIANTI | TANWIR DJAFAR | ACHMAD R. MUTTAQIEN AL MAIDIN

Ekonomi Kesehatan



EDITOR: ANDI M. RUSDI MAIDIN & WAHYUTI

EKONOMI KESEHATAN

PENULIS:

M.ALIMIN MAIDIN
NOER BAHRY NOOR
NURMALA SARI
SHEINNI PARADISE
EVAWATY
MUHAMMAD NURUNG
ILMIANTI
TANWIR DJAFAR

EDITOR:

ACHMAD R. MUTTAQIEN AL MAIDIN

PRAKATA

Puji syukur kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini sesuai dengan tuntutan semua pihak yang sangat membutuhkannya.

Buku ini di buat dalam tiga belas bab yang membahas tentang masalah kesehatan dari kaca mata ekonomi, menjelaskan semua persoalan yang terdapat dalam sektor ekonomi kesehatan serta berbagai aspek penting yang menjadi kajian dalam ilmu ekonomi kesehatan.

Kami mengetahui bahwa buku ini merupakan hasil usaha berbagai pihak untuk memberikan pendapat, saran, dan masukan dalam penulisan buku ini. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman – teman dari FKM Nurfardiansyah B, Maarifah Dahlan, M Arif Sutrisno Amin, Kornadi, Nur Rahmah, Irham Taufiqurrahman, Antonius Manaor, Siti Fatmala Rezeki, Hasri Khumaerah Abrar atas kontribusinya dalam perbaikan buku ini serta seluruh pihak yang ikut serta dalam membawa buku ini ke tangan pembaca saat ini.

Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami lakukan masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun, dan pada akhirnya penulis berharap buku ini bisa memberikan manfaat terhadap kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita semua hidayah dan rahmat-Nya, dan buku ini telah diterbitkan serta memiliki nilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Juni 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB 1 ILMU EKONOMI KESEHATAN.....	1
A. Definisi Ilmu Ekonomi Kesehatan.....	1
B. Demarkasi Ilmu Ekonomi Kesehatan	3
C. Tujuan Ilmu Ekonomi Kesehatan	5
D. Metode Ilmu Ekonomi Kesehatan	5
E. Economic Sector Public	6
F. Nilai-nilai dalam Ilmu Ekonomi Kesehatan	7
BAB 2 SIFAT EKONOMI KOMODITAS	9
A. Komoditas Pendidikan.....	9
B. Komoditas Kesehatan	11
C. Komoditas Makanan.....	13
D. Komoditas Perumahan.....	15
E. Komoditas Keamanan	17
F. Komoditas Kelestarian Lingkungan	21
G. Public Merit-Private Goods.....	24
BAB 3 MAHZAB-MAHZAB EKONOMI (BAGIAN 1)	28
A. Adam Smith.....	29
B. Karl Marx.....	35
C. John Maynard Keynes.....	49
BAB 4 MAHZAB-MAHZAB EKONOMI (BAGIAN 2)	59
A. Gary Becker	59
B. Vilfredo Pareto	59
C. Stiglitz	68
D. Amartya Sen	74

BAB 5 PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	81
A. Pembangunan Ekonomi.....	81
B. Pemerataan Ekonomi.....	84
 BAB 6 EKONOMI DAN FAKTOR PENDIDIKAN.....	 90
A. Ekonomi dan Pendidikan.....	90
B. Peran Ekonomi dalam Pendidikan.....	95
C. Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi.....	98
D. Pembangunan dalam Pembangunan Ekonomi Kesehatan.....	100
 BAB 7 EKONOMI KEPENDUDUKAN.....	 103
A. Konsep Dasar Kependudukan.....	103
B. Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.....	107
 BAB 8 EKONOMI LINGKUNGAN.....	 123
A. Sumber yang Direkomendasikan.....	125
B. Hukum Pengembalian yang Berkurang.....	126
C. Daya Dukung.....	129
D. Pembangunan Berkelanjutan.....	132
E. Penilaian Ekosistem.....	136
F. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sumber.....	139
G. Kebijakan Regulasi Vs Insentif Ekonomi.....	142
 BAB 9 SISTEM EKONOMI KESEHATAN.....	 148
A. Sistem Ekonomi Kesehatan.....	148
B. Ekonomi Kesehatan Sebagai Welfare Economics.....	153
 BAB 10 SISTEM JAMINAN SOSIAL.....	 170
A. Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional.....	170
B. Tantangan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.....	172
C. Penerapan Tarif Kapitasi di Puskesmas.....	176
D. Pentingnya Regulasi Penetapan Tarif.....	179
 BAB 11 PAJAK DAN KESEJAHTERAAN.....	 182
A. Definisi Pajak.....	182
B. Manfaat Pajak.....	184
C. Kaitan Pajak dan Kesejahteraan.....	185
 BAB 12 KORUPSI, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN.....	 187

A. Korupsi	192
B. Kesejahteraan	194
C. Kemiskinan.....	200
BAB 13 CIRI INDUSTRI KESEHATAN	208
DAFTAR PUSTAKA.....	217

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
PPEKI	Perhimpunan Peminat Ekonomi Kesehatan Indonesia
WTP	Willingness To Pay
WTA	Willingnes To Accept
SBU	<i>Strategy Bussiness Un</i>

ILMU EKONOMI KESEHATAN

A. Definisi Ilmu Ekonomi Kesehatan

Kata "ekonomi" diambil dari bahasa Yunani "Oikonomia". Itu berarti manajemen keluarga atau rumah tangga. "Oikonomia" berasal dari kata "Oikos" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "Nomos" yang berarti peraturan, aturan, maupun hukum. "Oikonomia" adalah segala bentuk aturan dalam suatu populasi atau masyarakat sebagai hukum alam untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang baik. Ekonomi telah mengajarkan tentang bagaimana penduduk atau masyarakat mengalokasikan sumber daya yang langka.

Menurut Samuelson, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai sikap penduduk maupun masyarakat untuk melakukan kegiatan penggunaan sumber daya yang langka untuk melakukan kegiatan produksi berbagai komoditas, yang selanjutnya mendistribusikannya kepada individu dan kelompok dalam populasi atau kelompok masyarakat.

Iskandar dan Nuraeni (2015) menyatakan bahwa ilmu ekonomi dibagi menjadi dua kategori besar, yang kemudian akan berkembang menjadi cabang ilmu ekonomi teoritis dan ilmu ekonomi terapan. Kedua

kelompok besar ilmu ekonomi tersebut adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro difokuskan dalam mempelajari mengenai perilaku individu dan rumah tangga atau perusahaan yang produktif ketika memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Adapun bagian yang dipelajari adalah teori harga, teori distribusi, maupun teori produksi. Namun, ilmu ekonomi makro difokuskan dalam mempelajari perilaku masyarakat (negara/bangsa) untuk mencukupi kebutuhannya, analisisnya memiliki sifat global dan tak fokus terhadap kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh beberapa unit ekonomi kecil dan menengah. Bagian yang dipelajari meliputi pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, serta investasi.

Ilmu ekonomi kesehatan termasuk bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai implementasi ataupun penerapan dari teori ekonomi, konsep dan teknik atau metodenya di bidang kesehatan. Menurut Klarman (1964), ekonomi kesehatan adalah implementasi ataupun penerapan ilmu ekonomi pada bidang kesehatan. Organisasi Asosiasi Peminat Ekonomi Kesehatan Indonesia (PPEKI 1989) juga mengatakan bahwa ekonomi kesehatan merupakan implementasi ilmu ekonomi pada usaha kesehatan dan beberapa faktor yang memberikan pengaruh berupa kesehatan untuk menggapai kadar kesehatan yang bagus atau optimal.

Dalam Ilmu ekonomi, dijelaskann bahwa bagaimana individu atau masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang langka untuk keperluan konsumsi sekarang maupun keperluan konsumsi masa yang akan datang. Sehingga dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah rangkaian kegiatan untuk memnfatkan kelangkaan sumber daya untuk menentukan pilihan dalam proses penggunaannya. Hal ini dapat terlihat tentang bagaimana suatu analisis dalam proses penetapan keputusan yang akan berhubungan erat terhadap sumber daya beserta pilihannya. Bagian daripada ilmu ekonomi tersebut biasa dinamakan *positive economics* atau ilmu ekonomi positif.

B. Demarkasi Ilmu Ekonomi Kesehatan

Dimensi ekonomi kesehatan masih kurang mendapat perhatian dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Perubahan mendasar terjadi saat sektor kesehatan mengalami bahwa ketersediaan sumber daya yang tersedia akan semakin terbatas dalam jangka waktu yang lebih lama. Keterbatasan itulah yang akan menjadi suatu alasan masuknya disiplin ilmu ekonomi untuk mengatur masalah-masalah terhadap berbagai aspek seperti perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi sektor kesehatan. Secara garis besar batasan ekonomi kesehatan akan memberikan pembahasan mengenai beberapa aspek antara lain: 1). Adanya kegiatan mengalokasikan sumber daya pada

upaya meningkatkan kesehatan; 2). Adanya besaran jumlah pemakaian sumber daya pada sektor kesehatan; 3). Adanya pendanaan maupun pengorganisasian terhadap berbagai institusi kesehatan; 4). Adanya usaha dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan menggunakannya untuk berbagai tujuan kesehatan; 5). Adanya pengaruh pada semua aspek pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi hingga individu dan masyarakat. Adapun ruang lingkup dari sasaran ekonomi kesehatan antara lain adalah konsumen, pemerintah serta provider (*public-private*).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Lubis (2009), bahwa secara komprehensif teori ekonomi tersebut bisa dikelompokkan jadi 2 macam, yaitu berikut ini: 1). Ekonomi mikro yang merupakan bagian dari aspek keuangan yang memeriksa bagian-bagian kecil dari semua aspek moneter seperti adanya perilaku pelanggan, penawaran, permintaan, fleksibilitas minat pasar, serta kegiatan periklanan, 2). Makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang menyelidikannya menyeluruh atau luas tentang perekonomian, misalnya fiskal dan keuangan yang terkait dengan pembiayaan dalam dan strateginya dalam kesehatan.

Menurut Kharman (1964), mengatakan bahwasanya aspek ekonomi pada sektor kesehatan adalah implementasi ekonomi pada aspek kesehatan yang dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 bagian

utama yaitu pedoman, perencanaan, pemeliharaan dalam bidang kesehatan serta pemeriksaan biaya dan keuntungan.

C. Tujuan Ilmu Ekonomi Kesehatan

Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran bagi orang-orang maupun masyarakat. Ekonomi kesehatan memiliki tujuan untuk membenarkan pilihan dan pelaksanaannya dalam menggerakkan segala jenis usaha yang terkait dengan layanan kesehatan, terutama dalam hal penggunaan aset kesehatan. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang terkait dengan administrasi kesehatan harus dilakukan dengan memenuhi aturan efektivitas (hemat biaya).

Penggunaan ekonomi kesehatan dengan aturan efektivitas agak sulit karena keberadaan bidang kesehatan yang unik. Seperti, tidak adanya kemampuan dalam menggunakan alat bantu pernapasan pada pasien. Jadi penggunaan ekonomi kesehatan hanyalah sebagai bantuan saja, yang penting fokus pada sifat dan kualitas bidang kesehatan sehingga tetap menjadi kebutuhan. Satu lagi tujuan dari ekonomi kesehatan adalah untuk mengambil bagian dalam menerapkan standar produktivitas secara adaptif dalam bidang kesehatan.

D. Metode Ilmu Ekonomi Kesehatan (*positive economic dan normative economic*)

Aspek *positive ekonomi* merupakan ilmu ekonomi yang berkonsentrasi pada bagaimana suatu barang dibuat, disebarluaskan, dan dikonsumsi dengan memanfaatkan aset, perlu atau tidaknya daerah setempat terhadap upaya efektifitas aset tersebut. Gagasan masalah *positive ekonomi* merupakan "bebas nilai" yang ada di area publik. *Normative economics* adalah ilmu ekonomi yang berfokus pada cara yang paling efisien dan efektif untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan ekonomi dalam hal nilai, ide, dan teori.

Aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan *positive ekonomi* adalah suatu aspek yang akan selalu berhubungan pada kondisi "Apa yang terjadi", maupun "apa yang sudah terjadi", serta "Apa yang mau terjadi". Aspek-aspek dari *positive ekonomi* juga akan berhubungan pada bagaimana pola perilaku pasar bebas dan perilaku aktual dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Adapun *Normative economics* berkaitan dengan standar yang sepatutnya dilakukan. Ketidaksamaan terhadap aspek *normative* akan sulit diatasi jika mempergunakan pandangan empiris. *Normative economics* berkaitan terhadap aspek kebebasan konsumen untuk melakukan pilihan.

E. Economic Sector Public (Welfare Economics)

Aspek ekonomi kesehatan sebagai *welfare economics* adalah hasil perpaduan antara *positive economy* dengan teori politik. Mengenai filosofi kesehatan “tidak bebas nilai” yaitu :

- 1). Kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia,
- 2). Pemertaan merupakan tujuan usaha kesehatan,
- 3). Motivasi Non-profit, artinya tidak mencari keuntungan.

Menurut ketiga dasar filosofi tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah kesehatan “tidak bebas nilai”, dengan demikian dapatlah disebut juga sebagai *welfare economics*.

F. Nilai—Nilai dalam Ilmu Ekonomi Kesehatan

Nilai ekonomi Indonesia bersumber dari Pancasila dan nilai luhur serta kepribadian bangsa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan perekonomian Indonesia, sehingga perlu diketahui oleh generasi bangsa agar memiliki pengetahuan, sikap, serta perilaku ekonomi yang selalu berdasar pada nilai ekonomi Pancasila.

Adapun prinsip dalam ekonomi kapitalis, mengandung pengertian bahwa manusia merupakan *homo economicus*, bertujuan untuk mengejar *self interest* dengan cara efisien. Prinsip kapitalis beranggapan bahwa prinsip pada efisiensi ekonomi hanya bisa terwujud dengan usaha memaksimalkan profit, serta meminimalkan penggunaan biaya. Prinsip

kapitalis menciptakan persaingan, dan menciptakan kerja sama. Akibatnya akan memunculkan perilaku ekonomi yang bersifat eksploitatif yang terjadi dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam yang mengalami kelangkaan guna pemenuhan kebutuhan hidup.

Generasi bangsa sepatutnya konsisten menerapkan ekonomi Pancasila sebagai sumber etika, nilai, serta di dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hal itu mengandung arti bahwa ilmu ekonomi harus dikembalikan sebagai ilmu sosial yang berdasarkan Ketuhanan, mempunyai etika, moral serta memiliki ciri lokalitas. Menurut Mubyarto (2003) berpendapat tentang sistem ekonomi Pancasila yang memuat ketentuan tentang kehidupan ekonomi antar pelaku ekonomi yang berdasarkan terhadap etika serta moral Pancasila yang mempunyai tujuan akhir yaitu terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurut pendapat Wahjoedi (2015) bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi mempunyai 3 karakter yaitu :

1. Karakter ekonomi Pancasila yang mempunyai prinsip mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat.
2. Karakter ekonomi ekologis, artinya melakukan kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan, serta menjaga adanya keseimbangan alam dan juga lingkungan.
3. Karakter ekonomi pasar yang terkendali.

BAB II

SIFAT EKONOMI KOMODITAS

A. Komoditas Pendidikan

Sistem Pendidikan dikelola pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang memuat pengertian pendidikan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencapai proses pembelajaran agar peserta didik dapat berperan serta secara aktif dalam upaya mengembangkan potensi dirinya sehingga akan mempunyai kekuatan spiritual, akhlak mulia, kebijaksanaan, kemampuan mengendalikan diri, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun tujuan pendidikan yaitu melakukan usaha dalam mengembangkan siswa supaya bisa menjadi manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak yang mulia, sifat kreatif, dan kemandirian, sehingga bisa menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai demokrasi dan dapat bertanggungjawab secara maksimal.

Peranan pendidikan secara strategis penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mendukung proses produksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Pendidikan berperan guna meningkatkan kualitas hidup manusia pada masa yang akan datang. Timbulnya permasalahan

terhadap pendidikan ketika pemerintah hanya menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu bagian kecil dari kebijakan publik dan tidak mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu, konsep ekonomi politik pendidikan perlu diterapkan, yaitu pemakaian konsep ekonomi guna menjelaskan persoalan dan proses politik yang bertujuan agar kebijakan pendidikan maupun kebijakan publik menggambarkan persoalan dan proses politik, sehingga sektor tersebut mendapatkan prioritas dalam menentukan program-program pembangunan.

Penelitian-penelitian yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1960-an telah memberikan bukti bahwa peranan sektor pendidikan lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Peran sektor pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi beberapa negara dengan sumber daya alam yang terbatas tetapi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan China. Sejalan dengan pendapat Boediono dan McMahan (2001) yang menyatakan bahwasannya investasi pada sektor pendidikan memiliki dampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Pendidikan termasuk investasi yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan dan menjadi kunci keberhasilan terhadap pembangunan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pembangunan sector pendidikan harus mendapatkan perhatian utama oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan menjamin adanya pemerataan akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Terjadinya kegagalan dalam pembangunan sector pendidikan akan mengakibatkan kegagalan pada sector lain seperti rendahnya tingkat efisiensi produksi serta munculnya kemiskinan.

B. Komoditas Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, sehat adalah sebuah keadaan atau kondisi sehat dalam hal ini yakni sehat jasmani, mental, sosial dan rohani, sehingga setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun menurut para ahli ekonomi berpendapat bahwasannya bidang kesehatan adalah masalah ekonomi yang bisa dilihat melalui dua faktor adalah kesehatan sebagai stok serta Kesehatan sebagai suatu investasi. Dengan demikian, aspek kesehatan dapat menjadi variabel faktor produksi yang menambah nilai barang dan jasa. Kesehatan juga dapat menjadi variabel dari apa yang ingin dicapai oleh setiap individu atau perorangan, kemudian keluarga dan masyarakat, oleh karena itu disebut tujuan kesejahteraan.

Sektor kesehatan adalah keperluan dasar yang penting sekali terhadap semua masyarakat. Karena tanpa adanya kesehatan maka

produktifitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi tidak berjalan secara optimal. Kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara akan terhambat jika masyarakatnya mengalami masalah terhadap kesehatannya. Perananan masyarakat yang sehat lebih penting daripada teknologi dalam menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan. Upaya pemerintah dalam pemberantasan penyakit, perbaikan serta peningkatan status gizi masyarakat akan menghasilkan masyarakat yang produktif. Sehingga program-program pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perbaikan drainase merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan pembangunan terhadap aspek kemanusiaan, sehingga orang yang sehat lebih baik daripada orang yang tidak sehat. Oleh sebab itu, kesehatan yang baik dapat memberikan dampak atau pengaruh yang baik terhadap pembangunan, begitupula sebaliknya.

C. Komoditas Makanan

Pada dasarnya keberhasilan suatu pembangunan adalah kerjasama yang baik antara pemerintah serta masyarakat untuk meraih kesejahteraan. Adanya kualitas manusia yang meningkat adalah salah satu bukti dari capaian keberhasilan pembangunan. Salah satu aspek yang cukup menentukan yaitu asupan gizi yang baik. Namun demikian,

persoalan gizi adalah persoalan yang banyak dialami oleh banyak negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Semua itu disebabkan karena permasalahan gizi yang kompleks, bukan hanya berkaitan masalah pangan saja, tetapi terkait juga masalah kesehatan, budaya, pendidikan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Adapun persoalan kekurangan gizi yang timbul di Indonesia yang termasuk salah satu faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Faktor kemiskinan juga dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pekerjaan.

Persoalan gizi yang disebabkan oleh kemiskinan merupakan penyebab utama. Penyebab lainnya adalah adanya keterbatasan sumberdaya alam sehingga mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat dalam mengendalikan ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Persoalan gizi masyarakat yang sering dialami pada negara-negara miskin atau sedang berkembang, disebabkan karena ketebatasan sumber daya tersebut.

Selain itu adanya keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, serta faktor lingkungan, juga merupakan penyebab yang saling terkait dengan masalah kemiskinan. Dengan demikian manifestasi terjadinya masalah gizi masyarakat pada

suatu negara adalah munculnya kasus gizi buruk seperti kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Pertambahan penduduk juga menjadi faktor munculnya persoalan gizi karena meningkatnya kebutuhan mengenai persediaan pangan guna mendukung untuk aktifitas ekonomi dan kebutuhan hidup. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari perekonomian, dengan adanya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang meliputi: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apabila kebutuhan tersebut tak bisa terpenuhi, dapat menyebabkan kegagalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Persoalan biaya konsumsi makanan di Indonesia, nilainya lebih besar dibandingkan biaya konsumsi non-makanan. Sehingga untuk memelihara daya beli masyarakat, maka usaha pemerintah seharusnya dapat menjaga harga pangan agar tetap stabil khususnya beras sehingga tidak terjadi inflasi. Beras merupakan bahan makanan pokok sebanyak 65% dari seluruh masyarakat Indonesia. Apabila harga beras atau pangan terjadi kenaikan, akan memiliki dampak terhadap kemampuan daya beli penduduk miskin sehingga mengalami kesulitan guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi bahan pangan dapat menyebabkan usaha untuk melindungi pendapatan masyarakat miskin semakin sulit. Apabila harga pangan meningkat, akan menyebabkan garis kemiskinan

menjadi tinggi, yang secara langsung dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di negara kita.

D. Komoditas Perumahan

Kota merupakan tempat bermukim yang menarik bagi sebagian besar penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan urbanisasi karena perkotaan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pedesaan seperti ketersediaan fasilitas umum yang sangat memadai. Hal ini yang menjadi penyebab kepadatan pemukiman penduduk pada perkotaan lebih tinggi dibandingkan pemukiman penduduk pada perdesaan. Dari hal itu kebutuhan perumahan penduduk perkotaan menjadi meningkat. Sebagai solusi diperlukan pembangunan perumahan yang cukup banyak untuk menampung penduduk yang datang ke kota untuk bermukim atau bertempat tinggal.

Peranan perumahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah dapat mempengaruhi penghasilan penduduk menjadi lebih baik. Selain itu perumahan juga dapat meningkatkan akses masyarakat guna memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara umum, setiap perumahan akan dilengkapi dengan fasilitas umum yang baik seperti sekolah dan klinik. Aspek Perumahan merupakan salah satu aspek yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus selalu dipenuhi karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup

manusia. Terjadinya penambahan penduduk menyebabkan kebutuhan perumahan di Indonesia juga meningkat.

Rumah adalah suatu kebutuhan utama manusia yang berfungsi untuk melindungi diri dari alam, ancaman binatang, sebagai tempat istirahat, penyimpanan harta, tempat menjalankan ibadah, tempat berinteraksi dengan keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar. Suatu negara harus mampu dalam menyediakan perumahan sebagai suatu kebutuhan utama bagi penduduk. Jika perumahan penduduk tak tersedia bisa menyebabkan terjadinya kekacauan dan ketidakstabilan ekonomi atau politik karena salah satu fungsi perumahan adalah sebagai tempat untuk memperoleh rasa aman bagi penghuninya. Demikian demikian akan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi terhambat.

Perumahan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok, juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan investasi jangka panjang dengan cara melakukan usaha penyewaan atau jual beli rumah yang dapat memberikan keuntungan yang menarik. Rumah juga dapat menjadi identitas sosial di masyarakat. Kemampuan seseorang untuk memiliki rumah mewah menjadi gambaran terhadap tingkat sosial ekonomi seseorang yang tinggi, begitupula sebaliknya. Perumahan mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara berupa penciptaan lapangan kerja, dimana setiap pembangunan proyek

perumahan akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Selain itu lokasi di sekitar perumahan yang sudah selesai dibangun akan memunculkan lapangan pekerjaan baru seperti munculnya usaha-usaha kecil untuk menyediakan kebutuhan penghuni perumahan. Manfaat ekonomi perumahan perlu diperhatikan dan direncanakan sebagai komponen yang diperlukan dari usaha dalam menentukan strategi pembangunan nasional yang lebih luas.

E. Komoditas Keamanan

Komoditas keamanan merupakan salah satu barang publik (*public goods*) yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada penduduknya. Saat ini komoditas keamanan tidak lagi diatur secara monopoli oleh kekuasaan negara, akan tetapi masyarakat sipil juga diberikan kesempatan untuk ikut berperan didalamnya. Menurut Barry Buzan (1991) berpendapat bahwa terdapat 5 aspek dalam defenisi keamanan yaitu: 1). *the military security* yaitu terkait kemampuan persenjataan suatu negara untuk digunakan secara ofensif dan defensif; 2). *the political security* yaitu terkait stabilitas negara dan pemerintahan; 3). *the economic security* yaitu terkait dengan sumberdaya, keuangan serta pasar. 4). *societal security* yaitu terkait pola tradisi budaya, bahasa, serta adat, 5). *environmental security* yaitu terkait pemeliharaan lingkungan. Kelima aspek itu saling terkait serta tidak berdiri sendiri.

Bentuk-bentuk ancaman yang ada pada saat ini, tidak hanya berupa ancaman militer, tetapi juga ancaman politik, ekonomi, sosial dan ekologi. Berdasarkan pendekatan *critical security studies* (2005) dikatakan bahwa landasan keamanan yaitu keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi. Pendekatan tersebut menolak pendapat bahwa keamanan bisa didapatkan dengan akumulasi kekuatan. Oleh karena itu, keadilan sosial serta kesejahteraan ekonomi bisa didapat dengan menyediakan pendidikan, mengurangi angka kemiskinan, adanya kebebasan terhadap tekanan politik, dengan demikian keamanan masyarakat bisa tercapai.

Kemiskinan serta kelaparan secara tidak langsung dapat mengakibatkan adanya suatu kondisi yang bisa mengganggu keamanan. Hasil penelitian PRIO Oslo dan Uppsala (2002), dikatakan bahwa ada hubungan antara aspek kemakmuran nasional dan aspek perdamaian, ada 1 dari 30 negara maju mengalami konflik, kemudian 17 dari 31 negara miskin mengalami konflik. Penyebab terjadinya konflik bukan hanya disebabkan karena perseteruan etnis atau agama akan tetapi faktor politik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan juga berperan.

Paradigma keamanan telah berkembang dan tidak hanya terkait penggunaan kekuatan militer dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, akan tetapi sudah meluas sampai pada keterlibatan aspek

ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Kekuatan militer tidak menjadi jaminan terhadap keamanan suatu negara. Gagasan terhadap hubungan antara keamanan dengan pembangunan bisa menjadi solusi. Hal itu dibahas oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), dimana defenisi keamanan ekonomi menurut UNDP adalah kondisi dimana warga masyarakat dapat memperoleh penghidupan layak dan jaringan pengamanan sosial yang dibiayai serta ditanggung oleh negara.

Aspek ekonomi adalah salah satu aspek yang penting dalam keamanan. Menurut Sheila R. Ronis (2010) berpendapat bahwa keamanan ekonomi adalah salah satu aspek utama pada keamanan nasional. Keamanan nasional berhubungan erat dengan kekuatan ekonomi suatu negara, dengan demikian untuk mendapatkan keamanan maka perekonomian harus diperkuat. Keamanan ekonomi merupakan hasil kolaborasi dari sistem keamanan, perencanaan kelembagaan ekonomi melalui sistem hierarki, serta perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal. Konsep regulasi negara terhadap perekonomian berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Peningkatan persaingan dalam kegiatan ekonomi adalah faktor eksternal yang penting dalam keberlanjutan stabilitas keuangan dan keamanan. Pada saat terjadi krisis ekonomi akan menyebabkan terjadinya pengurangan investasi yang

mengakibatkan penurunan pada penjualan, pendapatan bisnis, volume keuntungan, serta peningkatan jumlah kebangkrutan, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

Terjadinya globalisasi ekonomi telah menyebabkan peningkatan saling ketergantungan perekonomian dunia antar negara yang diakibatkan oleh perkembangan arus informasi, kegiatan produksi, pemasaran, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan efek negatif berupa peningkatan kesenjangan Utara dan Selatan, yang secara langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terjadinya krisis dalam sistem perekonomian global. Situasi ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan peningkatan ketahanan ekonomi di tingkat individu, serta meningkatkan kelangsungan hidup negara dalam sistem ekonomi global.

F. Komoditas Kelestrarian Lingkungan

Terjadinya pencemaran lingkungan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Kegiatan ekonomi bisa menyebabkan munculnya pencemaran lingkungan. Hubungan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan dapat menjadi positif ataupun negatif yang biasa disebut eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif tidak dapat hilang 100%, atau

terbebas dari eksternalitas negatif disebabkan karena terdapat dua alasan antara lain: 1). Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mengasimilasi, yang mana dalam tingkat pencemaran tertentu, ada kemampuan lingkungan yang bisa mengatasinya secara alami; 2). kegiatan ekonomi pada tingkatan tertentu, akan dapat mengatasi pencemaran dengan adanya kemampuan teknologi sebagai pembersih limbah.

Kelestarian lingkungan adalah merupakan sesuatu suatu keharusan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membatasi polusi, juga dibutuhkan keefisiensi. Untuk membangun sistem ekonomi yang ramah dan efisien terhadap lingkungan, maka setiap aktivitas ekonomi harus memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan. Terjadinya pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh kesalahan dari kebijakan pemerintah, dimana biaya eksternalitas tidak pernah dimasukkan ke dalam neraca rugi-laba perusahaan. Dengan demikian perlu dilakukan penilaian ekonomi lingkungan yang berperan terhadap usaha penghitungan nilai eksternalitas, yang berguna untuk menentukan kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan oleh pemerintah atau perusahaan, agar dapat memberikan kompensasi kepada individu serta masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran

lingkungan. Kebijakan pemerintah bisa dipergunakan dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pencemaran, sehingga dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi seharusnya tetap menjaga kelestarian lingkungan supaya terjaga dengan baik.

Menurut Pearce dan Turner (1991), bahwa beberapa jasa lingkungan dapat dilakukan penilaian menurut "willingness to pay" (WTP) dan "willingnes to accept" (WTA). Willingness to pay bisa didefenisikan bahwa seberapa banyak orang dapat membayar untuk melakukan perbaikan lingkungan yang rusak, adapun willingness to accept adalah seberapa banyak orang dapat membayar untuk mencegah kerusakan lingkungan. Adanya kemauan dalam membayar atau dibayar adalah tolok ukur dalam penilaian ekonomi.

Proses pembangunan serta kelestarian lingkungan memiliki hubungan secara timbal balik, dimana pada pembangunan, aspek manusia adalah konsumen yang memiliki peranan dalam menggunakan berbagai sumber daya alam yang ada. Aspek kelestarian terhadap sumber daya alam akan sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai bentuk kegiatan atau aktifitas manusia. Oleh sebab itu segala upaya manusia dalam melakukan peningkatan aspek perekonomian seharusnya disertai

dengan upaya guna mempertahankan serta melakukan perbaikan kualitas lingkungan.

Terjadinya perubahan pada kualitas lingkungan disebabkan karena terdapatnya penggunaan lahan pada kegiatan ekonomi. Terjadinya perubahan tersebut juga terjadi karena adanya pengambilan sumber daya alam juga melebihi daya dukung lingkungan, sehingga mengakibatkan peningkatan luas lahan kritis, terjadi peningkatan kejadian erosi tanah, serta adanya proses sedimentasi. Adapun efek atau akibat lain yang mungkin terjadi adalah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Penggunaan berbagai lahan pada jangka pendek akan dapat memberi manfaat secara langsung kepada manusia, namun demikian usaha perlindungan lingkungan pada jangka panjang tidak dapat diperhitungkan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi agar dapat memperoleh kesejahteraan, maka seharusnya tetap memperhatikan adanya kelestarian lingkungan.

G. Public Merit-Private Goods

Sebuah penelitian yang menilai hubungan antara besarnya konsumsi publik dan swasta, dengan cara mengumpulkan data pengeluaran umum pemerintah yang dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah *public goods* (barang public) terdiri dari pertahanan, ketertiban umum, dan keadilan. Kategori kedua *merit goods*

(barang berjasa) terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang dapat disediakan secara pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *public goods* dapat berfungsi sebagai pengganti sementara dari *merit goods* untuk melengkapi kebutuhan konsumsi pribadi. Namun, hubungan antara *merit goods* dan *private goods* ternyata lebih kuat dibandingkan dengan *public goods* dan *private goods*. Dengan demikian, sejumlah kebutuhan konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta dapat menjadi pelengkap. Sejumlah respon kegiatan ekonomi terhadap perubahan belanja pemerintah selalu menjadi inti dari perdebatan makroekonomi dan kebijakan pemerintah. Respons tersebut bervariasi pada seluruh jenis pengeluaran pemerintah seperti konsumsi, investasi, dan pendapatan. Sejumlah respon kegiatan ekonomi terhadap perubahan kebutuhan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh adanya hubungan antara kebutuhan konsumsi pemerintah dan swasta. Respon tersebut sangat tergantung jika konsumsi pemerintah berperan sebagai pengganti kebutuhan konsumsi pribadi, artinya kebutuhan konsumsi publik dapat mengurangi kebutuhan konsumsi swasta.

Substitusi antara *public goods* dan *private goods* masih realistis. Komplementaritas antara *private goods* dan *merit goods* mungkin mengejutkan. Pertama, *merit goods* dapat meningkatkan kebutuhan konsumsi *private goods* karena relatif tidak efisien. Misalnya, belajar pada

sekolah negeri tetapi mempekerjakan tutor swasta jika kualitas pengajaran di sekolah negeri tidak dianggap memadai. Dengan demikian, komplementaritas *merit goods* terjadi karena layanan yang tidak efisien. Kedua, *merit goods* dapat meningkatkan kebutuhan konsumsi *private goods* karena meningkatnya permintaan barang lain. Misalnya, belajar pada sekolah negeri membuat orang-orang menjadi lebih berpendidikan, hal tersebut akan meningkatkan adanya permintaan buku, surat kabar dan majalah, sehingga meningkatkan pendapatan. Substitusi antara kebutuhan konsumsi pribadi dan publik dan pelengkap antara konsumsi *private goods* dan *merit goods* memiliki pesan penting terhadap masalah kebijakan adalah bahwa pengeluaran pemerintah akan cenderung memiliki efek yang berbeda, hal tersebut tergantung pada jenis barang, apakah termasuk dalam jenis konsumsi barang pemerintah atau konsumsi *merit goods*.

Barang publik seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak terjadi terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia dimana pendapatan utamanya bersumber dari pajak yang selain diperoleh dari sektor-sektor strategis, juga berasal dari pajak penyediaan barang publik. Alasan pemungutan pajak tersebut adalah untuk

melakukan peningkatan kualitas serta menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Kondisi tersebut terjadi pada negara-negara berkembang, sehingga pengelolaan barang publik, selain penyediaanya dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh pihak swasta. Kondisi ini menyebabkan terjadinya privatisasi terhadap barang publik, yang akan menjadi pencetus terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan. Barang publik merupakan kebutuhan dasar, sehingga diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang baik agar pengelolaan barang publik dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan gratis.

Privatisasi terhadap barang public telah membawa pergeseran terhadap makna barang publik yang mempunyai ciri sebagai barang *non-excludable* dan *non-rival*. Pemerintah mempunyai alasan menggandeng pihak swasta untuk menyelamatkan ekonomi bangsa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak pro rakyat dan tidak berkeadilan, yang seharusnya menyediakan barang public secara penuh agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan bisa diperoleh secara gratis. Akan tetapi sebagian besar diserahkan kepada pihak swasta, akibatnya masyarakat tidak bisa menikmati barang public tersebut secara gratis.

BAB III

MAHZAB-MAHZAB EKONOMI (BAGIAN 1)

Perkembangan ilmu ekonomi dapat dilihat dari beberapa pendekatan aliran pemikiran ekonomi atau mazhab pemikiran ekonomi. Para ekonom sebenarnya tidak mengelompokkan diri terhadap aliran pemikiran tertentu, namun para ekonom kemudian mengelompokkan pemikiran ekonom pada beberapa aliran yaitu aliran klasik (1776), aliran sosialis (1820-1850), dan aliran Keynes (1930). Ketiga aliran pemikiran ini bukan pengelompokkan yang satu-satunya dianut oleh para ekonom. Beberapa ekonom bahkan ada yang mengelompokkan hingga menjadi sembilan aliran yaitu Mazhab Merkantilisme, Mazhab Fisiokrat, Mazhab Klasik, Mazhab Sosialis, Mazhab Historis, Mazhab Marginalis, Mazhab Institusionalis, Mazhab Keynesian dan Mazhab Chicago.

Pada bab ini kita akan berfokus pada pada 3 aliran utama yaitu aliran klasik pada Adam Smith tahun 1723-1790, aliran sosialis pada zaman Karl Marx tahun 1818-1883 dan aliran Keynesian pada zaman John Maynard Keyne tahun 1883-1946.

A. Adam Smith

Ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwasannya kelahiran ilmu ekonomi dimulai dengan munculnya Mazhab Fisiokrat atau Mazhab Klasik di pertengahan abad ke-18, yaitu kurang lebih pada tahun 1750 dimana konsep hubungan sederhana antara Supply and Demand diuraikan. Pernyataan lain juga menjelaskan kelahiran ekonomi terjadi di tahun 1776 yakni saat buku "*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*" yang dikarang oleh Adam Smith yang dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi.

Teori nilai Smith adalah penjelasan dari "prinsip-prinsip yang mengatur nilai tukar komoditas" termasuk uang, di pasar, yaitu prinsip-prinsip penawaran dan permintaan atau kelangkaan relatif. Smith mengakui kesulitan yang terkait dengan memastikan penilaian individu atau "nilai pakai" dan karena itu berfokus pada menjelaskan "nilai dalam pertukaran," atau harga relatif, yang dapat diamati. Dia menyebut nilai tukar komoditas apa pun dengan uang (tunai) harganya. Ekonomi modern cukup banyak berlanjut di sepanjang garis analisis Smith, meskipun menunjuk uang sebagai ukuran nilai. Smith, di sisi lain, menggunakan kuantitas waktu kerja sebagai ukuran nilai yang sebenarnya. Jadi Smith menjelaskan: "Nilai barang-dagangan apa pun bagi orang yang memilikinya, dan yang bermaksud tidak menggunakan

atau mengkonsumsinya sendiri, tetapi menukarnya dengan barang-dagangan lain, adalah sama dengan jumlah kerja yang memungkinkannya untuk dibeli atau dikuasai. Oleh karena itu, tenaga kerja adalah ukuran sebenarnya dari nilai tukar semua komoditas”.

Teori distribusi ekonom klasik mengikuti langsung dari teori nilai mereka. Ini menjelaskan imbalan kepada pemasok jasa faktor dalam bentuk upah tenaga kerja, bunga pinjaman "modal" (tabungan), dan sewa tanah. Teori ini menggambarkan keuntungan sebagai imbalan untuk melakukan risiko dan manajemen suatu perusahaan yang menggunakan jasa dari faktor-faktor lain dengan biaya kontrak mereka. Dengan demikian, laba adalah sisa yang tersisa setelah menanggung biaya upah, bunga, sewa, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam produksi. Harga produk yang relative lebih tinggi terhadap biaya input karena itu menghasilkan Dari prinsip dasar penawaran dan permintaan, Smith juga berpendapat bahwa keuntungan akan cenderung menurun dalam pertumbuhan ekonomi karena pengusaha saling menawar untuk meminjam "modal" dengan bunga dan untuk menyewa jasa tanah dan tenaga kerja. Namun, dengan menurunnya keuntungan dan akumulasi yang lebih kecil dari "modal" atau dana untuk menyewa tenaga kerja, upah juga pada akhirnya akan menurun—tetapi tidak di bawah tingkat subsistensi, yang ditentukan berdasarkan standar hidup minimum yang

dapat diterima dalam suatu komunitas. Perlakuan Smith terhadap uang, seperti dalam ekonomi klasik secara keseluruhan, hanyalah sebuah aplikasi dari teori nilai. Uang adalah komoditas atau mata uang tertentu (emas atau perak) yang berfungsi sebagai alat tukar, atau "alat yang dengannya seluruh pendapatan masyarakat didistribusikan secara teratur di antara semua anggotanya". Ketika uang kertas pribadi diterbitkan, mereka berfungsi sebagai pengganti uang dan dengan tepat disebut "uang kertas." Dan di mana uang kertas dapat ditukarkan dengan uang (spesies) sesuai permintaan, persediaannya tidak menambah jumlah total uang atau mata uang .

Adam Smith maupun ekonom klasik yang lain mempunyai kontribusi yang penting terhadap teori pertumbuhan ekonomi. Barro dan Sala-i-Martin (2003:9) mengatakan bahwasannya para ekonom klasik, misalnya: Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), dan Thomas Malthus (1798), lalu jauh kemudian, Frank Ramsey (1928), Allyn Young (1928), Frank Knight (1944), serta Joseph Schumpeter (1934) memberikan beberapa bahan dasar yang timbul pada teori pertumbuhan ekonomi modern. Beberapa ide ini mencakup pendekatan dasar perilaku kompetitif maupun dinamika keseimbangan, peran hasil yang semakin berkurang serta keterkaitannya pada akumulasi modal fisik maupun manusia, interaksi diantara pendapatan per kapita dan tingkat

pertumbuhan penduduk, dampak kemajuan teknologi pada beberapa bentuk peningkatan pendapatan spesialisasi kerja, dan beberapa penemuan komoditas baru dan metode produksi, Rostow (1992: 508) mengatakan bahwasannya, Adam Smith (1776) memaparkan bahwasanya faktor pokok yang memberikan pengaruh pada mesin pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan modal, pembagian kerja atau kemajuan teknis, dan kerangka kelembagaan perekonomian (*non-kompetitif*) dan ekonomi pasar perdagangan. Smith juga menjelaskan penting sekali kerangka hukum yang stabil dan sistem perdagangan terbuka di mana tangan tak tampak dari pasar dapat berperan di dalamnya.

Teori Sentimen Moral dimulai dengan pernyataan: betapa egoisnya seseorang yang disangka, dengan jelas terdapat prinsip-prinsip pada sifatnya, yang menjadikannya timbul ketertarikan terhadap kekayaan milik orang lain, serta membuat kebahagiaan mereka dibutuhkan terhadapnya, walaupun ia tak mendapat apa-apa selain kegembiraan ketika memandangnya. Menurut Smith (1776: IV.5.8.2) usaha alamiah tiap individu dalam melakukan perbaikan pada keadaan dirinya, saat tiap individu bekerja keras untuk mencapai kebebasan dan keamanan dengan tanpa pertolongan orang lain, tak sekedar bisa membawa masyarakat pada kekayaan maupun kemakmuran, namun juga menyelesaikan

seratus hambatan yang tak sopan yang sering kali membebani operasinya dengan kebodohan hukum manusia; walaupun dampak dari hambatan tersebut biasa mengganggunya sedikit banyak kebebasan, atau mengurangi rasa amannya. Smith (1776: IV.2.9) mengatakan bahwasannya "... Tetapi pendapatan tahunan tiap masyarakat biasa serupa dengan nilai tukar dari seluruh hasil tahunan industrinya, atau tepatnya serupa dengan nilai tukar tersebut. Oleh sebab itu, karena tiap individu mencoba yang terbaik untuk memakai industri dalam negeri, dan dengan demikian membimbing industri tersebut supaya produknya bisa mendapat nilai paling tinggi; tiap individu harus berusaha keras dalam memberikan pendapatan tahunan masyarakat sebesar yang dia bisa.

Kemajuan teknologi juga bisa memberikan peningkatan pada pertumbuhan secara keseluruhan. Tesis Smith yang terkenal bahwasanya pembagian kerja (spesialisasi) bisa memberikan peningkatan pada pertumbuhan merupakan argumen mendasar. Smith (1776: I.1.5) juga menjelaskan bahwasannya "... peningkatan besar dalam jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh jumlah orang yang sama, karena pembagian kerja, disebabkan oleh tiga keadaan yang berbeda; yang pertama adalah untuk peningkatan ketangkasan tiap-tiap pekerja tertentu; yang kedua adalah untuk penghematan waktu yang selalu hilang sebab beralih dari satu pekerjaan menuju pekerjaan yang lain; dan

yang terakhir adalah untuk penemuan banyak mesin yang membuat pekerjaan lebih mudah, mempersingkat pekerjaan, dan memudahkan satu orang untuk melakukan pekerjaan banyak. Smith juga menyaksikan peningkatan pada mesin dan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan, sebab mereka memberikan fasilitas berupa spesialisasi lanjut. Smith juga mempercayai bahwasannya "pembagian kerja dibatasi oleh luas pasar", sehingga memajukan argumen skala ekonomi. Ketika pembagian kerja memberikan peningkatan output (meningkatkan "luas pasar"), hal itu mendorong kemungkinan pembagian kerja lebih lanjut dan dengan demikian pertumbuhan menjadi lebih lanjut pula. Oleh sebab itu, Smith mengatakan bahwasannya pertumbuhan itu memberikan penguatan pada dirinya sendiri sebab menunjukkan skala hasil yang meningkat. Pertumbuhan output (gY) didukung oleh populasi pertumbuhan (gL), investasi (gK) dan pertumbuhan tanah (gN) dan memberikan peningkatan pada produktivitas secara komprehensif (keseluruhan) (gP).

Pandangan Smith tentang determinan pertumbuhan ekonomi berpengaruh penting terhadap model pertumbuhan klasik. Pada aspek lain, pandangan Smith mendapat kritikan dari Marx, Malthus, Ricardo, dan beberapa ahli yang lain. Hamberg (1971:141) mengatakan bahwasannya "pada model klasik atau juga model Marxian, akumulasi

kapital merupakan bahan bakar yang menggerakkan mesin pembangunan ekonomi. Tak muncul indikasi bahwa terdapat gagasan klasik tentang hubungan tetap diantara tingkat pertumbuhan dan tingkat akumulasi modal, namun tak terdapat keraguan bahwasannya mereka menganggapnya hal tersebut sebagai korelasi positif” (Ahiakpor and West, 1991, Ucak, 2015).

B. Karl Marx

Marx lahir di Trier pada tahun 1818 dan meninggal di London pada tahun 1883. Ia belajar hukum dan filsafat dan menerima gelar Ph.D. pada tahun 1841. Dilatih untuk mengejar posisi baik sebagai pejabat negara atau profesor universitas, baik studinya maupun iklim politik yang represif di Prusia menyebabkan arah yang berbeda. Selama tahun-tahun mahasiswanya, dia membantu memperjuangkan hak-hak demokrasi, menentang rezim politik pribadi. Tulisan-tulisan berikutnya dan keredaksian jurnal liberal membawanya ke dalam konflik dengan sensor Prusia. Pada periode 1842–9 yang sibuk, Marx mempelajari dan menulis tentang isu-isu filosofis, politik, dan ekonomi, dan mengembangkan konsepsi materialisnya tentang sejarah (bagian 10.4.1). Dia juga melakukan kontak dengan kelompok sosialis radikal, dan bertemu Friedrich Engels, teman pribadi, politik, dan intelektualnya seumur hidup.

Pada tahun 1848, dalam usia 30 tahun, dia dan Engels menulis Manifest der Kommunistischen Partei. Dari tahun 1849 hingga sekitar tahun 1865, Marx mengurangi aktivitas politiknya dan berkonsentrasi pada analisis serius terhadap sistem kapitalis, menggabungkan penelitian dengan pekerjaan jurnalistik untuk mencari nafkah. Ribuan halaman dibuat untuk karya besarnya dalam periode yang kreatif dan sangat produktif. Pada saat yang sama, ia dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Penghasilan dari karya jurnalistik Marx sangat langka; untuk bertahan hidup mereka mengandalkan hadiah dari kerabat dan teman, terutama Engels. Rencana penelitian Marx sangat ambisius. Dia bertujuan untuk menulis analisis sistematis lengkap tentang masyarakat: ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. Pada tahun 1858 ia berencana untuk menulis enam buku. Yang pertama datang untuk sepenuhnya memenuhi pikiran dan energinya. Itu berkembang menjadi tiga jilid Kapital yang kita miliki sekarang, bersama dengan laporan lanjutan dari teori-teori ekonomi politik (tiga jilid lainnya). Marx hanya menekan dirinya sendiri dengan volume pertama Kapital (1867).

Setelah publikasinya tahun 1867, Marx terus merevisi volume I, terutama bagian teori nilai kuncinya 1 (volume disusun menjadi beberapa bagian). Edisi Jerman kedua berasal dari tahun 1873 dan edisi Perancis, secara bertahap, dari tahun 1872–5. Proses revisi ini harus diingat bagi

mereka yang mencari konsistensi antara volume I dan manuskrip untuk volume III, yang disusun pada tahun 1864–5. Pada tahun 1865–70 dan 1877–8, Marx menulis banyak volume II Capital, tanpa menyelesaikannya. Dia telah kembali terlibat dalam kegiatan politik, tetapi kesehatannya juga memburuk secara serius. Seperti yang akan kita lihat di bawah, proyek Capital Marx menggunakan metodologi sistematis yang menuntut. Menjelang akhir hidupnya, persyaratan untuk organisasi pekerjaan tumbuh melampaui energinya yang memudar. Setelah kematian Marx, dua jilid Kapital yang tersisa diedit dari draf dan buku catatan Marx oleh Engels (1885, 1894) dan sekuelnya oleh Kautsky (1905–10). Draf sedang dalam kondisi penyelesaian yang bervariasi – paruh kedua dari volume II dan III terdiri dari buku catatan yang ditata ulang – dan para editor pasti memiliki dampak pada hasilnya. Bahkan, Marx menganggapnya tidak layak untuk diterbitkan.

Marx menganut, dan merupakan pencetus, konsepsi materialis tentang sejarah (sering disebut “materialisme historis” – labelnya bukan milik Marx). Secara analitis dan institusional, setiap masyarakat dapat dilihat sebagai sejumlah domain: politik dan hukum, budaya termasuk pendidikan, dan ekonomi. Bagi Marx, pengembangan wilayah ekonomi (“hubungan produksi”) adalah kunci bagi perkembangan masyarakat secara luas (“formasi sosial”, seperti masyarakat feodal atau

borjuis/kapitalis). Apa yang terjadi dalam “superstruktur” – wilayah yuridis-politik dan budaya – dipahami dalam kerangka “struktur dasar” – hubungan ekonomi dan persyaratannya. Dua aspek mendasar bagi hubungan ekonomi itu sendiri: pertama, hubungan antara (a) lapisan atau kelas sosial yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya dan (b) lapisan atau kelas yang memiliki kekuatan untuk hidup dari surplus yang dihasilkan oleh yang pertama, dan itu biasanya juga memiliki beberapa alat produksi yang dipakai oleh yang pertama; dan, kedua, “kekuatan produksi”, penggabungan proses kerja dalam kaitannya dengan teknologi (yang terakhir dipahami dalam istilah-istilah besar dan penting). Skema ini sangat penting dalam menganalisis perubahan struktur dan aspeknya, terutama interaksi dinamisnya selama perkembangan yang tidak merata.

Marx mengembangkan ide-ide ini ketika dia berusia 25–30 tahun. Mereka dapat dilihat dengan jelas di Manifesto. Salah satu bacaan yang masuk akal tentang Kapital, atau salah satu dimensinya, adalah sebagai analisis atas struktur dasar ekonomi kapitalisme. Namun, perhatikan bahwa karya tersebut tidak memuat analisis eksplisit tentang kelas sosial (kecuali untuk “bab” yang belum selesai – panjangnya hanya lebih dari satu halaman – tentang kelas-kelas di akhir jilid III Capital, istilah “kelas” hampir tidak pernah ada. digunakan dalam Modal). Lebih jauh lagi, bahkan jika ada sedikit – sangat sedikit – sebagian besar referensi

spekulatif untuk elemen transisi dalam kapitalisme, transisi bukanlah tentang pekerjaan itu. Terutama penting dalam membaca Kapital adalah metodologi yang dikembangkan Marx di samping konsepsi materialisnya tentang sejarah, yaitu metode "kritik" -nya sebagian besar diperoleh dari Hegel (post Kant - lih., Benhabib, 1986). Hampir semua karya Marx mengusung istilah "Kritik". Hal yang terakhir mengadopsi kriteria eksternal normatif (etis, estetika, atau metodologis) untuk mengevaluasi masyarakat atau produk sosial seperti upaya artistik dan ilmiah. Metode kritik mengevaluasi masyarakat dan produk sosial berdasarkan norma dan standar dari objek penyelidikan itu sendiri. Sebuah objek penyelidikan dianalisis dari dalam dirinya sendiri. Norma dan standarnya ,mendeteksi kemungkinan inkonsistensi dan kontradiksi – seperti ketika bisnis kapitalis memuji "persaingan pasar" dan berusaha menghilangkan pesaing dan mencapai posisi monopoli. Di Capital, Marx membahas konstelasi ontologis material dan ide-ide tentangnya. Sarjana Marx hari ini menerima "kritik internal" sebagai aspek utama dari metode Marx di Capital. Namun, kontroversi tetap ada mengenai metode dan isi Capital, karena aspek lain tidak serta merta dikesampingkan.

Marx secara bersamaan menghistoriskan konsep-konsep sosial dan ekonomi – kritik adalah kritik yang dihistoriskan. Pemahaman diri sosial biasanya menerima konstelasi sosial saat ini dan konsep-konsepnya

begitu saja, sebagai "alami", atau sebagai norma ("etnosentrisme"). Mereka kemudian digunakan untuk mengevaluasi sejarah atau masyarakat kontemporer lainnya. (Misalnya, beberapa orang Amerika menyebarkan gagasan mereka tentang "pasar," "persaingan," "kebebasan ekonomi," dan "demokrasi politik" untuk mengevaluasi masyarakat lain.) Marx mengidentifikasi ekonomi politik "arus utama" pada masanya sebagai pemahaman di Inggris Raya dan Prancis tahun 1850 diatur dalam istilah ahistoris atau naturalistik. Dari perspektif ini, Marx kadang-kadang membedakan denotasi konsep trans-historis, atau materi umum - "barang" dan "pekerjaan" - dari historisnya, dalam hal ini kapitalis, rekanan - "komoditas" dan "tenaga kerja". Tujuannya bukan untuk membangun bahasa kedua, tetapi untuk menunjukkan bahwa dalam domain sosial entitas naturalistik tidak ada. Tidak ada transhistoris "kebutuhan manusia", "utilitas", "kekayaan", "barang", "pekerjaan", atau "teknologi"; mereka selalu "didefinisikan" dan "digolongkan" dalam konstelasi sosio-historis Sementara J. S. Mill menghistoriskan "hukum distribusi" – masih mengekalkan/naturalisasi "hukum produksi" – Marx benar-benar menghilangkan naturalisasi.

Pandangan bahwa kritik Marx adalah kritik yang dihistoriskan, dan bahwa segala sesuatu yang diambil manusia dalam bentuk sosial yang spesifik secara historis. Interpretasi utama dari karya Marx harus

dibedakan dari pertumbuhan abad kedua puluh "teori Marxian" sebagai satu untaian bersama, dalam ekonomi, institusionalis, neoklasik, pasca-Keynesian, dan lain-lain. Teori Marxian dan institusionalisme berbagi penekanan interdisipliner, meskipun teori Marxian juga merupakan proyek multidisiplin yang dilakukan oleh para filsuf, ekonom, ilmuwan politik, sosiolog, geografi sosial, dan sejarawan. Teori Marxian saat ini mencakup tiga jenis penelitian. Jenis pertama, yang paling dekat dengan karya Marx, adalah penelitian empiris berdasarkan teori Marx. Bahkan lebih rumit daripada dalam ekonomi arus utama, konsep di balik data statistik berbeda dari konsep teoretis. Tentu saja, studi empiris semacam itu melibatkan interpretasi teori Marx.

Jika seseorang menemukan karya Marx tidak konsisten atau tidak memuaskan, jenis kedua adalah rekonstruksi teori. Pekerjaan rekonstruktif mencakup semua bidang tulisan-tulisan Marx. Pekerjaan metodologis adalah aspek dari jenis ini. Tipe ketiga adalah pengembangan teori nonrekonstruktif. Misalnya, elemen teori siklus bisnis – sesuai dengan tingkat analisisnya ditemukan di ketiga volume *Capital*. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, peneliti siklus bisnis Marxian kontemporer dapat mencari teori siklus yang dapat diuji secara empiris; ini memiliki persyaratan selain yang dimaksudkan, atau setidaknya dicapai, oleh Marx. Meskipun banyak dari karya ini telah menyimpang

jauh dari Kapital, atau setidaknya di luarnya, kita tetap melihat di yang pertama cukup banyak referensi untuk yang terakhir (secara kritis atau pujian). Ini adalah aspek menarik dari status Marx dalam sejarah pemikiran. Ini juga merupakan aspek yang menarik dari studi sejarah pemikiran secara umum, yaitu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi heuristik yang kaya untuk ide-ide saat ini.(Veblen, 2008)

Marx lahir di Trier pada tahun 1818 dan meninggal di London pada tahun 1883. Ia belajar hukum dan filsafat dan menerima gelar Ph.D. pada tahun 1841. Dilatih untuk mengejar posisi baik sebagai pejabat negara atau profesor universitas, baik studinya maupun iklim politik yang represif di Prusia menyebabkan arah yang berbeda. Selama tahun-tahun mahasiswanya, dia membantu memperjuangkan hak-hak demokrasi, menentang rezim politik pribadi. Tulisan-tulisan berikutnya dan keredaksian jurnal liberal membawanya ke dalam konflik dengan sensor Prusia. Pada periode 1842–9 yang sibuk, Marx mempelajari dan menulis tentang isu-isu filosofis, politik, dan ekonomi, dan mengembangkan konsepsi materialisnya tentang sejarah (bagian 10.4.1). Dia juga melakukan kontak dengan kelompok sosialis radikal, dan bertemu Friedrich Engels, teman pribadi, politik, dan intelektualnya seumur hidup.

Pada tahun 1848, dalam usia 30 tahun, dia dan Engels menulis Manifest der Kommunistischen Partei. Dari tahun 1849 hingga sekitar

tahun 1865, Marx mengurangi aktivitas politiknya dan berkonsentrasi pada analisis serius terhadap sistem kapitalis, menggabungkan penelitian dengan pekerjaan jurnalistik untuk mencari nafkah. Ribuan halaman dibuat untuk karya besarnya dalam periode yang kreatif dan sangat produktif. Pada saat yang sama, ia dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Penghasilan dari karya jurnalistik Marx sangat langka; untuk bertahan hidup mereka mengandalkan hadiah dari kerabat dan teman, terutama Engels. Rencana penelitian Marx sangat ambisius. Dia bertujuan untuk menulis analisis sistematis lengkap tentang masyarakat: ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. Pada tahun 1858 ia berencana untuk menulis enam buku. Yang pertama datang untuk sepenuhnya memenuhi pikiran dan energinya. Itu berkembang menjadi tiga jilid Kapital yang kita miliki sekarang, bersama dengan laporan lanjutan dari teori-teori ekonomi politik (tiga jilid lainnya). Marx hanya menekan dirinya sendiri dengan volume pertama Kapital (1867).

Setelah publikasinya tahun 1867, Marx terus merevisi volume I, terutama bagian teori nilai kuncinya 1 (volume disusun menjadi beberapa bagian). Edisi Jerman kedua berasal dari tahun 1873 dan edisi Perancis, secara bertahap, dari tahun 1872–5. Proses revisi ini harus diingat bagi mereka yang mencari konsistensi antara volume I dan manuskrip untuk volume III, yang disusun pada tahun 1864–5. Pada tahun 1865–70 dan

1877–8, Marx menulis banyak volume II Capital, tanpa menyelesaikannya. Dia telah kembali terlibat dalam kegiatan politik, tetapi kesehatannya juga memburuk secara serius. Seperti yang akan kita lihat di bawah, proyek Capital Marx menggunakan metodologi sistematis yang menuntut. Menjelang akhir hidupnya, persyaratan untuk organisasi pekerjaan tumbuh melampaui energinya yang memudar. Setelah kematian Marx, dua jilid Kapital yang tersisa diedit dari draf dan buku catatan Marx oleh Engels (1885, 1894) dan sekuelnya oleh Kautsky (1905–10). Draft sedang dalam kondisi penyelesaian yang bervariasi – paruh kedua dari volume II dan III terdiri dari buku catatan yang ditata ulang – dan para editor pasti memiliki dampak pada hasilnya. Bahkan, Marx menganggapnya tidak layak untuk diterbitkan.

Marx menganut, dan merupakan pencetus, konsepsi materialis tentang sejarah (sering disebut “materialisme historis” – labelnya bukan milik Marx). Secara analitis dan institusional, setiap masyarakat dapat dilihat sebagai sejumlah domain: politik dan hukum, budaya termasuk pendidikan, dan ekonomi. Bagi Marx, pengembangan wilayah ekonomi (“hubungan produksi”) adalah kunci bagi perkembangan masyarakat secara luas (“formasi sosial”, seperti masyarakat feodal atau borjuis/kapitalis). Apa yang terjadi dalam “superstruktur” – wilayah yuridis-politik dan budaya – dipahami dalam kerangka “struktur dasar” –

hubungan ekonomi dan persyaratannya. Dua aspek mendasar bagi hubungan ekonomi itu sendiri: pertama, hubungan antara (a) lapisan atau kelas sosial yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya dan (b) lapisan atau kelas yang memiliki kekuatan untuk hidup dari surplus yang dihasilkan oleh yang pertama, dan itu biasanya juga memiliki beberapa alat-alat produksi yang dipakai oleh yang pertama; dan, kedua, "kekuatan produksi", penggabungan proses kerja dalam kaitannya dengan teknologi (yang terakhir dipahami dalam istilah-istilah besar dan penting). Skema ini sangat penting dalam menganalisis perubahan struktur dan aspeknya, terutama interaksi dinamisnya selama perkembangan yang tidak merata.

Marx mengembangkan ide-ide ini ketika dia berusia 25–30 tahun. Mereka dapat dilihat dengan jelas di Manifesto. Salah satu bacaan yang masuk akal tentang Kapital, atau salah satu dimensinya, adalah sebagai analisis atas struktur dasar ekonomi kapitalisme. Namun, perhatikan bahwa karya tersebut tidak memuat analisis eksplisit tentang kelas sosial (kecuali untuk "bab" yang belum selesai – panjangnya hanya lebih dari satu halaman – tentang kelas-kelas di akhir jilid III Capital, istilah "kelas" hampir tidak pernah ada. digunakan dalam Modal). Lebih jauh lagi, bahkan jika ada sedikit – sangat sedikit – sebagian besar referensi spekulatif untuk elemen transisi dalam kapitalisme, transisi bukanlah

tentang pekerjaan itu. Terutama penting dalam membaca Kapital adalah metodologi yang dikembangkan Marx di samping konsepsi materialisnya tentang sejarah, yaitu metode "kritik" -nya sebagian besar diperoleh dari Hegel (post Kant - lih., Benhabib, 1986). Hampir semua karya Marx mengusung istilah "Kritik". Hal yang terakhir mengadopsi kriteria eksternal normatif (etis, estetika, atau metodologis) untuk mengevaluasi masyarakat atau produk sosial seperti upaya artistik dan ilmiah. Metode kritik mengevaluasi masyarakat dan produk sosial berdasarkan norma dan standar dari objek penyelidikan itu sendiri. Sebuah objek penyelidikan dianalisis dari dalam dirinya sendiri. Norma dan standarnya ,mendeteksi kemungkinan inkonsistensi dan kontradiksi – seperti ketika bisnis kapitalis memuji "persaingan pasar" dan berusaha menghilangkan pesaing dan mencapai posisi monopoli. Di Capital, Marx membahas konstelasi ontologis material dan ide-ide tentangnya. Sarjana Marx hari ini menerima "kritik internal" sebagai aspek utama dari metode Marx di Capital. Namun, kontroversi tetap ada mengenai metode dan isi Capital, karena aspek lain tidak serta merta dikesampingkan.

Marx secara bersamaan menghistoriskan konsep-konsep sosial dan ekonomi – kritik adalah kritik yang dihistoriskan. Pemahaman diri sosial biasanya menerima konstelasi sosial saat ini dan konsep-konsepnya begitu saja, sebagai "alami", atau sebagai norma ("etnosentrisme").

Mereka kemudian digunakan untuk mengevaluasi sejarah atau masyarakat kontemporer lainnya. (Misalnya, beberapa orang Amerika menyebarkan gagasan mereka tentang "pasar," "persaingan," "kebebasan ekonomi," dan "demokrasi politik" untuk mengevaluasi masyarakat lain.) Marx mengidentifikasi ekonomi politik "arus utama" pada masanya sebagai pemahaman di Inggris Raya dan Prancis tahun 1850 diatur dalam istilah ahistoris atau naturalistik. Dari perspektif ini, Marx kadang-kadang membedakan denotasi konsep trans-historis, atau materi umum - "barang" dan "pekerjaan" - dari historisnya, dalam hal ini kapitalis, rekanan - "komoditas" dan "tenaga kerja". Tujuannya bukan untuk membangun bahasa kedua, tetapi untuk menunjukkan bahwa dalam domain sosial entitas naturalistik tidak ada. Tidak ada transhistoris "kebutuhan manusia", "utilitas", "kekayaan", "barang", "pekerjaan", atau "teknologi"; mereka selalu "didefinisikan" dan "digolongkan" dalam konstelasi sosio-historis Sementara J. S. Mill menghistoriskan "hukum distribusi" – masih mengekalkan/menaturalisasi "hukum produksi" – Marx benar-benar menghilangkan naturalisasi.

Pandangan bahwa kritik Marx adalah kritik yang dihistoriskan, dan bahwa segala sesuatu yang diambil manusia dalam bentuk sosial yang spesifik secara historis. Interpretasi utama dari karya Marx harus dibedakan dari pertumbuhan abad kedua puluh "teori Marxian" sebagai

satu untaian bersama, dalam ekonomi, institusionalis, neoklasik, pasca-Keynesian, dan lain-lain. Teori Marxian dan institusionalisme berbagi penekanan interdisipliner, meskipun teori Marxian juga merupakan proyek multidisiplin yang dilakukan oleh para filsuf, ekonom, ilmuwan politik, sosiolog, geografi sosial, dan sejarawan. Teori Marxian saat ini mencakup tiga jenis penelitian. Jenis pertama, yang paling dekat dengan karya Marx, adalah penelitian empiris berdasarkan teori Marx. Bahkan lebih rumit daripada dalam ekonomi arus utama, konsep di balik data statistik berbeda dari konsep teoretis. Tentu saja, studi empiris semacam itu melibatkan interpretasi teori Marx.

Jika seseorang menemukan karya Marx tidak konsisten atau tidak memuaskan, jenis kedua adalah rekonstruksi teori. Pekerjaan rekonstruktif mencakup semua bidang tulisan-tulisan Marx. Pekerjaan metodologis adalah aspek dari jenis ini. Tipe ketiga adalah pengembangan teori nonrekonstruktif. Misalnya, elemen teori siklus bisnis – sesuai dengan tingkat analisisnya ditemukan di ketiga volume *Capital*. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, peneliti siklus bisnis Marxian kontemporer dapat mencari teori siklus yang dapat diuji secara empiris; ini memiliki persyaratan selain yang dimaksudkan, atau setidaknya dicapai, oleh Marx. Meskipun banyak dari karya ini telah menyimpang jauh dari *Kapital*, atau setidaknya di luarnya, kita tetap melihat di yang

pertama cukup banyak referensi untuk yang terakhir (secara kritis atau pujian). Ini adalah aspek menarik dari status Marx dalam sejarah pemikiran. Ini juga merupakan aspek yang menarik dari studi sejarah pemikiran secara umum, yaitu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi heuristik yang kaya untuk ide-ide saat ini. (Veblen, 2008)

C. John Maynard Keynes

Dalam otobiografi John R. Commons, ia menulis bahwa tujuannya adalah untuk "menyelamatkan kapitalisme dengan membuatnya baik"); sentimen serupa mengalir melalui "Apakah saya seorang Liberal?" Keynes. dan "Transisi Ekonomi di Inggris." Sementara Dua esai Keynes - yang tanpa catatan akhir dan referensi bibliografi - kritis terhadap "kapitalisme individualistis," mereka juga berisi keyakinannya bahwa sosialisme tidak menawarkan alternatif konstruktif untuk kapitalisme yang direformasi. Masalah dengan sosialisme, bagaimanapun, tidak pernah dijelaskan. Dalam kedua esainya, Keynes hanya menulis bahwa sosialisme "muncul dari pengandaian era Kelimpahan, sama seperti individualisme laissez-faire dan permainan bebas kekuatan ekonomi".

Pernyataan singkat Keynes tentang sosialisme memperoleh kejelasan ketika dipertimbangkan dalam hubungannya dengan sebuah artikel oleh Commons yang muncul di *The Atlantic Monthly* pada akhir tahun 1925 dengan judul "Marx Today: Capitalism and Socialism." Dalam

artikel tersebut, Commons menyatakan bahwa pengikut Adam Smith dan Karl Marx dipersatukan oleh kepentingan untuk membebaskan individu, keyakinan pada kekuatan produktif mesin industri, dan keyakinan bahwa semua ketidakstabilan ekonomi dan konflik dapat diberantas secara permanen dengan hak sosial. sistem-kapitalisme persaingan bebas sempurna dalam kasus yang pertama dan sosialisme yang murni dalam kasus yang terakhir. Tampaknya merupakan taruhan yang baik bahwa kesamaan Commons atribut ortodoksi ekonomi dan Marx mewakili apa yang ada dalam pikiran Keynes dengan frase "praanggapan era Kelimpahan." Artikel Commons mengisi celah dalam argumen Keynes, sementara kuliah yang terakhir memperjelas bahwa Keynes mengetahui setidaknya beberapa dari apa yang ditulis Commons tentang subjek tersebut. Artikel Commons juga membantu menjelaskan apa yang menurut Keynes meresahkan tentang praanggapan yang mendasari sosialisme. Solusi untuk konflik manusia dalam Smith dan Marx adalah apa yang disebut Commons sebagai pencapaian "keselarasan kepentingan yang otomatis". Ini adalah gagasan yang ditolak Commons: "Seluruh idealisme keselarasan kepentingan, baik di bawah kapitalisme atau di bawah sosialisme, runtuh jika kita pernah mengakui bahwa konflik sosial selalu dan akan selalu menjadi fakta fundamental dalam kemajuan umat manusia".

Commons menambahkan: "Tidak pernah dan tidak akan pernah ada keselarasan kepentingan yang otomatis." Akan selalu ada keinginan baru, kelangkaan sumber daya berkualitas premium, dan perbedaan pendapat tentang penyediaan sosial. Akibatnya, "[Jika keselarasan kepentingan benar-benar tercapai, hal itu hanya dapat dicapai saat kita menjalaninya, dari hari ke hari, menangani setiap konflik yang muncul, dan menyelesaikannya sebaik yang kita tahu caranya" Sementara Commons memberikan argumen yang mendukung penolakan Keynes terhadap sosialisme, ada juga bukti Keynes menerima garis pemikiran ini. Dalam artikel tahun 1935 untuk *The New Republic*, misalnya, Keynes membagi ekonom 'menjadi dua kubu. sistem dalam jangka panjang menyesuaikan diri, meskipun dengan derit dan erangan dan sentakan, dan terganggu oleh jeda waktu, gangguan dan kesalahan dari luar." Kelompok lain menolak gagasan bahwa sistem "dalam arti yang signifikan, menyesuaikan diri ." Keynes menempatkan Mar ada di kubu penyesuaian diri (karena mereka memperlakukan sosialisme sebagai hal yang tak terelakkan dan percaya bahwa kapitalisme "tidak mungkin berhasil dalam praktik") dan menyejajarkan dirinya dengan mereka yang menolak penyesuaian diri. Singkatnya, gagasan harmoni kepentingan otomatis ditolak.

Pada saat yang sama, keakraban dengan tulisan-tulisan Commons dari pertengahan 1920-an membantu memperjelas aspek-aspek yang belum berkembang dari kuliah Keynes tahun 1925, "Apakah saya seorang Liberal?" dan "Transisi Ekonomi di Inggris" - yaitu, saran bahwa sosialisme dan kapitalisme individualistis muncul dari praanggapan yang sama dan bahwa sistem sebelumnya tidak menawarkan alternatif yang layak untuk kapitalisme terkelola. Selain itu, sedikit pekerjaan detektif telah mengungkapkan bahwa Keynes mempelajari analisis Commons dengan memiliki akses ke Reasonable Value dan mungkin dokumen serupa yang belum diterbitkan dalam bentuk akhirnya.

Masalah terakhir masih harus dipertimbangkan: signifikansi kontemporer dari minat Keynes pada ide-ide Commons. Untuk mengatur panggung, bagaimanapun, beberapa titik persimpangan dalam sejarah institusionalisme dan ekonomi Keynes harus diidentifikasi. Setidaknya sejak pertengahan 1970-an, ketika stagflasi mulai secara serius mengikis posisi dominan Keynesianisme neoklasik (yang disebut oleh rekan Keynes, Joan Robinson, Bastard Keynesianisme), semakin banyak sarjana yang menyatakan minatnya pada kompatibilitas dan komplementaritas institusionalisme dan ekonomi Keynes. . Pada tahun 1976, misalnya, Wallace C. Peterson menggunakan pidato kepresidenannya sebelum Pertemuan Tahunan Asosiasi Institusionalis untuk Ekonomi Evolusioner

untuk membahas bagaimana institusionalisme dan Keynes tumpang tindih "pada sejumlah landasan, ide-ide mani" (Peterson 1977, 202). 14 Pada awal 1980-an, dengan Keynesian neoklasik di bawah serangan berat dari kedua "individualis ekonomi konservatif" seperti Milton Friedman dan Marxis seperti Ernest Mandel, ekonom Charles K. Wilber dan Kenneth P. Jameson berusaha menawarkan merek ekonomi alternatif. Fokus mereka adalah pada penyediaan solusi praktis untuk masalah dunia nyata, dan pendekatan mereka berakar pada Keynes dan institusionalis Amerika. (Rosser, 2003)

BAB IV

MAHZAB-MAHZAB EKONOMI (BAGIAN 2)

A. Gary Becker

Gary Becker mengubah ekonomi dengan memperluas jangkauan masalah yang dipertimbangkan oleh para ekonom dan dengan menciptakan kerangka kerja analitis baru. Dia mendirikan bidang ekonomi dan kebijakan publik yang berkembang pesat. Dikatakan bahwa Helen dari Troy adalah "Wajah yang Meluncurkan Seribu Kapal." Dapat dikatakan tentang Gary Becker bahwa ide-idenya meluncurkan produksi ratusan kumpulan data dan ribuan studi empiris dan teoretis. Makalah ini membahas Becker sebagai model ilmuwan ekonomi yang kreativitas, keingintahuan, keuletan, keterbukaan terhadap ide dan metodologi penelitian digabungkan untuk menghasilkan badan penelitian yang memperluas batas-batas ekonomi dan menjawab pertanyaan mendasar dari kebijakan publik. Becker menulis sedikit tentang metodologinya. Pemeriksaan dekat pendekatannya di banyak kontribusi mengungkapkan pola konsisten yang memiliki pelajaran penting bagi semua ekonom yang ingin melakukan penelitian ekonomi yang bermanfaat secara empiris.

Pendekatan Becker terhadap ekonomi ditempa dalam lingkungan intelektual yang intens di Universitas Chicago pada awal 1950-an ketika dia masih mahasiswa pascasarjana. Milton Friedman memiliki pengaruh penting pada metodologi Becker. Friedman secara konsisten menerapkan teori harga dan analisis ekuilibrium parsial Marshall untuk menganalisis berbagai pertanyaan ekonomi. Friedman (1949) membandingkan keberhasilan empiris dari pendekatan Marshallian dengan sterilitas empiris teori keseimbangan umum Walrasian. Friedman juga memiliki pandangan yang kuat tentang bagaimana melakukan pekerjaan empiris di bidang ekonomi. Ketika Becker masih mahasiswa, Friedman menerbitkan "Metodologi Ekonomi Positif" yang berpengaruh dan kontroversial. (1953).

Becker menyerap semua pengaruh ini. Pernah menjadi pemikir independen, ia mengembangkan sintesis unik dari pendekatan ini untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi baru. Dia fleksibel dan menggunakan pendekatan apa pun yang berguna dalam memecahkan masalah. Misalnya, ia berangkat dari naskah Marshallian ketika ia menggunakan teori keseimbangan umum dinamis dalam generalisasi teori populasi Malthus (Becker, 1991). Dia menolak pendekatan induktif murni dari Burns dan Mitchell bahwa "fakta dapat berbicara sendiri." Seperti Koopmans, dia sangat percaya bahwa semua pengukuran perlu

dipandu oleh teori. Seperti Friedman (1953), ia juga menolak pendekatan berbasis teori murni untuk ekonomi dan perbedaan tajam antara tugas penciptaan teori, identifikasi model, estimasi dan inferensi yang ditampilkan dalam pendekatan Cowles untuk ekonometrik. Dia sering mengatakan "ekonomi adalah dialog antara teori dan data dan tidak boleh menjadi salah satu atau yang lain." Becker menghargai bahwa setiap perbedaan antara model dan data selalu tidak tepat. Data menyarankan teori. Teori yang dibangun paling baik diuji dengan data baru (sampel data baru) dan dengan mempertimbangkan dan menguji implikasi tambahan dari teori.

Metodologi Becker yang, ditambah dengan keingintahuan intelektualnya yang kuat dan kesediaannya untuk melibatkan gagasan, betapapun bermusuhannya dengan pembawanya, menghasilkan analisis ekonomi yang kuat. Dia sangat kreatif dalam mencari jawaban atas pertanyaan besar di bidang ekonomi dan memiliki banyak momen "eureka" dalam karirnya. Saya pertama-tama menjelaskan metodologinya dan kemudian memberikan beberapa contoh penerapannya. Becker menciptakan badan ilmu ekonomi yang kuat. Dia melakukannya dengan tanpa henti menerapkan tiga prinsip: (a) agen ekonomi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri (didefinisikan secara luas dan semakin luas didefinisikan selama karirnya); (b) preferensi stabil (tetapi mereka dapat

berkembang melalui latihan, pembiasaan, pembelajaran dan karenanya mereka dapat berbeda di antara orang-orang); dan (c) pasar—didefinisikan secara luas—berada dalam ekuilibrium (baik pasar formal maupun non-pasar informal menggunakan harga “bayangan” eksplisit dan implisit) (Becker, 1978). Mempelajari dengan cermat fakta-fakta dari setiap fenomena yang dia coba jelaskan, dan menggunakan teori ekonomi yang dipandu oleh tiga prinsip ini, dia mengajukan hipotesis yang masuk akal. Dia menggunakan model sederhana yang setia pada data, yang konsisten dengan teori ekonomi, yang memiliki predik atas berbagai fenomena di luar yang sedang diselidiki, dan yang bermanfaat dalam menyarankan hipotesis baru. Dia mengakui kegagalan, secara konstruktif melibatkan kritiknya, dan secara kreatif menanggapi dengan wawasan segar dan model baru.

Interaksi konstan antara teori, data, dan revisi teori adalah fitur inti sains. Interaksi ini merupakan komponen penting dari "Metodologi Ekonomi Positif" Friedman. Model Becker yang pelit namun sarat konten berevolusi agar sesuai dengan fakta. Pendekatan untuk membangun model ini adalah fitur penting dari metode ilmiah. Ini bukan induktif atau deduktif murni. Ini abduktif. Penculikan — bolak-balik antara hipotesis (seperti yang dikodekan dalam model) dan data — adalah inti dari sains yang serius. Dapat dikatakan bahwa Becker “menculik” ilmu ekonomi. Dia

mencari rangkaian penjelasan yang paling masuk akal dan koheren yang konsisten dengan data yang tersedia. Dalam banyak upayanya untuk memahami fenomena ekonomi, dia membawa wawasan kreatif dalam menanggapi ketidaksesuaian awal antara model dan data. Becker mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap analisis ekonomi, dengan memanfaatkan beragam arus pemikiran yang berputar-putar di Chicago pada masa mahasiswanya, mengambil apa yang dia anggap sebagai elemen yang paling bermanfaat secara ilmiah dari masing-masingnya. Dia berlatih dan menganjurkan pengukuran dengan teori. Dia dengan bebas menggunakan model keseimbangan umum ketika mereka secara empiris berhasil. Dia aktif menculik, bolak-balik antara model dan data, belajar dari interaksi itu, menghasilkan wawasan kreatif untuk tantangan empiris dan dengan demikian menerangi pemahaman masalah besar. Sementara Becker tidak dikenal terutama untuk melakukan penelitian empiris asli, pengetahuannya, sintesis, dan wawasan tentang bukti empiris pada setiap pertanyaan yang dia jawab sangat komprehensif. Dia dengan cermat mengikuti, mendorong, dan dengan serius mengomentari sejumlah besar penelitian ekonomi empiris. Analisis mikroekonomi perintisnya dikembangkan pada saat data mikro skala besar mulai dikumpulkan tentang pendapatan, kesuburan, dan pasokan tenaga kerja. Data ini menantang dan mempertajam teorinya dan

teorinya memandu pengumpulan data baru. Becker menciptakan kerangka kerja yang membentuk dan memandu pengumpulan data tentang penggunaan waktu, kembalinya ke pendidikan dan bias kemampuan, penentu pilihan pendidikan, kejahatan, pembentukan dan pembubaran rumah tangga, kesuburan, kecanduan, pasokan tenaga kerja siklus hidup,

Gary Becker memberikan kontribusi yang brilian dan berwawasan luas untuk ilmu ekonomi dengan menjawab berbagai pertanyaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian ia memperluas ruang lingkup dan metode ekonomi. Dia mencapai prestasi ini dengan menerapkan versi khasnya sendiri tentang metode ilmiah abduktif. Penelitiannya dipandu oleh seperangkat prinsip dasar inti yang tanpa henti dia terapkan dan kembangkan sesuai kebutuhan untuk memecahkan masalah baru. Saat ia berevolusi, seluruh profesi berkembang bersamanya, memperluas alat dan cakrawalanya. Kesediaannya untuk mengakui keterbatasan karyanya, untuk secara konstruktif melibatkan semua kritikusnyanya, dan untuk secara kreatif menanggapi kritik dan kegagalan empiris awal menyebabkan kehidupan produktif beasiswa inovatif.(Heckman, 2015)(Heckman, 2016)

B. Vilfredo Pareto

Berbeda dengan ekonomi perilaku kontemporer, Pareto mengakui bahwa: tugas utama seorang ahli teori adalah menjelaskan tindakan.

Sehubungan dengan perbedaan Arthur Lovejoy antara teori dunia ini dan dunia lain, Pareto adalah ahli teori dunia ini sementara ekonomi perilaku mencerminkan orientasi dunia lain terhadap tindakan manusia dalam masyarakat. Kita ikuti perbedaan ini dengan mengeksplorasi bagaimana perbedaan Pareto antara logis dan non-logis tindakan menciptakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk pendekatan penjelasan teori sosial, berbeda dengan pendekatan hortatory untuk kritik sosial yang berasal dari ekonomi perilaku. Dalam hal ini, Pendekatan Pareto terhadap teori tindakan memiliki kemiripan yang kuat dengan penekanan Gerd Gigerenzer pada rasionalitas bukan sebagai perhitungan tetapi sebagai interaksi antara individu dan berbagai lingkungan untuk tindakan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, Pareto menunjukkan jalan menuju berakhir teori masyarakat, sedangkan pendekatan tindakan yang diambil oleh perilaku kontemporer ekonomi menggantikan teori dengan historisisme.

Di bagian ini, menyajikan beberapa temuan umum dalam ekonomi perilaku sehubungan dengan kritik yang seharusnya dari Pareto efisiensi persaingan sempurna yang dianggap diciptakan oleh kritik tersebut. Sebuah literatur yang banyak tentang ekonomi perilaku yang telah muncul sejak Kahneman dan makalah Tversky tentang teori prospek berada di luar cakupan dan tujuan bagian ini. Sebaliknya, apa yang ingin

disoriti adalah, pada akhirnya, ekonomi perilaku bergantung pada dan tidak bisa lepas dari asumsi metodologis dan kesimpulan normatif yang sama dari Pareto efisiensi persaingan sempurna, yang dianggap sebagai kritik. Pada blok bangunan inilah efisiensi Pareto dari persaingan sempurna adalah dibangun dan dikritik oleh ekonom arus utama dan perilaku. Alokasi sumber daya yakni dikatakan efisien oleh Pareto ketika tak mungkin membuat seseorang menjadi lebih baik dengan tidak menjadikan orang lain lebih buruk dari orang tersebut. Selain itu, situasi efisien Pareto adalah situasi yang menghilangkan dari perhatian analitis semua interaksi sosial antar individu. Dalam efisiensi Pareto sempurna persaingan, biaya tidak tergantung pada pilihan dan berfungsi sebagai proxy yang dapat diukur secara objektif untuk penilaian yang diadakan secara subyektif tentang pengorbanan. Meskipun ekonomi perilaku telah dianggap mengkritik model persaingan sempurna karena kurangnya relevansi empiris dengan dunia nyata, tidak dapat menggantikan kekurangan dari postulat motivasi yang digunakan dalam model perfect kompetisi, homo ekonomi, tanpa juga mengabaikan kemampuan prediksinya sendiri kesimpulan normatif, yaitu bahwa individu dapat dan harus "didorong" agar mendekati kondisi efisiensi Pareto. kata efisiensi menyiratkan gagasan neoklasik tentang alokasi statis, Pareto-optimal dari

sumber daya yang “diberikan” sesuai dengan teknologi dan selera yang “diberikan”.

Meskipun ekonomi perilaku akan keberatan dengan penafsiran neoklasik ini dunia sebagai tidak realistis, ia mengadopsi kerangka pilihan rasional yang sama sebagai tolok ukur normatif yang memaksakan situasi pada individu "seolah-olah" pengamat eksternal dianggap tahu di mengajukan jawaban yang benar untuk situasi itu, seperti "lelang Walrasian" pada umumnya keseimbangan kompetitif. Ekonom perilaku dalam hal ini sering berbicara tentang merancang eksperimen sehingga menginduksi fungsi utilitas dalam mata pelajaran mereka. Setelah melakukan ini, hasil dari eksperimen dapat dinilai sehubungan dengan seberapa dekat mereka datang ke fungsi utilitas yang diinduksi. Bagaimanapun, eksperimen mengambil posisi seorang instruktur di kelas logika atau matematika dan menilai kinerja peserta dalam eksperimen berdasarkan hasil yang objektif ditugaskan untuk mata pelajaran. Eksperimen, dengan kata lain, tidak dirancang untuk mempelajari sesuatu tentang orang yang sebelumnya tidak dikenal. Melainkan dirancang untuk menilai orang berdasarkan standar tertentu eksperimen telah dibangun. Prosedur analitis ini sama dengan yang dilakukan oleh para ekonom itu gunakan untuk menempatkan model ekuilibrium kompetitif dan kemudian tanyakan seberapa dekat realitas cocok dengan

model itu. Perhatian Pareto untuk mengembangkan teori penjas masyarakat dimulai dengan pengamatan yang mengarah ke dikotomi antara tindakan logis dan non-logis. Rasionalitas selalu hadir sebagai kualitas universal, tetapi cara tindakan tersebut memanifestasikan dirinya bergantung pada lingkungan di mana individu bertindak dan ibedakan antara tindakan logis dan non-logis, dan perbedaan Pareto sangat penting bagi politik ekonomi. Namun, perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan perbedaan antara rasionalitas dan irasionalitas. Pareto menganggap semua tindakan itu rasional, dan dalam hal ini orientasinya serupa kepada Thomas Szasz dan klaimnya bahwa penyakit mental sebagian besar merupakan bagian dari mitologi yang berlaku terminologi medis untuk apa yang benar-benar masalah moral. Seseorang yang tidak ingin pergi pekerjaan bisa disebut malas atau dicap malingerer. Atau, orang itu bisa digambarkan sebagai menderita beberapa bentuk gangguan stres. Pilihan terakhir memungkinkan orang tersebut untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri sementara juga mungkin memenuhi syarat untuk beberapa bentuk bantuan kesejahteraan dan juga pembayaran untuk diagnosa medis. Bagi Pareto, semua tindakan itu rasional, tetapi ada lingkungan yang berbeda di mana tindakan tersebut terjadi. Substansi tindakan rasional bervariasi di seluruh lingkungan bahkan meskipun bentuk rasionalitas itu invarian

terhadap lingkungan, yang mirip dengan milik Gerd Gigerenzer pengobatan rasionalitas sebagai memerlukan hubungan antara aktor dan lingkungan. Bahkan, tindakan rasional menyiratkan persaingan atas sumber daya yang langka, dan sama seperti dalam kasus tindakan rasional, persaingan akan bermanifestasi secara berbeda di seluruh pengaturan pasar dan non-pasar.

Pareto menerima kualitas tindakan ini sebagai rasional dari sudut pandang subjek. Akan tetapi, pembedaan Pareto dirumuskan dari sudut pandang objektif. Ini adalah titik dari pandangan seorang pengamat yang mengklasifikasikan tindakan ke dalam kategori. Dalam hal ini, Pareto berpendapat bahwa tindakan sebagian besar tindakan termasuk pada salah satu dari dua kategori: tindakan logis dan non-logis. Selanjutnya, itu adalah umumnya jelas ke dalam kategori mana suatu tindakan jatuh. Semua tindakan memiliki struktur formal yang sama: seseorang bertindak dalam menanggapi keinginan untuk mencapai beberapa tujuan dengan secara efektif menerapkan cara untuk itu objektif. Dalam beberapa kasus ada hubungan langsung antara tindakan dan tujuan yang dapat diberikan masuk akal untuk pengamat eksternal. Dalam kasus lain tidak ada hubungan seperti itu bahwa eksternal pengamat bisa melihat, dan tindakannya tidak logis. Salah satu kualitas manusia adalah keinginan dan kemampuan untuk memberikan penjelasan yang logis tentang semua

tindakan. Ini, Pareto digambarkan sebagai derivasi, meskipun ini lebih dikenal hari ini sebagai rasionalisasi.

Dalam lingkungan tindakan seperti ini, masuk akal untuk mengklaim bahwa tindakan menunjukkan kualitas penilaian logis dari opsi yang juga dapat diuji melalui metode logika-eksperimental. Pembicara akan selalu menegaskan bahwa dia telah membuat logika atau pilihan rasional. Pendekatan logika-eksperimental Pareto menanyakan apakah pengamat eksternal akan mencapai penilaian yang sama dari penilaian logis di antara pilihan di mana penilaian itu dapat diuji dapat dengan pengalaman atau percobaan. Dalam pengaturan pasar hal ini umumnya terjadi, tetapi seringkali tidak dalam pengaturan politik, di mana harga pasar tidak ada untuk memandu tindakan seseorang menuju suatu tujuan. Tindakan non-logis menunjukkan tindakan yang tidak ada hubungan langsung antara tindakan dan hasil. Banyak dari lingkungan untuk tindakan ini adalah lingkungan di mana harga tidak ada, yang membuat penilaian pengorbanan tidak mungkin dilakukan. Satu set tindakan manusia yang dapat dikenali melibatkan memberikan sumbangan amal ke berbagai organisasi.

Vendor yang menyadari bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan di mana tindakan dilakukan didominasi non-logis akan memodifikasi strategi mereka agar sesuai dengan lingkungan itu. Pareto

diakui bahwa salah satu ciri sifat manusia adalah keinginan yang dimiliki orang untuk merasa senang dengan tindakan mereka. Dalam pengaturan didominasi oleh tindakan logis, kualitas perasaan-baik itu muncul sebagai konsekuensi dari kepuasan pilihan pasar. Dalam pengaturan yang didominasi oleh tindakan nonlogis, hubungan langsung antara pilihan dan konsekuensi lenyap, yang membawa serta kemampuan untuk merasa baik tentang tindakan. Situasi ini adalah tidak konsisten dengan replikasi tindakan tersebut yang, pada gilirannya, berarti bahwa prospek kelangsungan hidup dari vendor akan lemah tanpa beberapa tindakan kompensasi. Salah satu bentuk tindakan kompensasi adalah ideologis dalam karakter, dan memerlukan penyediaan gambar yang memungkinkan aktor untuk merasa baik tentang tindakannya meskipun secara logis tidak mampu untuk mengadopsi postur perasaan yang baik itu. Pareto digambarkan sebagai residu, dan yang Pareto coba sebutkan dengan sangat rinci. Mirip dengan perlakuan rasionalitas Gerd Gigerenzer²⁴ sebagai konjungsi perhitungan dan lingkungan, berbeda dengan gagasan rasionalitas murni perhitungan standar, Pareto memperlakukan karakter tindakan sebagai tergantung pada lingkungan di mana tindakan terjadi. Di dalam menghormati, Pareto membedakan antara tindakan rasional dan non-rasional. Pareto lebih lanjut membedakan antara lingkungan yang mendukung tindakan logis dan

lingkungan yang memunculkan bentuk non-logis dari tindakan sebagai gantinya. Perbedaan ini sangat penting untuk membedakan antara politik dan political fenomena ekonomi dalam teori ekonomi politik.

Teori tindakan Pareto dan perbedaannya antara lingkungan logis dan non-logis untuk tindakan mengarah ke teori sosial yang menyimpang secara signifikan dari perlakuan standar sosial teori dalam kerangka ekonomi neoklasik dan keseimbangan umum. Neo-klasik alasan kerangka kerja dalam hal keseimbangan sistemik, seperti yang diilustrasikan oleh fungsi halus dan dua kali lipat permukaan yang dapat dibedakan. Sebaliknya, skema pemikiran Pareto mengarah ke arah tektonik di mana ada konflik di mana tindakan logis dan non-logis bertabrakan. Fungsi halus memberi jalan kepada non- geometri integral. Skema teoretis Pareto beroperasi dalam hal perubahan terus-menerus, meskipun dia berbicara keseimbangan ekonomi dan sosial seolah-olah kedua jenis keseimbangan itu terpisah. Tapi ini adalah hanya masalah gaya yang menyerukan konvensi analitis waktu. Teori politiknya menekankan kontestasi terus-menerus di antara tokoh-tokoh politik untuk kekuasaan, menggunakan alat-alat ideologis artikulasi sebagai amunisi dalam proses yang sangat kompetitif ini. Pareto sebagai ahli teori sosial memiliki banyak nilai untuk ditambahkan ke ilmu sosial kontemporer, dengan Wagner dan Patrick dan Wagner berfungsi sebagai petunjuk menuju apa

yang bisa disebut ekonomi politik dan teori sosial Paretian. (Bruni and Guala, 2001)(Candela and Wagner, 2016)

C. Stiglitz

Joseph Stiglitz lahir pada tahun 1943 di Gary, Indiana, kampung halaman Paul Samuelson yang Makalah yang Dikumpulkan Stiglitz akan mengedit. Ia menerima gelar BA dari Amherst College pada tahun 1964 dan gelar Ph.D. dari MIT pada tahun 1967. Pada tahun 1970, Stiglitz menjadi Fulbright Scholar dan Tap Junior Research Fellow di University of Cambridge. Diangkat sebagai Profesor Ekonomi di Universitas Yale pada tahun 1969, ia pindah ke Universitas Princeton pada tahun 1979, di mana ia tetap sampai tahun 1988. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Stanford. Dari 1993–97 ia menjabat di Dewan Penasihat Ekonomi, akhirnya menjadi Ketuanya. Selama tahun 1997–2000 ia menjabat sebagai Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan dan Kepala Ekonom di Bank Dunia. Daftar publikasinya adalah 30 halaman, dalam cetakan font kecil, dan termasuk buku teks pada beberapa tingkatan maupun sektor yang memiliki perbedaan, serta monografi, makalah posisi, dan artikel. Di antara bidang-bidang yang dikutip di mana dia telah memberikan kontribusi adalah teori pertumbuhan dan modal, ekonomi diskriminasi, keuangan publik dan perusahaan, ekonomi informasi dan insentif, keseimbangan kompetitif dengan sumber daya yang habis, dan

persaingan monoglistik dengan keragaman produk. Dan ini sekarang daftar yang sangat tidak lengkap. Stiglitz telah lama dilaporkan memiliki kecenderungan linglung dan eksentrisitas ringan, karakteristik yang terkait dengan kecemerlangan akademis tetapi dianggap tidak berjalan dengan baik ke arena pembuatan kebijakan publik.

Seperti banyak ekonom akademis yang menjadi pembuat kebijakan, Stiglitz terus-menerus menghadapi konflik antara cita-cita teori ekonomi dan kompromi ekonomi politik praktis, masalah yang ia diskusikan dalam kuliah terkemuka untuk Society of Government Economist. Penjatahan Pasar Kredit Keynesian Baru Stiglitz menunjukkan bahwa gagasan penjatahan kredit pertama kali dicatat oleh Adam Smith. Tetapi sejak zaman Smith, para ekonom telah gagal memberikan penjelasan yang jelas mengapa hal itu terjadi membawa diskusi dalam kerangka informasi asimetris yang telah berkembang saat ini, dengan bank menjadi prinsipal yang kurang informasi berurusan dengan agen peminjam yang lebih terinformasi mengenai risiko mereka sendiri. Dalam lingkungan seperti itu, dua keseimbangan tingkat bunga dapat muncul dan tingkat bunga dapat berfungsi sebagai alat penyaringan. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, peminjam yang baik akan diusir, seperti yang diamati Adam Smith dan seperti halnya orang dengan mobil bekas yang bagus tidak dapat menjualnya dengan harga yang pantas di pasar

lemon. Kredit secara sewenang-wenang dibatasi oleh bank, menyiratkan saluran yang berbeda untuk kebijakan moneter untuk bekerja daripada di model Keynesian Lama atau Monetarist.

Salah satu hasil khusus dari model ini adalah bahwa fluktuasi kredit yang berubah-ubah secara sewenang-wenang dapat muncul, dengan implikasi yang jelas bagi stabilitas (dalam) makroekonomi. Ini juga menunjukkan pelanggaran teori keuangan standar, yang dikembangkan oleh Miller & Modigliani (1958, 1961), karena sekarang ada perbedaan besar antara pembiayaan utang dan ekuitas karena perilaku ini oleh bank. Greenwald & Stiglitz (1987, 1988); Stiglitz & Weiss (1992), dan Stiglitz (1992, 1999a) menguraikan implikasi dari argumen ini untuk stabilitas makroekonomi. Makalah ini menggabungkan hasil pasar tenaga kerja Keynesian Baru yang dibahas di atas dengan model penjatahan kredit. Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Global Baik Akerlof dan Stiglitz menunjukkan minat yang besar dalam masalah pembangunan ekonomi cukup awal dalam karir merek) bisa dibilang salah satu tempat pertama di mana ia mendalilkan versi model upah efisiensi. Argumen tersebut diperluas dan diterapkan untuk membandingkan bagi hasil dan pembayaran upah tetap dalam pertanian pedesaan di negara-negara kurang berkembang, dengan tuan tanah sekarang di posisi prinsipal dan petani di posisi agen Memang, makalah

ini berasal dari periode yang sama ketika Stiglitz & Weiss (1982) mengembangkan argumen penjatahan kredit mereka, dan kemudian akan dicatat bahwa pembatasan kredit oleh tuan tanah dalam situasi ini mirip dengan yang dilakukan oleh bank dalam ekonomi yang maju secara finansial. (Hoff dkk., 1993). Tidak mengherankan, setelah Stiglitz menjadi Kepala Ekonom Bank Dunia selama periode meletusnya krisis keuangan internasional, perhatiannya beralih ke masalah stabilitas keuangan global. Dia membawa analisisnya tentang informasi asimetris di pasar kredit dan keuangan dari negara-negara kurang berkembang ke tingkat global, dengan alasan kerapuhan dan volatilitas yang ekstrem karena masalah di sektor keuangan negara-negara ini. Stiglitz menerapkan analisis ini ke Asia Timur setelah krisis 1997 dalam apa yang kemudian menjadi kritik publiknya terhadap kebijakan Konsensus Washington seperti yang diwujudkan dalam IMF dan Lawrence Summers (Stiglitz, 1999b, 2000b; Furman & Stiglitz, 1998). Baginya, kebijakan penghematan moneter dan fiskal yang direkomendasikan IMF hanya memperburuk masalah mendasar.

Tapi apakah itu Keynesian? Meskipun Spence sebagian besar bekerja di bidang ekonomi mikro dan menghindari pertempuran atas label dan identitas yang telah mengganggu ekonomi makro, baik Akerlof dan Stiglitz dengan sepenuh hati terjun ke dalam perdebatan ekonomi

makro. Mereka berdua telah bergaya sendiri dan pendukung kuat dari ekonomi makro Keynesian Baru, mendasarkannya pada model informasi asimetris yang dibahas di atas. Mereka berpendapat bahwa sementara Keynes (1936) salah dalam berbagai hal (tentang sifat pasar obligasi, tentang penyebab bertahannya pengangguran, tentang saluran kebijakan moneter, dan berbagai item lainnya) beberapa pandangan pentingnya telah pada dasarnya benar—bahwa dapat terjadi pengangguran paksa yang persisten, bahwa fluktuasi permintaan agregat dapat memicu fluktuasi dalam pengangguran tersebut, bahwa tabungan dapat terputus dari investasi. Akerlof dan Stiglitz berpendapat bahwa mereka telah memberikan kunci untuk membalikkan gelombang makroekonomi Klasik Baru berdasarkan ekspektasi rasional; informasi asimetris menyiratkan hasil dan pendekatan kebijakan yang sangat berbeda bahkan ketika ekspektasi rasional berlaku. Tidak ada keraguan bahwa argumen ini benar dan bahwa mereka telah memainkan peran utama dalam menghidupkan kembali kehormatan Keynes dalam profesi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka memiliki kata akhir. Model mereka, terutama model pasar tenaga kerja mereka, masih mengandalkan gagasan bahwa pengangguran pada dasarnya muncul dari upah yang dalam arti tertentu 'terlalu tinggi'. Banyak dari pendekatan mereka telah berusaha untuk menjelaskan berbagai

kekakuan yang dalam kerangka neo-Keynesian menyebabkan pengangguran paksa yang terus-menerus. Tetapi Klasik Baru dapat menanggapi ini bahwa ini bukanlah keseimbangan sejati, bahwa para pekerja masih memilih untuk menganggur ketika mereka membiarkan diri mereka masuk ke dalam pengaturan kontrak di mana upah 'terlalu tinggi' dalam arti tertentu, bahkan jika mereka 'secara efisien' jadi. Post Keynesian, seperti Davidson (1994), berpendapat bahwa Keynes (1936) sendiri tidak bergantung pada kekakuan upah dan harga untuk argumennya mengenai pengangguran paksa yang persisten, meskipun orang dapat menemukan diskusi tentang kekakuan upah yang turun di Teori Umum, sesuatu yang bahkan diterima oleh banyak Klasik Baru adalah fakta bergaya sebagian besar pasar tenaga kerja. Keynes melihat masalah itu melekat pada sifat uang dan kegagalan roh-roh hewani yang dapat menyebabkan keruntuhan investasi dan output yang mendalam. Postingan Penekanan Walrasian pada nonlinier dan self-fulfilling sunspot equilibria dan multiple equilibria dengan kegagalan koordinasi relevan di sini (Woodford, 1990). Namun, tampaknya Akerlof setidaknya menjadi lebih terbuka terhadap gagasan tentang peran roh hewani di pasar keuangan, mengingat komentarnya yang lebih baru tentang karya Shiller. Akhirnya, ada arena analisis dinamis yang lebih luas yang melibatkan model pembelajaran yang mendapat perhatian dari ahli ekonomi makro

Keynesian dari berbagai garis serta banyak ekonom Klasik Baru (Brock & Hommes, 1998; Sargent, 1993, 1998). Model informasi asimetris yang lebih tua dari Akerlof, Spence, dan Stiglitz memiliki tingkat kepastian tertentu tentang mereka, dengan probabilitas yang diketahui untuk dapat mengamati hasil. Ini adalah elemen yang menyelamatkan keragaman informasi ekonomi dari paradoks mengerikan dari kemunduran tak terbatas dan mencoba untuk menghemat tentang cara menghemat. (Rosser, 2003)

D. Amartya Sen

Sen lahir di desa Santiniketan, sebuah kota kecil di luar Kalkuta, di Benggala Barat, India pada tanggal 3 November 1933. Ia diberi nama "Amartya", yang berarti "orang yang pantas mendapatkan keabadian", oleh penyair Bengali dan peraih Nobel Rabindranath Tagore . Sen lahir dalam keluarga akademisi. Kakek dari pihak ibu, K.M. Sen, adalah seorang filsuf terkemuka yang mengajar filsafat agama dan Hindu di Universitas Viswa Bharati di Shantiniketan (Basu, 1998). Ayahnya sekarang menjadi profesor kimia Universitas Dhaka di Bangladesh. Terlepas dari silsilah akademis mereka, Sens tidak mampu secara finansial. Sen menggambarkan keluarganya sebagai kelas menengah ke bawah. Dia juga mencatat bahwa itu "berkomitmen" ketika datang ke masalah sosial.

Kejutan seputar pilihan Sen hampir sama diucapkan dengan kritik. Selama beberapa dekade, Hadiah Nobel di bidang Ekonomi terutama diberikan kepada para ekonom Chicago. Ekonom politik, terutama yang condong ke kiri tengah, telah diabaikan secara mencolok. Piero Sraffa, Joan Robinson, Nicholas Kaldor, John Kenneth Galbraith semuanya ditolak penghargaan Nobel dalam hidup mereka. Dan baik Barbara Bergmann maupun Luigi Pasinetti (hanya dua kelalaian yang mencolok) belum menerima Hadiah Nobel. Dengan keterkejutan dan keterkejutan itu muncul perasaan harapan. Dengan memilih Sen, Akademi Swedia membuat pernyataan berani tentang bagaimana ekonomi dapat dibuka dan dibuat lebih relevan. Sen telah memperluas gagasan ekonom mengenai "kesejahteraan" manusia, dan tak sekedar mencakup konsumsi tambahan, namun juga mengembangkan kemampuan manusia. Sen juga telah mempelajari mengenai cara dalam menentukan kebijakan pembangunan yang kadang-kadang berdampak buruk terhadap perempuan dan ia menyatakan bahwasannya para ekonom yang belajar mengenai ekonomi pembangunan butuh lebih fokus pada pengembangan peluang bagi orang-orang dan kurang pada memaksimalkan produksi barang dan jasa. Dan Sen telah menghabiskan karirnya mempelajari masalah dunia nyata yang penting seperti kelaparan, kemiskinan dan diskriminasi.

Tema utama dalam karya Sen yaitu peran pentingnya dalam mengembangkan kemampuan manusia. Sen mengatakan bahwasanya ekonomi harus berisi tentang bagaimana mengembangkan potensi orang dengan meningkatkan pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini agak kontras dengan masalah ekonomi tradisional, seperti mencoba memproduksi lebih banyak barang dengan lebih efisien, dan dengan demikian memaksimalkan utilitas. Untuk alasan ini, Sen berpendapat dengan kritis sekali mengenai ekonomi kesejahteraan tradisional, ia mengatakan bahwasanya pertukaran bebas dalam memaksimalkan kesejahteraan individu secara rasional. Ekonomi kesejahteraan tradisional dimulai dengan asumsi rasionalitas. Inti dari asumsi rasionalitas adalah keyakinan bahwa individu adalah pemaksimal utilitas rasional. Semua orang dianggap berperilaku dengan cara yang sangat rasional dan sangat logis. Mereka berusaha mencari tahu konsekuensi dari setiap tindakan yang mungkin mereka ambil dan manfaat yang dapat mereka harapkan untuk diterima sebagai hasil dari setiap tindakan yang berbeda. Analisis ekonomi tradisional kemudian berargumen bahwa membiarkan orang bertindak bebas, dan menukar barang sesuka hati, mengarah pada hasil Pareto Optimal – situasi yang mana tak terdapat seseorang yang dapat menjadi lebih baik dengan tak hanya membuat orang lain menjadi lebih buruk lagi.

Karena tradisi panjang pada ilmu ekonomi dan filsafat menyatakan bahwa perbandingan utilitas antarpribadi tidak dapat dibuat, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa hasil ekonomi Pareto Optimal adalah yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita tidak dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan mendistribusikan kembali barang yang berasal dari satu orang menuju orang lain, sebab kita tidak dapat mengukur "util" dan kemudian membandingkan utilitas dari kedua individu tersebut. Setiap redistribusi mungkin mengambil sesuatu dari seseorang yang sangat menghargainya dan memberikannya kepada orang lain yang mendapatkan sedikit manfaat tambahan darinya. Karena tidak mungkin mengukur utilitas individu, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa redistribusi apa pun benar-benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini berpendapat bahwa yang dapat kita ketahui hanyalah membiarkan orang dengan bebas menukar barang kapan pun itu melayani kepentingan mereka sendiri akan memaksimalkan kesejahteraan individu; memang, fakta bahwa beberapa perdagangan terjadi membuktikan bahwa pertukaran meningkatkan kesejahteraan kedua pedagang individu.

Sen telah mengkritik pendekatan ini untuk memahami kesejahteraan manusia dengan beberapa alasan. Pertama, ia

berpendapat bahwa maksimalisasi utilitas memberikan gambaran yang buruk tentang bagaimana orang benar-benar berperilaku. Untuk mengambil satu contoh saja, individu harus berharap untuk tidak menerima keuntungan dari pemungutan suara dalam pemilihan politik. Peluang bahwa suara saya akan menentukan hasil pemilihan sangat kecil. Faktanya, kemungkinan saya tersambar petir saat menunggu di antrean untuk memilih lebih besar daripada kemungkinan bahwa suara saya akan menentukan pemilihan. Meskipun demikian, saya secara teratur memilih; dan begitu juga sejumlah besar orang lain.

Sen (1970b, hlm. 195) berpendapat bahwa pendekatan maksimalisasi utilitas mengabaikan alasan sebenarnya orang pergi ke tempat pemungutan suara dan memilih. Orang memilih karena Sen telah menarik keluar beberapa implikasi kebijakan penting yang mengikuti dari mengadopsi pandangan yang lebih luas dari perilaku manusia. Orang-orang bekerja paling keras dalam pekerjaan mereka bukan ketika penghargaan dan hukuman finansial adalah yang terbesar, tetapi ketika mereka memiliki rasa komitmen dan keyakinan bahwa beberapa tujuan penting sedang dikejar. Lebih jauh lagi, Sen mengklaim bahwa orang tidak bekerja karena mereka melakukan beberapa perhitungan ekonomi dan menemukan nilai barang yang dapat dibeli dengan gaji mereka lebih dari nilai waktu luang mereka yang hilang. Orang menghadapi fleksibilitas

terbatas dalam jumlah jam per minggu mereka dapat bekerja. Lebih jauh lagi, pekerjaan menghasilkan banyak manfaat selain barang dan jasa ekonomi; itu memberikan kontak sosial, keterampilan dan kesejahteraan psikologis atau harga diri. Karena alasan inilah para penganggur mengalami masalah kesehatan yang lebih besar, tingkat bunuh diri dan kematian yang lebih tinggi, dan penderitaan psikologis yang hebat. Karena alasan inilah pengangguran melemahkan hubungan keluarga dan berkontribusi pada tingkat perceraian yang lebih tinggi.

Kritik kedua terhadap analisis kesejahteraan tradisional menyangkut konsekuensi yang akan mengikuti dari mematuhi perintah maksimalisasi utilitas rasional. Sen berpendapat bahwa jika orang benar-benar berperilaku sesuai dengan asumsi rasionalitas, mereka akan menjadi bahan tertawaan, karena bertindak egois dapat menyebabkan beberapa hasil yang agak tidak masuk akal. Dilema Tahanan memberikan satu contoh absurditas ini. Meskipun Sen telah mengkritik asumsi paling dasar dari ekonomi neoklasik, dia lebih dari sekedar kritikus. Dia telah berusaha untuk membangun teori ekonomi yang lebih baik berdasarkan serangkaian asumsi yang lebih realistis dan masuk akal. Bagi Sen, hubungan sosial itu penting, potensi manusia itu penting, dan hal-hal memiliki nilai yang tidak bisa dibeli dan dijual di pasar. Ini semua hilang dalam ekonomi kesejahteraan tradisional, yang dimulai dengan manusia

ekonomi rasional dan berakhir dengan membenarkan hasil pertukaran bebas karena tidak dapat membandingkan utilitas individu dan mengklaim tidak suka membuat penilaian nilai apa pun.

Dari pendekatan yang lebih luas ini muncul ekonomi yang lebih luas dan lebih manusiawi. Ini adalah ekonomi kembali ke Adam Smith dan ekonomi politik klasik. Ilmu ekonomi kembali berusaha untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dunia nyata yang penting. Ekonomi kembali peduli dengan masalah etika. Demikian pula, peran ekonom profesional berubah menjadi lebih baik. Bukan lagi teknokrat sempit atau orang bodoh yang tidak kompeten secara sosial, begitu ekonom mengadopsi perspektif kapabilitas, mereka kembali menjadi filsuf duniawi. (Steven, 1967)

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN

EKONOMI

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses penelusuran bentuk dan strategi ideal untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat. Nilai-nilai dasar dari konsep pembangunan yaitu: 1) pembangunan berisi makna proses, artinya suatu pembangunan harus melalui tahapan-tahapan dalam mencapai suatu tujuan; 2). pembangunan berisi makna perubahan ke arah yang lebih baik, artinya suatu kegiatan pembangunan harus menghasilkan penambahan nilai dan peningkatan manfaat; 3). Ada objek, metode, dan subyek pada pembangunan, artinya terdapat cara untuk melakukannya, terdapat pelaku pembangunan sebagai subyek, serta terdapat sasaran yang menjadi objek pembangunan.

Pembangunan pada awalnya diartikan sebagai suatu pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu adanya pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pertanda keberhasilan suatu pembangunan dalam sebuah negara. Melakukan pengukuran tingkat produktivitas adalah suatu cara untuk melakukan penilaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Produk Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto adalah indikator yang mengukur nilai produktivitas suatu negara. Produk Domestik Bruto

dipahami sebagai nilai total produk yang terdiri dari barang maupun jasa yang merupakan hasil dari berbagai unit produksi dalam batas-batas wilayah suatu negara atau domestik dalam satu tahun. Adapun Produk Nasional Bruto didefinisikan sebagai nilai produk berupa barang maupun jasa, yang termasuk hasil kegiatan masyarakat suatu negara (warga negara) selama setahun.

Pembangunan selalu dapat memberi harapan agar memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan, dengan demikian dapat disejajarkan dengan kehidupan masyarakat pada negara maju pada waktu yang akan datang.

Rumus Pertumbuhan Ekonomi:

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t = pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)

PDB_t = produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan)

PDB_{t-1} = PDB satu periode sebelumnya

Diperlukan beberapa syarat dalam upaya melaksanakan pembangunan. Yang menjadi persyaratan utama adalah pemerintah dan rakyat, artinya keduanya harus melakukan kerjasama yang baik, dengan senantiasa memegang prinsip bahwa pembangunan sebagai usaha dari rakyat untuk rakyat. Pada khakekatnya penduduk adalah aset dalam pembangunan, yang merupakan *agent of development*, sehingga berhasil tidaknya pembangunan sangat tergantung pada sikap penduduk dalam

proses pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut diawali ketika timbul krisis ekonomi di tahun 1997, yang telah menyebabkan Indonesia menjadi terbebani oleh utang luar negeri yang selalu bertambah setiap tahunnya, demi untuk tetap menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia.

Sampai saat ini pembangunan ekonomi Indonesia masih terus dibiayai oleh utang dari luar negeri. Program-program pemerintah Indonesia saat ini hanya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga, yang bersumber dari pinjaman luar negeri, misalnya: beberapa program pembangunan yang meliputi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Program pembangunan kesehatan yaitu bagian yang integral pada pembangunan nasional yang mempunyai tujuan agar dapat melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang baik. Namun demikian tujuan tersebut belum bisa tercapai. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah adanya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih belum merata secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asuransi kesehatan yang tersedia sekarang ini yang merupakan program pemerintah melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan

terhadap adanya ketidakmampuan masyarakat pada tingginya pembiayaan pelayanan kesehatan yang ada di negara kita.

Adanya reformasi kebijakan terhadap pembangunan kesehatan sudah selesai dilakukan seperti yang telah tertuang dalam visi, misi, serta strategi dan juga paradigma baru dalam kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat yang saat ini populer dengan istilah Indonesia Sehat. Adanya Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) juga memberikan target baru bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Reformasi tersebut telah memberikan banyak perubahan khususnya pada pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan melalui program JKN yang selama ini menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, diharapkan melalui program ini dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang terbaik, yang merupakan tujuan utama pembangunan kesehatan nasional.

B. Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan kedamaian pada kehidupan masyarakat, terjadinya ketimpangan ekonomi yang semakin lama menjadi semakin melebar dari suatu kelompok masyarakat minoritas yang dapat menimbulkan terjadinya gejolak sosial yang luar biasa, sehingga jika sedini mungkin dilakukakan usaha untuk mengatasi persoalan pemerataan ekonomi

secara cepat untuk segera direalisasikan. Berdasarkan pada konstitusi, pemerintah sudah sangat jelas mempunyai peranan yang sangat besar, khususnya dalam mengatur kegiatan perekonomian, misalnya: seperti terdapat pada UUD 1945 yang terletak di Pasal 33. Pemerataan ekonomi adalah termasuk salah satu cara yang dapat memberikan rasa keadilan serta ketenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi antar wilayah dapat dikurangi secepat mungkin, dengan demikian kesejahteraan masyarakat suatu negara bisa dicapai serta ditingkatkan. Telah terbukti adanya gejolak sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya menjadi penyebab munculnya ketimpangan ekonomi.

Bourguignon dalam Sari (2011) mengatakan bahwasannya “ketimpangan ditandai oleh munculnya disparitas atau perbedaan pendapatan yang biasa terdapat pada penduduk”. Bentuk suatu pembangunan yang ideal yaitu pembangunan yang selalu disertai dengan adanya usaha pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Namun demikian kenyataan yang terjadi adalah munculnya berbagai macam ketimpangan. Yang menjadi penyebabnya adalah adanya faktor dana yang sangat terbatas serta kemampuan manajemen yang tidak baik. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengatur skala prioritas

dalam mengelola pembangunan sehingga dapat menjadi adil dan merata, serta tidak adanya unsur kepentingan politik dalam mengambil keputusan, dengan demikian tidak lagi muncul masalah terhadap adanya kesenjangan pembangunan pada tiap-tiap daerah. Yang perlu diketahui bahwa separuh dari aspek perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa, terutama di di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, serta Tangerang. Oleh karena adanya kenyataan itu, akan mengingatkan bahwa tugas dan tanggungjawab pemerintah agar dapat mewujudkan pemerataan ekonomi pada semua wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang tentunya masih memerlukan perhatian serta kerja keras tanpa henti. Pemerataan ekonomi mempunyai peranan penting untuk memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan perekonomian di seluruh wilayah tanah air sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan adil dan merata.

Adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi seharusnya selalu disertai oleh adanya pemerataan ekonomi pada semua wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah seharusnya selalu memberikan perhatian terhadap semua wilayah yang terdapat pada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Hal itu disebabkan karena banyaknya daerah yang sebenarnya mempunyai sumber daya

yang berkualitas dan baik, akan tetapi tak ditopang oleh sarana prasarana yang baik dan lengkap berupa infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat dipercaya untuk mampu memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat di suatu wilayah seperti pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi sangat tergantung terhadap pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian pemerintah harus mampu mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena pemerataan ekonomi merupakan faktor yang cukup penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan yang sudah berlangsung lama antar daerah dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Terutama jika ketimpangan tersebut dihubungkan dengan unsur primordial tertentu atau dengan potensi kekayaan alam yang sesungguhnya dimiliki suatu daerah. Pemerintah harus memberikan perhatian secara khusus terhadap daerah yang terbelakang dan memiliki kesulitan ekonomi yang spesifik.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berbeda pada setiap daerah dan biasanya didominasi oleh beberapa daerah saja seperti di Cina, Pantai Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi negara Cina.

Kalau seperti di Thailand, pertumbuhan ekonominya berpusat di kota Bangkok. Adapun di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai hampir 60 persen, sedangkan Jakarta dan sekitarnya nilainya sekitar 30 persen. Kondisi tersebut menjadi bukti terjadinya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mulai serius menangani masalah ini setelah memasuki tahun 2000-an, karena adanya ketersediaan data yang lebih baik. Pemerataan antardaerah bukan berarti mengarahkan seluruh daerah untuk memiliki tingkat pendapatan yang sama. Pemerataan memiliki makna bahwasannya tiap-tiap komponen yang sesuai dalam perekonomian itu mempunyai potensi guna memberikan pekerjaan pada semua sumber daya ekonomi yang dipunyainya, sehingga diharapkan bahwa proses pembangunan ekonomi dapat menciptakan konvergensi pendapatan di antara provinsi-provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disparitas atau ketimpangan ekonomi antar wilayah atau daerah adalah sesuatu yang biasa muncul dalam setiap aktifitas ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya ketidaksamaan ketersediaan sumber daya alam serta keadaan demografi pada tiap daerah. Oleh karena itu pembangunan tiap daerah menjadi tidak sama, sehingga biasa kita kenal ada yang namanya daerah tertinggal dan daerah yang

berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki disparitas ekonomi karena ketidaksamaan sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah. Hal tersebut diperburuk oleh adanya ketidaksamaan tingkat pengetahuan yang merupakan salah satu yang faktor menentukan kemampuan tiap daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Terjadinya disparitas terhadap pembagian pendapatan antar daerah akan menyebabkan disparitas dalam pembangunan. Disparitas pendapatan antar daerah yang ada bisa dipantau dari adanya ketidaksamaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita provinsi. Tahun 2019 data pada Provinsi DKI Jakarta adalah daerah yang memiliki PDRB perkapita yang tertinggi. Sedangkan Provinsi NTT menjadi daerah yang memiliki PDRB perkapita terendah sehingga yang menjadi bukti adanya perbedaan atau disparitas antar daerah pada semua wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

EKONOMI DAN FAKTOR PENDIDIKAN

A. Ekonomi dan Pendidikan

a. Sektor Ekonomi

Permasalahan perkembangan ekonomi bisa dipandang selaku permasalahan makroekonomi periode panjang. Dari satu rentang waktu ke rentang waktu selanjutnya keahlian sesuatu negeri untuk menciptakan benda serta pelayanan bakal meningkat. Keahlian yang bertambah ini diakibatkan sebab faktor- faktor pembuatan akan senantiasa alami pertambahan dalam jumlah serta kualitasnya. Perkembangan ekonomi juga sebagai suatu cara kenaikan output dari masa ke masa jadi penunjuk berguna buat mengukur kesuksesan pembangunan sesuatu negara.

b. Sektor Pendidikan

Kata pendidikan sebagai bahasa bersumber dari tutur "ilmu keguruan" ialah "paid" yang memiliki makna anak, serta "agogos" yang memiliki makna mengarahkan, dan membimbing, dengan demikian ilmu keguruan merupakan suatu ilmu mengarahkan anak. Sebaliknya dengan cara sebutan arti pendidikan yakni sesuatu cara perubahan tindakan serta prilaku seorang ataupun golongan dalam upaya memantapkan orang ataupun anggota didik lewat upaya pengajaran serta pelatihan.

Arti pendidikan dengan cara sederhana bisa dimaksud selaku upaya manusia membentuk keperibadian seseorang dengan mengikuti nilai-nilai masyarakat dan budaya. Sehingga, tidak kira betapa mudahnya peradaban suatu warga, ia terjalin ataupun berjalan sesuatu cara pendidikan. Sebab seperti itu kerap diklaim pembelajaran sudah terdapat selama peradaban penganut manusia. Pembelajaran pada hakikatnya ialah upaya orang dalam melakukan kelestarian akan hidupnya.

Pendidikan dalam bahasa Yunani yaitu "pedagogik" ialah suatu ilmu yang membimbing anak, lalu pembelajaran dalam bahasa Romawi yaitu "educare", ialah suatu hal yang menghasilkan serta membimbing, aksi mewujudkan kemampuan anak untuk dilahirkan di dunia. Selain itu dalam bahasa Jerman pendidikan disebut "Erziehung" yang sebanding pada "educare", ialah mengaktifkan atau membangkitkan daya kemampuan anak. Pendidikan dalam bahasa Jawa memiliki makna "panggulawentah" (pengerjaan), mengerjakan, mengganti, spiritual, mematangkan perasaan, pikiran serta karakter, mengganti keperibadian si anak.

Dari beberapa pengertian maupun definisi pendidikan yang sudah dipaparkan oleh pakar di atas, adalah beirkut ini:

1. Prof. Dr. John Dewey

Pendidikan ialah sebuah cara dalam berpengalaman. Kerana hidup adalah pembangunan, maka belajar adalah untuk membantu perkembangan rohani manusia, tanpa mengenal usia. Cara perkembangan merupakan cara adaptasi pada tiap tahap serta peningkatan kemahiran dalam kemajuan seseorang melalui pendidikan.

2. M.J. Langeveld

Pendidikan ialah usaha untuk mengarahkan orang yang masih di bawah umur menuju pada kematangan. Pembelajaran merupakan sesuatu upaya dalam membantu anak buat melaksanakan beberapa tugas hidup, supaya berdikari secara moral dan bertanggungjawab. Pembelajaran pula dimaksud selaku upaya buat menggapai determinasi diri serta tanggung jawab.

3. Ki Hajar Dewantara

Baginya pendidikan merupakan sesuatu ketentuan umbuh kembang kehidupan seorang anak. Maksudnya yakni kalau pendidikan membimbing semua kekuatan alam yang melekat pada anggota didik supaya selaku khalayak serta bagian masyarakat bisa menggapai kesejahteraan serta kesenangan hidup yang maksimal.

4. Stella van Petten Henderson

Pendidikan ialah sesuatu kombinasai atau gabungan dari kemajuan insani atau perkembangan melalui warisan masyarakat sosial.

5. Ahmad D. Marimba

Mengemukakan kalau pendidikan yakni sesuatu cara edukasi yang dilaksanakan dengan cara sadar oleh pengajar kepada sesuatu cara kemajuan raga serta rohani anggota didik, dan tujuannya adalah untuk menjadikan karakter siswa sangat unggul. Karakter yang diartikan tersebut berarti layak ialah individu yang tak cuma terampil, cerdas secara akademis saja, hendak namun bagus pula dengan cara kepribadian

6. Carter V. Good

Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses pengembangan keterampilan individu berupa perilaku maupun sikap disesuaikan pada ketentuan pada masyarakat. Dimana pada proses ini individu mendapat pengaruh dari lingkungan yang terpimpin, terutama di lingkungan sekolah, yang memungkinkan dia untuk memperoleh keterampilan sosial dan mengembangkan kepribadiannya.

7. Plato

Pendidikan merupakan suatu hal yang bisa memberikan bantuan dalam mengembangkan akal dan jasmani seseorang melalui sesuatu yang bisa membawa seseorang menuju kesempurnaan.

8. Edgar Dale

Pendidikan merupakan sebuah upaya sadar yang dilaksanakan dari pemerintah, masyarakat, ataupun keluarga berupa pelatihan, pembelajaran, pengajaran, dan bimbingan sepanjang hayat, baik di dalam maupun di luar sekolah untuk memungkinkan siswa berfungsi di lingkungan masa depan mereka.

9. Prof. Zaharai Indris, M.A.

Pendidikan merupakan sekumpulan kegiatan komunikasi yang dirancang untuk mempertemukan pendidik atau orang dewasa dengan siswa secara langsung atau memakai media untuk membantu perkembangan anak secara keseluruhan.

10. Ibnu Sina

Pendidikan ataupun pembelajaran berhubungan erat pada semua aspek yang terdapat dalam diri manusia, baik itu moral, mental atau fisik. Pendidikan dilarang mengabaikan terhadap perkembangan fisik dan segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan fisik, misalnya: tidur, kebersihan, makanan, minuman, dan olahraga.

Dengan demikian pendidikan tak sekedar mengedepankan aspek moral saja, akan tetapi juga untuk membentuk seseorang yang utuh, meliputi: jiwa, budi pekerti dan pikiran.

11. Jhon Dewey, 2003: 69

“Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan beberapa kecakapan dasar, baik secara emosional maupun intelektual bagi sesama manusia dan alam”.

B. Peran Ekonomi dalam Pendidikan

Masalah pendidikan tak bisa dipisahkan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi pendidikan pada ekonomi dan pembangunan wajib diakui. Oleh karena itu, pendidikan tak selalu dilihat sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah waktunya pendidikan dipandang sebagai investasi, yang kontribusi jangka panjangnya bisa dirasakan. Konsep pendidikan sebagai investasi atau *education as investment* sudah mengalami perkembangan secara pesat dan semakin diakui oleh negara-negara sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep investasi sumber daya manusia atau *human capital investment* yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, sesungguhnya hal tersebut berasal dari penekanan pentingnya investasi keterampilan

manusia oleh para ahli teori klasik sebelum abad ke-19, misalnya: Heinrich von Touran (1875) dan Adam Smith (1776).

Kontribusi signifikan pendidikan pada pembangunan ekonomi sudah menjadi kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, dan keberadaannya telah diakui. Pendidikan tidak selalu dilihat sebagai pembiayaan atau konsumsi, sebab pendidikan adalah investasi pada pengembangan sumber daya manusia dan kontribusinya dirasakan dalam jangka panjang. Secara umum bisa dikatakan bahwasannya faktor utama yang mendorong proses pembangunan yaitu jenjang pendidikan pada masyarakat. Proses itu didasarkan pada pertimbangan bahwasannya cara yang paling efektif untuk mencapai pembangunan nasional sebuah negara ada di pemberdayaan rakyatnya, termasuk pendidikan. Implikasi pendidikan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi menurut Gatot Subroto (2014: 396) berasal dari kesadaran bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin cepat pula masyarakat merespon proses perubahan sosial dan ekonomi yang biasa mengalami perkembangan secara dinamis. Sehingga, pendidikan masyarakat merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

Peran ekonomi pada dunia pendidikan tak begitu penting, namun cukup menentukan. Karena dibandingkan dengan ekonomi, ada faktor lain yang menentukan hidup, mati dan kemajuan lembaga pendidikan,

yakni keterampilan, keahlian, dan dedikasi manajemen para pendidiknya. Itulah kunci sukses sebuah sekolah atau universitas. Maksudnya, jika administrator dan guru atau dosen cukup berdedikasi, dan ahli di bidangnya, serta mempunyai keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya, maka lembaga pendidikan kemungkinan besar akan berhasil memenuhi misinya bahkan dalam keadaan ekonomi yang buruk. Peran ekonomi pada dunia pendidikan yaitu untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, bukan modal yang dikembangkan.

Timbulnya anggapan sosial bahwasannya pendidikan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ekonomi individu, tidaklah keyakinan spontan saja, dan juga tak memiliki dasar. Tidak seperti tren sosial di Indonesia, seperti pada dekade pertama pemerintahan Orde Baru, sebagian besar pekerjaan memerlukan pekerja dengan pendidikan formal. Mereka yang memiliki pendidikan formal bisa melakukan spesialisasi dalam bidang pekerjaan. Keadaan ini tak terlepas dari kebutuhan pemerintah akan tenaga terdidik untuk menerapkan keterampilan dan skillnya guna melakukan modernisasi dan industrialisasi pembangunan negara.

C. Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi

Masalah pendidikan tak bisa dipisahkan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi pendidikan pada ekonomi dan pembangunan wajib diakui. Oleh karena itu, pendidikan tak

selalu dilihat sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah waktunya pendidikan dipandang sebagai investasi, yang kontribusi jangka panjangnya bisa dirasakan. Konsep pendidikan sebagai investasi atau *education as investment* sudah mengalami perkembangan secara pesat dan semakin diakui oleh negara-negara sebagai prasyarat utama bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep investasi sumber daya manusia atau *human capital investment* yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, sesungguhnya hal tersebut berasal dari penekanan pentingnya investasi keterampilan manusia oleh para ahli teori klasik sebelum abad ke-19, misalnya: Heinrich von Touran (1875) dan Adam Smith (1776).

Kontribusi signifikan pendidikan pada pembangunan ekonomi sudah menjadi kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, dan keberadaannya telah diakui. Pendidikan tidak selalu dilihat sebagai pembiayaan atau konsumsi, sebab pendidikan adalah investasi pada pengembangan sumber daya manusia dan kontribusinya dirasakan dalam jangka panjang. Secara umum bisa dikatakan bahwasannya faktor utama yang mendorong proses pembangunan yaitu jenjang pendidikan pada masyarakat. Proses itu didasarkan pada pertimbangan bahwasannya cara yang paling efektif untuk mencapai pembangunan nasional sebuah negara ada di pemberdayaan rakyatnya, termasuk pendidikan. Implikasi

pendidikan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi menurut Gatot Subroto (2014: 396) berasal dari kesadaran bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin cepat pula masyarakat merespon proses perubahan sosial dan ekonomi yang biasa mengalami perkembangan secara dinamis. Sehingga, pendidikan masyarakat merupakan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

Peran ekonomi pada dunia pendidikan tak begitu penting, namun cukup menentukan. Karena dibandingkan dengan ekonomi, ada faktor lain yang menentukan hidup, mati dan kemajuan lembaga pendidikan, yakni keterampilan, keahlian, dan dedikasi manajemen para pendidiknya. Itulah yang disebut dengan kunci sukses sebuah sekolah atau universitas. Maksudnya, jika administrator dan guru atau dosen cukup berdedikasi, dan ahli di bidangnya, serta mempunyai keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya, maka lembaga pendidikan kemungkinan besar akan berhasil memenuhi misinya bahkan dalam keadaan ekonomi yang buruk. Peran ekonomi pada dunia pendidikan yaitu untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, bukan modal yang dikembangkan.

Timbulnya anggapan sosial bahwasannya pendidikan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ekonomi individu, tidaklah keyakinan spontan saja, dan juga tak memiliki dasar. Tidak seperti tren sosial di

Indonesia, seperti pada dekade pertama pemerintahan Orde Baru, sebagian besar pekerjaan memerlukan pekerja dengan pendidikan formal. Mereka yang memiliki pendidikan formal bisa melakukan spesialisasi dalam bidang pekerjaan. Keadaan ini tak terlepas dari kebutuhan pemerintah akan tenaga terdidik untuk menerapkan keterampilan dan skillnya guna melakukan modernisasi dan industrialisasi pembangunan negara.

D. Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Kesehatan

Peran ekonomi pada dunia pendidikan tak begitu penting, namun cukup menentukan. Karena dibandingkan dengan ekonomi, ada faktor lain yang menentukan hidup, mati dan kemajuan lembaga pendidikan, yakni keterampilan, keahlian, dan dedikasi manajemen para pendidiknya. Itulah yang disebut dengan kunci sukses sebuah sekolah atau universitas. Peran ekonomi pada dunia pendidikan yaitu untuk mendukung kelancaran proses pendidikan, bukan modal yang dikembangkan. Di sini, peran ekonomi di sekolah juga termasuk bagian dari sumber daya pendidikan, yang memungkinkan anak mengembangkan keterampilan psikomotorik, afektif, dan kognitifnya supaya bisa menjadi pekerja yang terampil, mempunyai etos kerja dan hidup hemat, serta bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain menunjang proses pendidikan ekonomi,

pendidikan juga memiliki fungsi sebagai pokok bahasan masalah ekonomi dalam kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, peran ekonomi pada bidang pendidikan memiliki keterbatasan terhadap beberapa hal berikut ini:

- a. Mencukupi kebutuhan alat peraga, media, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya yang tak bisa diselesaikan sendiri.
- b. Mendanai seluruh peralatan gedung, misalnya listrik, telepon, dan air. Mendanai layanan untuk semua kegiatan pendidikan.
- c. Melakukan pengembangan individu melalui perilaku ekonomi, misalnya belajar hidup hemat.
- d. Mencukupi kebutuhan dasar beberapa tenaga pendidik.
- e. Menambah peningkatan motivasi kerja.
- f. Menambah peningkatan semangat pendidik.

BAB VII

EKONOMI KEPENDUDUKAN

A. Konsep Dasar Kependudukan

a. Pengertian Demografi

Achille Guillard (1885) pada bukunya "*Components de Statistique Humanie, ou Segment Comparee*" atau "*Components of Human Measurements or Comparatives Demography*". Demografi dicirikan sebagai sebuah ilmu yang berfokus terhadap pola pikir dan keadaan manusia yang bisa diprediksi, dengan mempertimbangkan perubahan umum, kemajuan aktual, keadaan moral dan ilmiah. Sebagian dari definisi meliputi:

1. Hauser dan Duncan, 1959, mencirikan demografi sebagai penyelidikan jumlah, apropriasi, sintesis populasi dan perkembangan dan penyebab yang muncul dari kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), pemindahan (relokasi) dan pergeseran sosial (keseimbangan sosial).
2. Mayer, 1962, mengungkapkan tiga tugas utama yang diidentikkan dengan demografi yang meliputi: menetapkan persebaran, kualitas, dan jumlah penduduk suatu daerah; menetapkan perubahan persebaran, sifat, dan

jumlah pada jangka panjang; dan melakukan identifikasi beberapa unsur dari prinsip sebuah perubahan.

3. Bogue, 1969, mencirikannya sebagai ilmu yang berkonsentrasi pada populasi secara terukur dan numerik, sintesis dan penyebaran spasial populasi dan perubahan dalam sudut pandang ini setelah beberapa waktu, melalui lima bagian, untuk lebih spesifik meliputi: (1) portabilitas sosial, (2) perpindahan, (3) perkawinan, (4) kematian, (5) kematangan atau kelahiran.
4. Hawthorn, 1970, demografi adalah penyelidikan tentang sifat dan hubungan tingkat kelahiran, tingkat relokasi dan tingkat kematian sebagai dampak dari ketiga perubahan ini pada pengaturan dan pembangunan penduduk.
5. Sedangkan referensi Kata Segmen Multilingual (IUSSP, 1982), mencirikannya sebagai ilmu yang berkonsentrasi pada jumlah penduduk dalam suatu ruang sejauh jumlah, struktur (sintesis) dan perbaikan (perubahan). Dari berbagai definisi di atas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang proses dan struktur kependudukan di suatu daerah tertentu. Struktur penduduk yang meliputi: komposisi, persebaran, dan jumlah penduduk. Struktur penduduk selalu berubah, dan perubahan itu diakibatkan oleh

proses kependudukan, seperti perpindahan, kematian, dan kelahiran penduduk.

Sejak filsuf Cina, Ibn Khaldun dari Arab, Aristoteles Yunani, serta Plato, masalah kependudukan telah menjadi perhatian beberapa cendekiawan tersebut. Namun hanya pada abad ke-17, pengusaha asal London, yang bernama John Graunt melaksanakan studi empiris dengan menganalisis data kelahiran dan kematian dari *bills of mortality* atau catatan kematian yang terbit tiap minggu. Lalu Graunt melakukan perumusan hukum mengenai pertumbuhan penduduk melalui bukunya "*Natural and Political Observations, Made Upon the Bills of Mortality*", yang terbit pada tahun 1662. Dari teori inilah, ia dianggap sebagai bapak demografi.

Di abad ke-18, Malthus, yang merupakan "*the real father of modern population study*" dalam karyanya "*Essay on the Principle of Population*" mengemukakan proposisi dasar tentang manusia dan sumber daya di tahun 1798. Kammeyer, 1971 menunjukkan bahwa jika pertumbuhan penduduk tak dicegah, maka hal itu akan tumbuh secara geometris (1, 2, 3, 8, 16, 32), sedangkan kebutuhan hidup hanya tumbuh dalam deret aritmatika (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

b. Sosial Ekonomi Formal Vs Sosial Ekonomi Kependudukan

Bogue (1969) mengakui lebih dari (1) Demografi Formal (Demografi Formal/Demografi Murni), memberikan prosedur yang berbeda untuk mengerjakan angka segmen dan membuat komitmen yang lebih dalam dan luar untuk informasi yang dikumpulkan oleh pengukuran populasi, dengan strategi yang menghubungkan antara - Tidak ada sosial ekonomi (kelahiran, kematian, perpindahan, dll) yang dapat dijadikan evaluasi penduduk untuk masa depan (proyeksi ke depan) dan lebih jauh lagi untuk masa lalu (dalam proyeksi terbalik). Selanjutnya, (2) Sosial Demografi atau studi kependudukan adalah kajian yang berusaha untuk menghubungkan komponen / faktor segmen dengan faktor non-segmen atau pada akhirnya untuk memahami kualitas jumlah penduduk dalam suatu ruang, bahkan non-segmen, faktor (seperti masalah legislatif, ekonomi, sosial, sosial, negara ketat dan alami dari populasi) dipertimbangkan. Misalnya, tingkat kesuburan pada sebuah tempat tak sekedar dikendalikan oleh jumlah perempuan pedesaan, namun juga oleh gaya hidup masyarakat setempat (laki-laki muda) dengan memperhatikan cita-cita kesuburan secara keseluruhan, dan selanjutnya wanita.

c. Pengertian Ekonomi Kependudukan

Masalah ekonomi kependudukan adalah penyelidikan tentang bagaimana pengaruh ekonomi terhadap unsur-unsur penduduk dan

pengaruh penduduk terhadap perekonomian. Dimana pada tingkat dasar, masalah keuangan rakyat menganalisis situasi penduduk dalam peristiwa pergantian moneter. Dalam situasi yang unik ini, masyarakat dapat ditempatkan sebagai pelaku (output produksi) dalam siklus kemajuan dan sebagai konsumen atau penikmat dari beberapa hasil atau output pembangunan. Sebagai input produksi, penduduk merupakan penyedia tenaga kerja pada proses pembangunan ekonomi, perubahan variabel (angka migrasi, angka kematian, angka fertilitas) akan memberikan pengaruh pada perubahan distribusi, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap ekonomi. Pada situasi khusus tersebut, bisa dikatakan bahwasannya analisis ekonomi ketenagakerjaan sebenarnya merupakan bagian dari ekonomi kependudukan itu sendiri.

B. Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Perubahan populasi dan elemen-elemen yang terkait dengannya mempengaruhi pendekatan pemerintah secara keseluruhan. Ditinjau dari sejarah kependudukan, ada dua perspektif tentang perubahan kependudukan ini, di mana kondisi ini menunjukkan kependudukan sebagai variabel yang otonom. Peningkatan mempengaruhi elemen penduduk, menyiratkan bahwa kapasitas penduduk sebagai variabel yang bergantung. Kondisi penduduk akan mempengaruhi perbaikan. Beberapa

hipotesis penduduk dan perkembangannya menunjukkan hubungan antara perkembangan penduduk dan perubahan keuangan, yang menunjukkan pentingnya memahami asumsi kependudukan, terkhusus yang berkaitan dengan pertumbuhan.

a. Teori Pre Malthusian

Dalam hipotesis ini hanya ada satu perspektif tentang populasi, lebih spesifik bahwa perkalian dipandang sebagai upaya untuk menggantikan populasi yang mati. Bagaimanapun juga, dalam penerapannya terdapat perbedaan kontras, baik sebab perbedaan antar waktu ataupun antar tempat yang dipelopori oleh Konfusius 500 SM (seorang sarjana Cina), yang mengatakan bahwasannya pembangunan penduduk bisa mengurangi nilai hasil kerja, tingkat kehidupan individu, serta menyebabkan perdebatan. Mereka juga berpendapat bahwasannya adalah kewajiban otoritas publik untuk menjaga proporsi tanah yang ideal. Jadi pilihan untuk melakukan ini adalah melakukan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang lebih sedikit penduduknya. Pada tahun 300 SM, Plato adalah cendekiawan tercepat yang mengajukan prinsip bahwasannya kualitas manusia lebih penting daripada kuantitas, Plato menekankan bahwa kesehatan penduduk (mengenai rasio manusia terhadap tanah) merupakan elemen penting dalam pencapaian kesempurnaan manusia.

b. Teori Malthus

Malthus dengan cepat memberikan gambaran yang teratur tentang hubungan antara keadaan dan hasil akhir dari pembangunan penduduk. Malthus menyatakan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk di suatu negara cenderung berkembang sesuai dengan deret ukur yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pola tersebut membuat populasi menjadi berlipat ganda di tiap 30-40 tahun. Sementara peningkatan hasil berkurang dari sejumlah faktor penciptaan yang layak (tanah dan aset normal lainnya), persediaan makanan hanya akan meningkat seperti yang ditunjukkan oleh deret hitung yaitu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malthus menjelaskan bahwa ketika pembangunan pangan tak bisa mengikuti perkembangan penduduk yang pesat, upah per kapita juga berkurang. Pengurangan upah per kapita tersebut sepenuhnya rendah, sampai pada titik di atas tingkat kemampuan atau kebutuhan langsung. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk.

Malthus mengungkapkan bahwasannya seperti halnya tumbuhan maupun makhluk hidup, manusia juga akan cukup sering memperbanyak populasinya. Sehingga dengan asumsi pembangunan penduduk tidak terkendali, jumlah individu akan berlipat ganda tanpa henti. Malthus berpendapat bahwa upaya untuk menghambat laju perkembangan penduduk harus dimungkinkan dalam dua cara berikut ini:

1. Positif cek adalah segala sesuatu yang menambah pembusukan keberadaan manusia, yang berdampak pada pengurangan populasi (kemiskinan, infeksi, perang, kelaparan).
2. Preventif cek menggabungkan semua cara potensial untuk mengendalikan kelahiran (sabar, kontrasepsi, dan terminasi dini)

Malthus mengungkapkan bahwa strategi untuk mencegah kelahiran adalah melalui pembatasan moral, melalui penundaan pernikahan, sampai ketika individu merasa bahwasannya keluarga yang dibentuknya tak jatuh ke dalam kemiskinan, yang berimbas terhadap kepuasan pribadi lokal. Selain itu, mencegah kelahiran melalui cara yang tak tepat (sterilisasi, pengeluaran janin, kontrasepsi, atau prostitusi) akan membuang energi dengan cara yang tak ekonomis.

Hasil utama dari pembangunan penduduk adalah kebutuhan.

Tergantung pada:

1. Orang memiliki kecenderungan karakteristik untuk memiliki anak
2. Pembangunan bahan makanan tidak bisa dikoordinasikan dengan pembangunan penduduk

Malthus menerima bahwa dorongan untuk mereplikasi adalah variabel yang mendahului persyaratan untuk bekerja. Yang dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa kelebihan penduduk (seperti yang

diperkirakan oleh tingkat pengangguran) akan mendorong kompensasi ke tempat di mana penduduk tidak dapat menikah dan memulai sebuah keluarga. Pada saat upah rendah, akan terjadi kelebihan pekerjaan, sehingga peternak dapat memanfaatkan lebih banyak pekerjaan, sehingga lahan yang dikembangkan dapat lebih luas, yang dengan demikian akan meningkatkan penciptaan hortikultura dan bekerja atas bantuan pemerintah perorangan. Malthus percaya bahwa pola perluasan penciptaan pedesaan (bahan pokok) ini akan memberdayakan pembangunan kembali, pembangunan penduduk pada tingkat yang lebih cepat daripada pengembangan bahan makanan, dan perluasan lebih lanjut dalam kemelaratan. Kritik terhadap Teori Malthus. Hipotesis Malthus mendapatkan kritikan oleh karena:

1. Kritik terhadap model kependudukan.

Model kependudukan yang menunjukkan keterkaitan diantara pembangunan kependudukan dan peningkatan ekonomi bergantung terhadap berbagai dugaan dan anggapan dasar yang tak bisa diuji secara empiris, karena 3 alasan dasar yaitu: yang pertama, model tersebut tidak memperhitungkan sejauh mana kemajuan teknologi dapat membatasi kekuatan-kekuatan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, serta berpengaruh terhadap kemajuan teknologi yang bisa memberikan peningkatan atas ketersediaan lahan dengan meningkatkan

kualitas (ketersediaan) lahan, meskipun jumlah lahan yang tersedia tetap. Kemajuan teknologi yang pesat akan menggeser kurva pertumbuhan pendapatan nasional ke atas, dengan demikian pendapatan per kapita pada tiap tingkat lebih tinggi dari kurva pertumbuhan penduduk. Artinya seluruh Negara bisa lolos dari perangkap kependudukan Malthus. Kedua tentang anggapan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk secara langsung berkaitan dengan tingkat upah per kapita. Dengan asumsi ini, upah per kapita umumnya rendah, dan pertumbuhan penduduk akan mengalami peningkatan seiring dengan upah per kapita. Walaupun kenyataan realitasnya tepat dari beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa korelasi diantara pendapatan per kapita dan pertumbuhan penduduk tak jelas. Kemajuan dalam layanan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pengobatan modern sudah dengan cepat mengurangi angka kematian, terlepas dari pendapatan per kapita, menunjukkan bahwa bukan pendapatan per kapita yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, namun bagaimana pendapatan didistribusikan. Yang ketiga, hipotesis fokus pada variabel yang tak tepat, terutama pendapatan per kapita sebagai determinan pertumbuhan penduduk, pendekatan yang baik adalah menitik beratkan pada standar hidup individu sebagai penentu utama keputusan keluarga untuk menentukan apakah ingin memiliki anak

lebih banyak atau lebih sedikit, tidak hanya fokus pada standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Seperti yang ditunjukkan oleh Malthus, metode utama guna melakukan pencegahan kelahiran adalah yaitu menunda pernikahan, atau disebut sebagai "*moral restraint*". Untuk situasi tersebut, Malthus tak mengharapkan pencegahan kelahiran secara masal, baik dari penerimaan publik atau kemajuan teknologi dalam pencegahan kelahiran.

3. Malthus percaya bahwasannya konsekuensi mendasar dari pertumbuhan penduduk yaitu kemiskinan. Pada keadaan ini, ada kritik mengenai makna kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, Malthus berpendapat bahwasannya pekerja hanya bisa meningkatkan taraf hidupnya melalui penundaan pernikahan hingga ia dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Aliran Sosialis

Dua orang dalam aliran sosialis yang dikenal sangat menentang hipotesis Malthus yaitu Friedrich Engels dan Karl Marx, yang mengatakan bahwasannya tak terdapat norma umum atau *populatin law* tentang keadaan penduduk menurut kondisi sosial ekonomi daerah pada suatu negara, hal ini terlihat pada perbedaan antara fertilitas dan kematian dikendalikan oleh varietas dalam tingkat kehidupan dan perbedaan ini, yang akan hilang jika kekayaan disebarkan secara menyeluruh terhadap

masyarakat, konsep Malthus mengenai pertumbuhan bahan makanan ditentang karena mereka merasa bahwa kemungkinan pertumbuhan bahan pokok mengikuti deret hitung adalah salah selama ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi bisa memberikan peningkatan pada produksi bahan makanan ataupun beberapa produk lain, seperti pertumbuhan penduduk. Konsekuensi dari pertumbuhan penduduk di bawah kapitalisme adalah kemiskinan dan kelebihan penduduk. Namun, dalam mobilitas sosialis, pertumbuhan penduduk tak memiliki efek samping karena pertumbuhan penduduk diserap oleh sistem keuangan. Marx dan Engels mengatakan bahwasanya kemiskinan disebabkan oleh organisasi sosial, terutama masyarakat kapitalis, teori Malthus hanya berlaku untuk masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosialis tidak akan memiliki masalah kependudukan.

d. Teori-Teori Lain di Era Modern

Temuan penelitian dari kelompok MIT atau "*Massachusetts Organization of Innovation*" yakni sebuah perkumpulan dari Roma atau "*Club of Rome*" menyatakan bahwa yang menjadi inti masalah "*The Cutoff points for Development A Report for The Club of Rome's Task on the Issue of Humanity*" yang didistribusikan di tahun 1972, adalah terletak di tingkat dasar bahwasannya Jika tren pembangunan terus dilakukan oleh manusia, maka bumi akan mengalami pertumbuhan

melebihi batas kapasitas, yang akan menyebabkan bencana bagi generasi yang akan datang, yang sejalan dengan asumsi Malthus bahwasannya pertumbuhan penduduk secara deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan secara aritmatika. Yang penting dari kajian ini dipakai lebih terasah ataupun lebih luas, dan dilengkapi dengan informasi maupun model ilmiah yang dinamakan sebagai "model dunia" (Lima tren utama). Keadaan yang sedang dialami dunia pada saat ini adalah: (a) lingkungan yang semakin rusak dan iklim yang tak dapat disangkal; (b) kurangnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui (c) malnutrisi; (d) pertumbuhan penduduk yang sangat cepat; (e) industrialisasi yang semakin cepat; (Knolls, Donella dkk., 1982). Perkembangan penduduk yang tinggi mengakibatkan semakin terbatasnya masa yang dibutuhkan guna sampai pada penduduk yang berlipat ganda (*multiplying time*), ini menunjukkan bahwa jika pertumbuhan penduduk berlangsung cepat maka akan sampai pada pembatasan pertumbuhan di mana dunia akan menghadapi bencana. Batasan pertumbuhan itu adalah berikut ini:

1. Ketersediaan pangan yang makin terbatas

Dengan ketersediaan pangan yang semakin terbatas karena hilangnya lahan pertanian, MIT menemukan dalam penelitiannya bahwasannya hanya ada sekitar 3,2 miliar hektar lahan yang tersedia untuk agribisnis di planet ini, setengahnya (paling produktif dan

teralisasi) dibudidayakan, sebenarnya, sisanya digunakan untuk bercocok tanam, membukanya, menggarapnya dan mengairinya membutuhkan modal yang sangat besar, membuka lahan baru untuk pertanian tidak lagi efektif lagi, dengan demikian produksi pangan per kapita semakin kurang, setiap orang memerlukan sejumlah 0,08-0,172 hektar lahan untuk rumah, jalan, pembuangan limbah, dan kabel, sehingga tidak lagi ada sebagai daerah pertanian untuk produksi pangan, dengan konsekuensi terbatasnya pasokan air keran tahunan. Pada saat yang sama, kebutuhan air juga tumbuh secara eksponensial.

2. Semakin Berkurangnya Unrenewable resources

Pembatasan pertumbuhan penduduk, juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya yang ada, Sampai sekarang persediaan platinum, emas serta seng dan timbal tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, beberapa cadangan mineral diperkirakan akan habis pada tahun 2050, dengan asumsi tingkat pemanfaatan tetap sama seperti saat ini. Stok kromium diperkirakan akan habis selama bertahun-tahun (sejak buku ini ditulis pada 1970-an), stok tembaga diperkirakan cukup untuk 21 atau 48 tahun (dengan asumsi peningkatan 5x), dan situasi saat ini juga diikuti oleh disparitas penggunaan aset tetap ini.

3. Meningkatnya Pencemaran

Pencemaran yang meluas adalah salah satu bagian dari pembatasan pembangunan, hal ini terlihat pada fakta bahwa polutan telah diukur untuk meningkat secara geometris, dan beberapa polutan telah diidentifikasi terkait dengan pertumbuhan penduduk, industri dan teknologi.

Perlu ditemukan titik keseimbangan untuk mengantisipasi keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki oleh bumi, pertimbangan ekonomi dalam memilih pemanfaatan aset-aset ini menjadi hal yang tak terhindarkan, sumber daya yang terbatas di satu sisi, dan besarnya permintaan di sisi lain, penting untuk melakukan analisis ekonomi.

e. Posisi Penduduk dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mendapat pengaruh dari keberadaan sumber daya alam yang paling terbatas, dan selama sumber daya tersebut kurang dimanfaatkan, maka jumlah penduduk dan ketersediaan stok yang ada berperan dalam proses produksi.

Jika produksi terus meningkat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, sumber daya alam akan membatasi produksi, dan komponen sumber daya alam akan menjadi pagu pertumbuhan ekonomi. Selama masa periode pertumbuhan produksi, komponen populasi dianggap pasif. Karena penduduk akan beradaptasi

dengan permintaan tenaga kerja lokal, tingkat upah lebih tinggi dari tingkat upah minimum, terutama tingkat upah minimum untuk hidup seseorang. Jika tingkat upah lebih tinggi dari tingkat upah minimum, individu akan menikah pada usia yang lebih muda, dan kematian anak akan berkurang, akan menurun, jumlah kelahiran akan meningkat, sehingga jumlah kelahiran akan meningkat, jumlah penduduk akan meningkat. Dapat juga dilihat bahwa jika tingkat upah lebih rendah dari upah median atau rata-rata, maka jumlah penduduk akan berkurang. Dalam hal ini, peningkatan kematian anak dan pernikahan akan tertunda. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita berperan penting sebagai pengontrol pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, Dengan asumsi bahwa permintaan tenaga kerja pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan penawaran, dapat dilihat bahwa tingkat upah akan meningkat. Kemudian jika pertumbuhan permintaan lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat upah akan turun, jika tingkat upah lebih rendah dari upah rata-rata minimum, maka tingkat pertumbuhan penduduk akan menjadi negatif, pada tingkat upah rata-rata, penduduk akan cukup stabil, proses pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung selamanya. Akhirnya setiap ekonomi muncul dari posisi statis.

Dalam keadaan ini, modal maupun output saat ini tak akan bertumbuh permintaan tenaga kerja tak akan bertumbuh, serta tingkat upah akan dipaksa turun hingga ke tingkat upah minimum, Sekarang populasi berhenti bertumbuh, Kuantitas individu mati setara dengan kuantitas individu yang dilahirkan. Investasi hanya dibuat untuk menggantikan modal yang rusak, semua ini timbul disebabkan perekonomian telah menggapai kemajuan tinggi yang dapat ditunjang oleh sumber alam yang tersedia.

f. Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dari beberapa negara yang berkembang, ini semua dapat disaksikan melalui arahan yang kuat dari pemerintahan pada beberapa negara itu guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan relative belum maksimal, Fakta menjelaskan pembangunan berwawasan kependudukan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi tetapi terdapat jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut akan lebih berkelanjutan, Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa memperbesar gap pendapatan (disparitas gaji), liberalisasi dan industrialisasi yang sangat pesat bisa mengalami peningkatan

produktivitas dan efisiensi, namun juga bisa menambah peningkatan setengah maupun jumlah pengangguran.

Pembangunan yang berorientasi pada kependudukan memiliki dua implikasi, yaitu:

1. Pembangunan yang berorientasi pada kependudukan merupakan pembangunan yang menyesuaikan dengan potensi dan keadaan penduduk saat ini. Populasi wajib menjadi isu penting pada siklus kemajuan. Penduduk menjadi objek dan subjek pembangunan. Pembangunan dilakukan untuk dan oleh individu.
2. Pembangunan yang berorientasi pada kependudukan merupakan pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan sumber daya manusia daripada pembangunan infrastruktur (Tjiptoherijanto, 2005).

Kependudukan adalah masalah yang sangat penting pada struktur pembangunan sebuah negara:

1. Penduduk merupakan subjek dan objek dari semua program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian pembangunan baru dikatakan berhasil apabila pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang berarti bahwa baik

- kualitas material maupun immaterial melekat pada populasi itu sendiri.
2. Kondisi penduduk saat ini sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, bila ditambah dengan kualitas yang memadai, akan menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi. Lagi pula, dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kualitas yang rendah, penduduk hanya menjadi beban pembangunan.
 3. Pengaruh perubahan dinamika penduduk yang baru bersifat jangka panjang, sehingga peran kependudukan dalam pembangunan seringkali terabaikan.

g. Keterkaitan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan derajat kesehatan masyarakat, karena peningkatan kesehatan masyarakat akan menambah peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi input bagi pertumbuhan ekonomi, hubungan antara status derajat kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh Cesario et al (1980). Program gizi akan memperbaiki status gizi masyarakat yang berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat yang menyebabkan peningkatan produktivitas masyarakat yang merupakan

input pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, butuh juga dicatat bahwasannya penurunan angka kematian akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, yang akan berdampak negatif pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto, dan bahwa peningkatan gizi dan kekuatan tenaga kerja juga akan meningkatkan produktivitas dengan memperluas produktivitas individu. Kapasitas individual ini adalah peningkatan fisik, perubahan mental, energi dan perilaku. Di sisi lain, dampak peningkatan kesejahteraan atau gizi juga memberikan pengaruh terhadap Produk Domestik Bruto melalui beberapa perubahan yang muncul di sekolah, yang meliputi: perluasan partisipasi, kerjasama instruktif dan pelaksanaan di beberapa yayasan pendidikan. Perluasan investasi dalam pengajaran ini akan memperluas dukungan tenaga kerja, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kemudian hari. Hubungan antara derajat kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tak hanya satu arah. Peningkatan produk domestik bruto akan berdampak pada penurunan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan status gizi.

Hal ini memperlihatkan bahwasannya terdapat keterkaitan yang proporsional diantara peningkatan Derajat Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Dari satu sudut pandang, semakin berkembangnya status Derajat Kesehatan akan meningkatkan

pembangunan finansial. Sehingga peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan semakin menambah peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB VIII

EKONOMI LINGKUNGAN

Ekonomi lingkungan adalah bagian dari ekonomi yang berfokus pada alokasi sumber daya lingkungan yang efisien. Lingkungan memberikan nilai langsung dan bahan mentah untuk kegiatan ekonomi, dengan demikian menjadikan lingkungan dan ekonomi saling ketergantungan. Oleh karena itu, cara pengelolaan ekonomi berdampak pada lingkungan yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja perekonomian. Dalam buku pertamanya, *Ekonomi Stabil*, Daly menyarankan bahwa "cukup adalah yang terbaik," dengan alasan bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada degradasi lingkungan dan ketidaksetaraan dalam kekayaan. Dia menegaskan bahwa ekonomi adalah bagian dari lingkungan kita, yang terbatas. Oleh karena itu, gagasannya tentang ekonomi kondisi mapan adalah ekonomi di mana terdapat tingkat populasi dan aktivitas ekonomi optimal yang mengarah pada keberlanjutan. Daly menyerukan peningkatan kualitatif dalam kehidupan masyarakat – pembangunan – tanpa pertumbuhan terus-menerus. Saat ini, banyak dari ide-idenya dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pada akhir 1970-an, ekonom akhir late Julian Simon mulai melawan argumen yang menentang pertumbuhan ekonomi diterbitkan pada tahun 1981 dan diperbarui pada tahun 1996 sebagai Sumber Daya Utama , di mana dia menyimpulkan tidak ada alasan mengapa kesejahteraan tidak terus meningkat dan bahwa peningkatan populasi berkontribusi pada peningkatan itu dalam jangka panjang. Teorinya adalah bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan memberi tekanan pada pasokan sumber daya; ini meningkatkan harga, yang memberikan peluang dan insentif untuk inovasi; akhirnya inovasi tersebut begitu sukses sehingga harga berakhir di bawah harga sebelum terjadi kekurangan sumber daya. Dalam pandangan Simon, faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi adalah kapasitas manusia untuk menciptakan ide-ide baru dan berkontribusi pada basis pengetahuan. Dengan demikian, semakin banyak orang yang bisa dilatih untuk membantu memecahkan masalah yang timbul, semakin cepat hambatan dihilangkan, dan semakin besar kondisi ekonomi bagi generasi sekarang dan mendatang.

Ekonomi lingkungan mempertimbangkan isu-isu seperti konservasi dan penilaian sumber daya alam, pengendalian polusi, pengelolaan limbah dan daur ulang, dan penciptaan standar emisi yang efisien. Ekonomi adalah alat penting untuk membuat keputusan tentang penggunaan, konservasi, dan perlindungan sumber daya alam karena memberikan informasi. tentang pilihan yang dibuat orang, biaya dan manfaat dari berbagai tindakan yang

diusulkan, dan kemungkinan hasil dari kebijakan lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, salah satu tugas pembuat kebijakan adalah memahami bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan secara paling efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menimbang berbagai biaya alternatif untuk keuntungan potensial mereka. Ekonomi adalah untuk mengidentifikasi alat-alat tertentu atau alternatif kebijakan yang akan menggerakkan pasar menuju alokasi sumber daya alam yang paling efisien.

A. Sumber yang Direkomendasikan

Di pasar yang kompetitif, terdapat informasi tentang seberapa banyak konsumen menilai barang tertentu karena kita tahu berapa banyak mereka bersedia membayar. Ketika sumber daya alam terlibat dalam produksi barang tertentu, mungkin ada faktor lain – masalah kelangkaan, timbulnya polusi – yang tidak termasuk dalam biaya produksinya. Dalam hal ini, masalah kelangkaan atau polusi menjadieksternalitas, biaya yang berada di luar harga pasar produk. Jika biaya penuh ini dimasukkan, biaya barang mungkin lebih tinggi daripada nilai yang diberikan oleh konsumen.

Ada tiga aliran pemikiran umum yang terkait dengan pengurangan atau penghapusan eksternalitas lingkungan. Para ekonom kesejahteraan percaya bahwa adanya eksternalitas adalah pembenaran yang cukup untuk intervensi pemerintah, biasanya melibatkan pajak dan sering

disebut sebagai Pajak babi setelah ekonom Arthur Pigou (1877-1959) yang mengembangkan konsep eksternalitas ekonomi. Ekonom pasar cenderung menganjurkan penggunaan insentif untuk mengurangi eksternalitas lingkungan, daripada pendekatan perintah dan kontrol, karena insentif memungkinkan fleksibilitas dalam menanggapi masalah daripada memaksakan pendekatan tunggal pada semua individu. Ekonom pasar bebas fokus pada menghilangkan hambatan yang mencegah pasar berfungsi secara bebas, yang mereka yakini akan mengarah pada tingkat perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang optimal. Tujuan utama dari lingkungan ekonomi adalah untuk mengidentifikasi alat-alat tertentu atau alternatif kebijakan yang akan menggerakkan pasar menuju alokasi sumber daya alam yang paling efisien.

B. Hukum Pengembalian yang Berkurang

"Hukum hasil yang semakin berkurang" merupakan salah satu prinsip yang sangat terkenal pada luar bidang ekonomi. Ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1767 oleh ekonom Prancis Turgot dalam kaitannya dengan produksi pertanian, tetapi paling sering dikaitkan dengan Thomas Malthus dan David Ricardo. Mereka percaya bahwa populasi manusia pada akhirnya akan melampaui produksi makanan karena tanah merupakan faktor integral dalam persediaan yang terbatas. Untuk meningkatkan produksi untuk memberi makan penduduk, petani

harus menggunakan lahan yang kurang subur dan/atau meningkatkan intensitas produksi pada lahan yang sedang berproduksi. Dalam kedua kasus, akan ada hasil yang semakin berkurang. Hukum pengembalian yang semakin berkurang – yang terkait dengan konsep pengembalian marjinal atau manfaat marjinal – menyatakan bahwa jika satu faktor produksi meningkat sementara yang lain tetap, manfaat marjinal akan menurun dan, setelah titik tertentu, produksi keseluruhan juga akan menurun. Meskipun pada awalnya mungkin ada peningkatan produksi karena semakin banyak faktor variabel yang digunakan, pada akhirnya akan mengalami penurunan hasil karena semakin banyak faktor variabel yang diterapkan pada tingkat faktor tetap yang sama, meningkatkan biaya untuk mendapatkan keluaran yang sama.

Konsep hasil yang semakin berkurang sama pentingnya bagi individu dan masyarakat seperti halnya untuk bisnis karena dapat memiliki efek luas pada berbagai hal, termasuk lingkungan. Prinsip ini – meskipun awalnya dianggap hanya berlaku untuk pertanian – sekarang diterima secara luas sebagai hukum ekonomi yang mendasari semua upaya produktif, termasuk penggunaan sumber daya dan pembersihan polusi.

"Hukum hasil yang semakin berkurang" merupakan salah satu prinsip yang sangat terkenal pada luar bidang ekonomi. Ini pertama kali

dikembangkan pada tahun 1767 oleh ekonom Prancis Turgot dalam kaitannya dengan produksi pertanian, tetapi paling sering dikaitkan dengan Thomas Malthus dan David Ricardo. Mereka percaya bahwa populasi manusia pada akhirnya akan melampaui produksi makanan karena tanah merupakan faktor integral dalam persediaan yang terbatas. Untuk meningkatkan produksi untuk memberi makan penduduk, petani harus menggunakan lahan yang kurang subur dan/atau meningkatkan intensitas produksi pada lahan yang sedang berproduksi. Dalam kedua kasus, akan ada hasil yang semakin berkurang.

Teori ini secara efektif diterapkan oleh Garrett Hardin dalam artikelnya tahun 1968 tentang tragedi milik bersama di mana ia melihat banyak sumber daya milik bersama, seperti udara, air, dan hutan, dan menggambarkan penggunaannya sebagai subjek untuk hasil yang semakin berkurang. Dalam kasus inilah individu-individu yang bertindak demi kepentingan mereka sendiri dapat “menggunakan” sumber daya secara berlebihan karena mereka tidak mempertimbangkan dampaknya pada skala sosial yang lebih besar. Itu juga dapat diperluas untuk mencakup batasan pada sumber daya kita bersama. Layanan yang dapat disediakan oleh sumber daya alam tetap – misalnya, dalam bertindak sebagai sistem penyaringan alami – akan mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kontaminan dan polutan di lingkungan. Eksternalitas

seperti inilah yang dapat menyebabkan menipisnya sumber daya kita dan/atau menciptakan masalah lingkungan lainnya. Seringkali, ada upaya untuk menemukan solusi “gambaran lebih besar” yang berfokus pada apa yang dilihat banyak orang sebagai penyebab utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan kelangkaan sumber daya. Mengurangi pertumbuhan penduduk, bersama dengan peningkatan inovasi teknologi, dapat memperlambat pertumbuhan penggunaan sumber daya dan mungkin mengimbangi dampak dari hasil yang semakin berkurang. Manfaat potensial ini adalah alasan utama mengapa pertumbuhan penduduk dan inovasi teknologi paling sering digunakan dalam menganalisis kemungkinan pembangunan berkelanjutan.

C. Daya Dukung

Perubahan populasi dapat memiliki berbagai implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial. Salah satu masalah kependudukan adalah kapasitas muatan – jumlah individu yang dapat didukung ekosistem tanpa menimbulkan efek negatif. Ini juga mencakup batas sumber daya dan tingkat polusi yang dapat dipertahankan tanpa mengalami tingkat perubahan yang tinggi. Jika daya dukung terlampaui, organisme hidup harus beradaptasi dengan tingkat konsumsi baru atau mencari sumber daya alternatif. Daya dukung dapat dipengaruhi oleh ukuran populasi manusia, konsumsi sumber daya, dan tingkat polusi dan degradasi

lingkungan yang diakibatkannya. Daya dukung, bagaimanapun, tidak perlu diperbaiki dan dapat diperluas melalui manajemen yang baik dan pengembangan teknologi hemat sumber daya baru.

Hubungan antara daya dukung dan pertumbuhan penduduk telah lama menjadi kontroversi. Salah satu argumen asli muncul pada tahun 1798 oleh ekonom Inggris Thomas Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan akan menyebabkan konsumsi sumber daya yang berlebihan. Malthus lebih lanjut berpendapat bahwa populasi cenderung tumbuh padatingkat eksponensial sementara persediaan makanan akan meningkat pada tingkat aritmatika, tidak mengikuti pertumbuhan penduduk yang eksponensial. Malthus percaya bahwa populasi yang terus meningkat akan terus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan, sebagai akibatnya, umat manusia akan ditakdirkan untuk selamanya hidup dalam kemiskinan.

Lebih dari satu abad kemudian, ekonom Amerika Julian Simon membantah argumen Malthus, menyatakan bahwa peningkatan populasi akan memperbaiki lingkungan daripada menurunkannya. Dia percaya kecerdasan manusia sebagai sumber daya alam terbarukan yang paling berharga yang akan terus mencari solusi inovatif untuk setiap masalah yang mungkin muncul – lingkungan, ekonomi, atau lainnya. Simon juga

salah satu pendiri founder lingkungan pasar bebas, menemukan bahwa pasar bebas, bersama dengan hak milik yang sesuai, adalah alat terbaik untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Standar hidup di suatu wilayah dapat membantu mengubah daya dukung suatu wilayah. Daerah dengan standar hidup yang lebih tinggi cenderung mempunyai daya dukung yang lebih rendah daripada daerah dengan standar hidup yang lebih rendah karena akses dan permintaan akan sumber daya yang lebih banyak. Namun demikian, lingkungan Kurva Kuznets – sebuah fenomena yang diamati – menunjukkan bahwa di luar titik tertentu, peningkatan pendapatan dan perbaikan lingkungan sering berjalan beriringan. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk telah stabil dan, pada kenyataannya, menurun di banyak negara maju, konsumsi sumber daya dan polusi dan limbah terus meningkat. Efek ini pada ekosistem disebut "jejak ekologi," yang dapat digunakan guna melakukan pengukuran dan pengelolaan pemakaian sumber daya pada semua perekonomian. Hal ini juga banyak digunakan sebagai indikator kelestarian lingkungan.

Daya dukung seringkali menjadi dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan sekarang dengan sumber daya yang diperlukan pada masa mendatang. Itu KTT Dunia 1995 tentang Pembangunan Sosial mendefinisikan keberlanjutan

sebagai “kerangka kerja guna menggapai mutu hidup yang lebih tinggi bagi seluruh orang di mana perlindungan lingkungan, pembangunan sosial, dan pembangunan ekonomi, merupakan komponen yang saling bergantung dan saling menguntungkan”. Itu KTT Dunia 2002 melanjutkan proses dengan mengidentifikasi tiga tujuan utama pembangunan berkelanjutan: melakukan pemberantasan kemiskinan, melakukan perlindungan sumber daya alam, dan melakukan perubahan pola konsumsi maupun produksi yang tak berkelanjutan.

Sementara nilai pasti dari daya dukung manusia tidak pasti dan terus menjadi perdebatan, ada bukti ketegangan yang terjadi baik kelebihan penduduk maupun konsumsi berlebihan pada beberapa masyarakat dan lingkungan. Ekonom, ekologi, dan analis kebijakan terus mempelajari pola konsumsi global untuk menentukan apa daya dukung manusia dan langkah apa yang dapat diambil untuk memastikannya tidak terlampaui. Sementara itu, tindakan untuk mengurangi ketegangan dan memastikan pemulihan sumber daya alam untuk masa depan akan bergantung pada peningkatan kebijakan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

D. Pembangunan Berkelanjutan

Selama beberapa dekade terakhir, banyak definisi tentang pembangunan berkelanjutan telah diusulkan dan diperdebatkan,

menghasilkan konsep yang menjadi luas dan agak kabur. Menyadari perlunya pemahaman yang lebih jelas tentang pembangunan berkelanjutan, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa menugaskan sebuah studi tentang masalah tersebut dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Komisi Brundtland. Laporan yang dihasilkan, "*Our Common Future*" (1987), memaknai pembangunan yang berkelanjutan sebagai "pembangunan yang menyediakan keperluan sekarang ini dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang guna mencukupi keperluan diri mereka," yang telah menjadi definisi standar yang diterima. Laporan tersebut juga mengidentifikasi tiga komponen pembangunan berkelanjutan: pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan sosial, dan menyarankan bahwa ketiganya dapat dicapai dengan secara bertahap mengubah cara kita mengembangkan dan menggunakan teknologi.

Meskipun pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang diterima sangat luas oleh beberapa lembaga pemerintah ataupun yang bukan lembaga pemerintah, kekhawatiran tentang apa artinya dalam praktiknya sering diangkat. Salah satu hal yang diperdebatkan adalah tentang peran pembangunan ekonomi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Beberapa berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi

adalah cara terbaik untuk membantu negara berkembang melestarikan sumber daya alam mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa setiap pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan karena kita sudah mengkonsumsi terlalu banyak.

Bagi banyak negara, kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada masalah lingkungan. Secara historis, masyarakat umum tidak mau menempatkan prioritas tinggi dalam melindungi lingkungan ketika ada kekhawatiran tentang pencapaian tingkat kesejahteraan atau tujuan ekonomi tertentu. Misalnya, ketika ekonomi sedang berjalan baik di Amerika Serikat pada akhir 1980-an, ada peningkatan kesadaran tentang lingkungan. Namun, ketika kondisi ekonomi mulai menurun pada awal 1990-an, orang menjadi lebih peduli tentang kesejahteraan mereka sendiri dan kurang peduli dengan lingkungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk mendamaikan pandangan-pandangan ini melalui penyelenggaraan pertemuan pertama KTT Bumi pada daerah Rio de Janeiro di tahun 1992. Di sinilah komunitas internasional pertama kali menyepakati strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan pembangunan dan lingkungan melalui kemitraan global. KTT Bumi kedua, yang diadakan di Johannesburg pada tahun 2002, merupakan upaya PBB untuk meninjau kemajuan harapan yang

muncul di Rio dan untuk menegaskan kembali komitmen para pemimpin dunia untuk terus mengejar tindakan menuju pembangunan berkelanjutan. Itu Laporan KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan menguraikan tantangan, dan komitmen, masyarakat internasional dalam mencapai tujuan-tujuan ini. Para pemimpin KTT juga mengembangkan rencana implementasi, yang mencakup cara-cara untuk melakukan pengentasan kemiskinan, melakukan perubahan pola konsumsi yang tak berkesinambungan, serta menjaga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Karena pembangunan berkelanjutan melampaui masalah ekonomi, menghubungkan ekonomi, lingkungan, serta masyarakat, tidak ada teori ekonomi komprehensif yang terkait dengan keberlanjutan pembangunan ada. Namun, kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan sering diukur dengan berbagai indikator, yang dapat digunakan di tingkat lokal, regional, nasional atau internasional. Komponen utama adalah kinerja ekonomi, keadilan sosial, ukuran lingkungan, dan kapasitas kelembagaan.

Bagi banyak negara, kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada masalah lingkungan. Secara historis, masyarakat umum tidak mau menempatkan prioritas tinggi dalam melindungi lingkungan ketika ada kekhawatiran tentang pencapaian tingkat kesejahteraan atau tujuan ekonomi tertentu.

Misalnya, ketika ekonomi sedang berjalan baik di Amerika Serikat pada akhir 1980-an, ada peningkatan kesadaran tentang lingkungan. Namun, ketika kondisi ekonomi mulai menurun pada awal 1990-an, orang menjadi lebih peduli tentang kesejahteraan mereka sendiri dan kurang peduli dengan lingkungan.

Studi ekonomi selalu menekankan kelangkaan relatif sumber daya, apakah itu alam, modal, atau manusia, sehingga menempatkan kendala pada apa yang dapat kita miliki dan mempengaruhi pilihan dan keputusan yang dibuat oleh individu atau masyarakat. Pembangunan berkelanjutan mencakup pandangan bahwa lingkungan yang sehat sangat penting untuk mendukung ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai sekarang dan masa depan sumber daya kita untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa penurunan lingkungan.

E. Penilaian Ekosistem

Penilaian dapat menjadi alat yang berguna yang membantu dalam mengevaluasi berbagai opsi yang mungkin dihadapi oleh pengelola sumber daya alam. Karena sumber daya dan jasa ekologis kita sangat beragam dalam komposisinya, seringkali sulit untuk memeriksanya pada tingkat yang sama. Namun, setelah mereka diberi nilai, sumber daya atau layanan lingkungan kemudian dapat dibandingkan dengan item lain

dengan nilai masing-masing. Penilaian ekosistem adalah proses dimana pembuat kebijakan menetapkan nilai – moneter atau lainnya – untuk sumber daya lingkungan atau output dan/atau layanan yang disediakan oleh sumber daya tersebut. Misalnya, hutan pegunungan dapat menyediakan lingkungan banjir di hilir. jasa oleh mencegah

Sumber daya lingkungan dan/atau layanan adalah sangat sulit untuk diukur karena manfaat tidak berwujud dan beberapa pilihan nilai. Hampir tidak mungkin untuk melampirkan nilai tertentu ke beberapa pengalaman yang kita miliki di alam, seperti melihat matahari terbenam yang indah. Masalah juga muncul ketika sumber daya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pohon – kayu dinilai berbeda jika digunakan untuk pengendalian banjir dibandingkan jika digunakan untuk membangun rumah. Kuantitas sumber daya juga harus dipertimbangkan karena nilainya dapat berubah tergantung seberapa banyak sumber daya yang tersedia. Contoh dari hal ini mungkin dalam mencegah "unit" polusi pertama jika kita memiliki lingkungan udara yang murni. Mencegah polusi unit pertama tidak dihargai sangat tinggi karena lingkungan dapat dengan mudah pulih. Namun, jika polusi berlanjut hingga udara menjadi racun bagi sekitarnya; nilai melestarikan udara bersih dengan mencegah polusi tambahan akan semakin dihargai.

Pada ilmu ekonomi, nilai sering didefinisikan sebagai jumlah barang alternatif yang bersedia diserahkan seseorang untuk mendapatkan satu "unit tambahan" dari barang yang bersangkutan. Preferensi individu untuk barang-barang tertentu dapat dinyatakan atau diungkapkan. Dalam kasus preferensi yang dinyatakan, jumlah uang yang bersedia dibayar seseorang untuk suatu barang menentukan nilainya karena uang itu dapat digunakan untuk membeli barang lain. Namun, nilai juga dapat ditentukan dengan hanya memeringkat alternatif menurut jumlah manfaat yang akan dihasilkan masing-masing. Preferensi yang terungkap dapat diukur dengan memeriksa perilaku seseorang ketika tidak memungkinkan untuk digunakan penetapan harga pasar

Biasanya ada dua cara untuk menetapkan nilai pada sumber daya dan jasa lingkungan – menggunakan dan tidak digunakan – dan ada pendekatan untuk mengukur manfaat lingkungan berdasarkan nilai-nilai yang ditentukan ini. Ketika sumber daya atau jasa lingkungan digunakan, lebih mudah untuk mengamati harga yang bersedia dibayar konsumen untuk konservasi atau pelestarian sumber daya tersebut. Pasar atau penetapan harga biaya peluang dapat digunakan ketika ada produk nyata untuk diukur, seperti jumlah ikan yang ditangkap di danau. Biaya penggantian juga dapat digunakan, dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membalikkan kerusakan lingkungan. Penetapan harga

hedonis akan mengukur pengaruh kualitas lingkungan negatif terhadap harga barang-barang pasar terkait. Saat mengevaluasi nilai non-guna, penilaian kontingen digunakan melalui penggunaan survei yang mencoba menilai kesediaan individu untuk membayar sumber daya yang tidak mereka konsumsi.

Sebuah analisis biaya-manfaat memerlukan kuantifikasi kemungkinan dampak dari proyek yang diusulkan. Dampaknya bisa berupa fisik atau moneter, tetapi keduanya harus dihitung dan dimasukkan karena analisis keuangan yang memerlukan penetapan nilai dolar untuk setiap sumber daya yang dievaluasi juga dilakukan. Proses penilaian sumber daya atau jasa lingkungan menyediakan cara untuk membandingkan proposal alternatif, tetapi bukan tanpa masalah. Semua teknik penilaian mencakup banyak ketidakpastian: kelemahan dapat terjadi dalam metode penetapan nilai secara akurat karena sejumlah besar variabel dan sulit untuk mengkotak-kotakkan dan mengukur sumber daya dan/atau jasa lingkungan dan alam dalam ekosistem yang berfungsi sebagai web yang saling berhubungan.

F. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Sumber

Analisis dampak lingkungan sering digunakan guna melakukan penilaian mengenai dampak potensial dari pembangunan yang disarankan pada lingkungan sosial dan alam. Hal tersebut kemungkinan

meliputi kegiatan menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap lingkungan fisik, misalnya kebisingan, air dan/atau polusi udara; dan dampak terhadap layanan lokal, estetika, kesehatan, dan standar hidup.

Dalam memberlakukan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (NEPA) tahun 1969, Kongres mengharuskan semua lembaga pemerintah Federal untuk memberikan pertimbangan yang sama terhadap konsekuensi lingkungan serta motivasi ekonomi dan kelayakan teknologi ketika membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan manusia dan alam. NEPA juga mendirikan Dewan Kualitas Lingkungan dalam Kantor Eksekutif Presiden untuk memastikan bahwa badan-badan federal akan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang.

Salah satu ketentuan undang-undang mensyaratkan bahwa Pernyataan Dampak Lingkungan (EIS) ditulis untuk tindakan federal utama dan tersedia untuk semua, termasuk untuk masyarakat umum. EIS harus mencakup: dampak lingkungan dari tindakan yang disarankan; dampak lingkungan yang menimbulkan kerugian yang tak bisa dihindari; alternatif – termasuk tidak ada tindakan; keterkaitan antara penggunaan lingkungan jangka pendek dan pemeliharaan produktivitas ekologis jangka panjang; komitmen sumber daya yang tak bisa dilakukan

perubahan dan tidak dapat ditarik kembali; dan efek sekunder/kumulatif dari pelaksanaan tindakan yang diusulkan. Sekarang, sebagian besar pemerintah negara bagian dan lokal juga mengharuskan analisis dampak lingkungan dilakukan sebelum proyek pembangunan besar apa pun.

Analisis dampak lingkungan seringkali menantang sebab membutuhkan proyeksi melalui informasi yang tak memadai. Metode penilaian dampak sering kali menyertakan informasi subjektif dan objektif serta sulit mendapat pengukuran. Sehingga metode ini biasa disangka sangat kompleks dan sering kontroversial. Walaupun termasuk persyaratan terhadap banyak proyek pembangunan, fungsi laporan mengenai dampak lingkungan hanya bersifat prosedural. Jika informasi yang diperoleh dari analisis dampak lingkungan menegaskan bahwa proyek tertentu kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan lingkungan, itu tak memiliki efek hukum tertentu. Oleh karena itu, biasanya tergantung pada pengadilan untuk memutuskan apakah risiko terhadap lingkungan dibesar-besarkan.

Sementara analisis Mengenai Dampak Lingkungan bisa mengakibatkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawaban saat memeriksa beberapa hubungan diantara faktor ekologi, teknologi, ekonomi, dan sosial, yang ikut serta pada proyek pengembangan potensial, itu juga menyediakan pendekatan praktis, dan menarik guna

dilakukan pemahaman serta menghargai beberapa kompleksitas dan ketidakpastian yang ikut serta pada hubungan timbal balik tersebut.

G. Kebijakan Regulasi Vs Insentif Ekonomi

Peraturan lingkungan di Amerika Serikat secara tradisional mengandalkan perintah-dan-kontrol kebijakan di mana regulator – biasanya pemerintah – menetapkan standar atau batasan dan menerapkannya secara seragam pada kategori yang luas dari sumber. Ada tiga jenis mekanisme perintah-dan-kontrol yang dapat dipilih oleh regulator untuk diterapkan: standar ambien, emisi, atau teknologi. Sebuah standar lingkungan menetapkan jumlah polutan yang dapat hadir dalam lingkungan tertentu. Contohnya adalah ketika regulator menetapkan batas ozon di permukaan tanah [bagian per juta atau "ppm"] yang diizinkan dalam batas kota. Ini juga merupakan contoh peraturan tidak langsung karena meskipun emisi dari sumber individu dibatasi, tingkat ambien adalah apa yang coba dikendalikan oleh standar. Standar emisi jauh lebih umum karena mereka berusaha membatasi jumlah emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan, industri, atau area. Ini berbeda dari standar ambien karena penggunaannya tidak menentukan tingkat ambien polutan di lingkungan; alih-alih, ia mencoba mengurangi jumlah keseluruhan polutan yang dilepaskan berdasarkan perusahaan demi perusahaan. Akhirnya, regulator dapat memilih untuk

menerapkan astandar berbasis teknologi yang akan memaksa pencemar untuk menggunakan teknologi pengendalian pencemaran tertentu yang mereka anggap cukup hemat biaya, seperti memasang scrubber di cerobong asap. Diyakini oleh banyak orang bahwa keuntungan utama menggunakan mekanisme perintah-dan-kontrol adalah bahwa mereka memberikan hasil yang jelas. Memantau kepatuhan juga relatif mudah karena regulator hanya perlu memastikan bahwa standar telah dipenuhi. Oleh karena itu, mungkin saja tujuan pengurangan emisi dapat tercapai; jika tidak, pelanggar akan membayar denda.

Namun, mekanisme perintah-dan-kontrol memiliki beberapa kelemahan. Salah satu elemen kuncinya adalah ketidakpastian informasi. Tidak hanya sangat mahal bagi regulator untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, mereka sering kali harus mengumpulkannya dari sumber yang mereka mengatur, menciptakan kemungkinan pelaporan yang tidak akurat atau tidak jujur. Kekhawatiran penting lainnya adalah bahwa pencemar memiliki sedikit pilihan tentang bagaimana memenuhi standar karena beberapa standar secara ketat ditentukan oleh regulator. Oleh karena itu, tidak ada insentif bagi sumber untuk meneliti cara-cara baru dan kreatif untuk lebih jauh mengurangi emisi polusi mereka sendiri. Namun, dalam hal standar emisi, sumber sering kali dapat memutuskan cara terbaik untuk memenuhi standar tersebut. Akhirnya, karena

mekanisme perintah-dan-kontrol diterapkan secara seragam di berbagai kategori sumber yang luas, mekanisme tersebut mungkin bukan cara yang hemat sekali biayanya guna melakukan pengurangan terhadap tingkat polusi atau emisi. Karenabiaya marginal untuk membatasi polusi akan bervariasi di antara sumber-sumber, itu juga pada dasarnya menjamin bahwa kesetaraan tidak akan tercapai. Di bawah skenario ini, pencemar tidak dikenakan biaya marginal polusi yang terus mereka keluarkan; hanya untuk polusi yang mereka reda, yang secara ekonomi tidak efisien. Insentif ekonomi – yang telah diperdebatkan oleh para ekonom selama beberapa dekade – baru- baru ini mulai memainkan peran yang lebih besar baik dalam kebijakan lingkungan nasional maupun internasional. Ketika regulator berusaha untuk memenuhi tujuan kualitas lingkungan yang semakin mahal, mereka mulai melihat insentif sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan berbiaya lebih rendah. Diharapkan bahwa sistem regulasi dapat dibuat lebih efektif dengan mempromosikan pilihan yang efisien lingkungan dengan sedikit campur tangan pemerintah. Kebijakan berbasis insentif bertujuan untuk mendorong pencemar untuk menemukan cara-cara inovatif dan berbiaya rendah untuk mengurangi emisi lingkungan mereka dengan menawarkan penghargaan atau dengan membagikan hukuman dalam bentuk pajak atau biaya, izin yang dapat dipasarkan, atau kewajiban.

Pajak atau biaya membebankan pencemar dalam jumlah tertentu per unit pencemaran, yang nilainya ditentukan oleh regulator. Izin yang dapat dipasarkan memungkinkan perusahaan untuk mencemari pada tingkat yang sedikit hemat biaya. Hal ini memungkinkan mereka untuk membeli izin tambahan sesuai kebutuhan jika mereka gagal memenuhi target internal mereka, dan menjual kelebihan izin jika melebihi target pengurangan polusi internal mereka. Kewajiban melibatkan penetapan tingkat kehati-hatian yang memungkinkan manfaat terbesar bagi masyarakat, dan mempertahankan perusahaan pada standar itu jika muncul masalah. Meskipun lebih fleksibel daripada standar yang ditetapkan, hal itu membebani perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan tertentu sehubungan dengan masalah lingkungan atau untuk dimintai pertanggungjawaban atas hasil negatif apa pun. Insentif memiliki beberapa keuntungan, termasuk memungkinkan sumber berperan dalam menentukan cara yang paling hemat biaya untuk mengurangi emisinya dan, dengan demikian, dalam memenuhi biaya marjinalnya. Ketiga jenis insentif berusaha untuk mempertahankan "prinsip equimarginal," atau ketika biaya pengendalian marjinal sama di semua sumber. Ini menciptakan solusi keseluruhan yang efisien atau "biaya terendah". Selain itu, jika dibandingkan dengan mekanisme komando dan kontrol, regulator memerlukan lebih sedikit informasi di

bawah program insentif karena ada motivasi yang lebih besar bagi pencemar untuk merancang solusi inovatif mereka sendiri.

Oleh karena itu, regulator tidak perlu mengetahui seberapa efektif berbagai opsi pengendalian, atau berapa biayanya pada instalasi tertentu, karena sumbernya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan mereka dan akan membayar biaya pengendalian polusi dan kerusakan. biaya.

Meskipun banyak yang mungkin mendukung penggunaan instrumen ekonomi – dalam hal pajak – sumber yang terkena dampak sering kali menentang. Kelompok-kelompok yang terkena dampak ini mulai memandang instrumen kebijakan ekonomi sebagai membebankan biaya yang lebih tinggi daripada peraturan komando dan kendali. Pajak juga menghadirkan hambatan politik karena tidak ada industri yang suka melihat kenaikan pajak, dan politisi tidak ingin kehilangan dukungan dengan mengesahkan undang-undang yang memasukkan lebih banyak pajak. Perhatian tambahan adalah pandangan kompleksitas tambahan sebagai regulator berusaha untuk mengatasi masalah polusi di berbagai bidang dan/atau industri. Namun, pajak polusi terkadang diinginkan oleh perusahaan jika diterapkan pada semua karena perpajakan yang sama dipandang 'adil' .

Dalam hal kebijakan lingkungan, para politisi terutama memperhatikan bahwa sesuatu harus dilakukan dan kurang tertarik pada pilihan atau rancangan kebijakan tertentu. Seringkali, insentif ekonomi harus disetujui oleh sistem politik di mana proses tawar-menawar menjadi penting, dan masalah yang harus diselesaikan antara pejabat, ahli, dan pihak-pihak yang terkena dampak menjadi lebih teknis dan legal. Namun, sementara peraturan komando dan kendali masih umum, semakin banyak undang-undang mulai digunakan mekanisme pasar, atau kombinasi perintah-dan-kontrol bersama dengan mekanisme pasar, untuk memenuhi tuntutan masalah lingkungan yang ada dengan sebaik-baiknya.

SISTEM EKONOMI KESEHATAN

A. Sistem Ekonomi Kesehatan

Ekonomi dan kesehatan memiliki hubungan yang erat sekali. Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan masyarakat akan mempengaruhi efisiensi kerja. Kesehatan adalah keadaan sejahtera pada sosial, mental dan fisik, serta tak hanya dibatasi oleh kelemahan atau penyakit. Salah satu tujuan sistem kesehatan nasional adalah menjamin masyarakat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, menyeruh, dan bermutu, selain itu pelayanan kesehatan tak sekedar ada pada tangan pemerintah, tetapi juga peran aktif seluruh anggota masyarakat (Nihayatul, M., dkk 2020).

Rasionalisasi pemilihan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, terkhusus yang melibatkan pemakaian sumber daya yang memiliki keterbatasan, merupakan perak aktif dalam ekonomi kesehatan. Dalam penerapan ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, kegiatan pelayanan kesehatan akan mencukupi kriteria efisiensi dan kedua kegiatan pelayanan tersebut hemat biaya. Selanjutnya, penerapan ekonomi wajib mencukupi kriteria efisiensi kepentingan, dan dalam hal kesehatan, khususnya kepentingan pribadi.

Menurut M. Rafiy (2019) ruang lingkup ekonomi kesehatan meliputi berikut ini:

1. Ilmu ekonomi

Pada ilmu ekonomi terdapat dua bidang bahasan sebagai berikut:

Positive economics merupakan sebuah bidang ekonomi yang memaknai efisiensi mengenai alokasi sumber daya sebagai hasil yang dihitung secara kuantitatif, dengan tidak menyaksikan apakah efisiensi tersebut dipilih oleh masyarakat atau tidak, sebuah pemahaman yang mengharuskan ekonomi positif menjadi tanpa biaya.

Welfare economics adalah integrasi antara ilmu ekonomi positif dan ilmu politik, yang mana hal mendasar dari ilmu ekonomi positif berkaitan terhadap norma yang berada pada masyarakat. Selain itu, *welfare economics* mencakup topik-topik, misalnya eksternalitas, barang publik, serta penyedia layanan kesehatan.

2. Upaya Kesehatan

Sistem kesehatan nasional dirancang untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Faktor pelayanan kesehatan terdiri dari empat kegiatan, yakni upaya promosi, upaya pencegahan, upaya pengobatan, dan upaya rehabilitasi.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan

Terdapat empat faktor yang memberikan pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, yakni: faktor pelayanan kesehatan, genetik, lingkungan, dan perilaku. Faktor perilaku mempunyai dampak terbesar pada derajat kesehatan masyarakat, diikuti oleh faktor genetik, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

a. Tersedianya fasilitas kesehatan

Dengan memaksimalkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat, maka tentunya akan menambah percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Sehingga fasilitas kesehatan tentu wajib didukung oleh kapasitas tenaga kesehatan.

Sekarang ini, pemerintah sudah berupaya untuk mencapai tiga aspek yang erat kaitannya dengan pekerjaan pelayanan kesehatan, yaitu usaha mencukupi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan Pustu, Polindes, Puskesmas, dan jenis pelayanan kesehatan yang lain. Munculnya rumah sakit baru pada tiap kabupaten atau kota juga telah meningkatkan pelayanan rujukan.

Usaha peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan secara langsung juga telah difasilitasi oleh program

jaminan kesehatan bagi kelompok rentan. Program ini bekerja sama dengan program pemerintah lainnya, misalnya: program BLT (Bantuan Langsung Tunai), wajib belajar, dan beberapa program yang lainnya. Guna melakukan penjaminan atas fasilitas pelayanan kesehatan bisa menyediakan pelayanan yang efisien terhadap masyarakat, sehingga pemerintah bisa menjalankan program guna menjaga kualitas layanan kesehatan. Adapun pelayanan pada rumah sakit, program menjaga kualitas layanan kesehatan dilaksanakan melalui pelaksanaan akreditasi rumah sakit.

b. Faktor genetik

Sangat potensial mendapatkan penyakit akibat bawaan atau keturunan. Penyakit akibat bawaan ini biasanya susah untuk dicegah, dengan banyaknya penduduk mempunyai risiko penyakit bawaan sangat sulit usaha dalam melakukan peningkatan derajat kesehatannya. Salah satu upaya untuk meminimalkan resiko ini, perlu adanya konseling perkawinan. Upaya ini tentunya memanfaatkan teknologi kedokteran maupun kesehatan yang sangat maju. Selain itu, kapasitas tenaga spesialis wajib disalurkan untuk mengintensifkan usaha pencapaian derajat kesehatan yang sangat tinggi.

c. Lingkungan

Lingkungan yang bersih juga memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan suatu masyarakat. Lingkungan yang tak sehat atau kotor memiliki potensi dalam menimbulkan pencernaan, infeksi saluran pernafasan, dan gatal-gatal terhadap warga. Selain itu, lingkungan yang tak sehat juga dapat menyebabkan nyamuk *Aedes aegypti* menjadi penyebab penyakit demam berdarah.

d. Perilaku

Perilaku sehat sangat mendukung peningkatan derajat kesehatan, pernyataan yang dikonfirmasi oleh jumlah penyakit yang disebabkan oleh gaya dan perilaku hidup. Perilaku hidup sehat dapat dicontohkan dengan membiasakan pola makan dengan makanan yang sehat yang membuat kita aman dari beberapa penyakit, misalnya diabetes, obesitas, stroke, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan sebagainya. Perilaku sehat lainnya yaitu kebiasaan mencuci tangan sebelum makan bisa mencegah penyakit saluran cerna.

Keempat faktor itu tak bisa ada sendiri-sendiri, tetapi akan saling mempengaruhi. Dalam kaitan ini, usaha pembangunan kesehatan wajib disinkronkan dan saling bergantung satu sama lain. Usaha kesehatan lain yang dilakukan harus memiliki sifat komprehensif, dengan kata lain,

usaha kesehatan wajib mencakup rehabilitasi, pengobatan, promosi, dan pencegahan.

Dalam usaha kesehatan tersebut di atas, peran pemerintah sebagai regulator sangat diharapkan, dan bisa dijalankan. Pemberian pelayanan kesehatan 24 jam kepada masyarakat harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tanpa mengabaikan budaya atau budaya bangsa Indonesia yang secara biologis saling membutuhkan.

4. Derajat Kesehatan Yang Optimal

Seluruh usaha kesehatan yang tersebut ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Tujuan ini tertuang pada Undang-undang Tahun 1992 Nomor 23 mengenai Kesehatan, pada Bab 1, Pasal 1, menyatakan bahwa kesejahteraan dari sosial, jiwa, dan badan memungkinkan seseorang bisa hidup produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

B. Ekonomi Kesehatan Sebagai Welfare Economics

Ekonomi kesehatan adalah turunan dari ilmu ekonomi yang berusaha mengidentifikasi pilihan pada beberapa usaha kesehatan. Pilihan ini dapat dimulai dengan pilihan mengenai bagaimana memobilisasi sumber daya, seperti pilihan antara peran mengenai jumlah dan jenis sumber daya yang digunakan, pilihan mengenai proses usaha itu sendiri, pilihan mengenai kedalaman dan jenis usaha yang

dilaksanakan, dan pilihan mengenai komunitas dan alokasi pemakaian produk oleh masyarakat. Sehubungan dengan pernyataan di atas, tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai dominansi positif ekonomi dan welfare ekonomi. Dalam hal ini, "kesehatan" telah menjadi objek penelitian ekonomi kesehatan, yang berarti bahwasanya ilmu ekonomi kesehatan bukan tanpa nilai, tetapi mengandung filosofi atau nilai-nilai inti sebagai berikut:

1. Sehat

Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa sehat merupakan hak asasi manusia, pernyataan ini tertuang pada konsep "*Health for All*" yang dideklarasikan oleh beberapa negara anggota WHO pada Geneva di tahun 1997. Terkait mengenai konsep tersebut, maka konsep kesehatan manusia merupakan suatu kondisi normatif yang menjadi tujuan kerja dan usaha kesehatan.

2. Pemerataan atau *fairness*

Upaya kesehatan dapat dicapai melalui pengupayaan mengenai pemerataan, dimana pelayanan didistribusikan secara merata sesuai keperluan. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria efektivitas maupun efisiensi adalah parameter yang penting penting sekali pada perekonomian dan pemerataannya juga harus dipertimbangkan.

3. Motivasi Non Profit (Nirlaba)

Masalah profit ataupun non-profit pada usaha kesehatan mengisyaratkan bahwasannya keuntungan dapat dikumpulkan dalam usaha kesehatan, tetapi keuntungan yang diperoleh kembali digunakan untuk pengembangan dan peningkatan pekerjaan kesehatan. Pengumpulan dan penggunaan kembali keuntungan merupakan makna non-profit pada konsep usaha kesehatan. Filosofi utama kesehatan bukanlah "bebas nilai", yang berarti bahwa penilaian alokasi sumber daya dan masalah efisiensi selalu dikaitkan dengan pertimbangan hak asasi manusia, kesetaraan, dan nirlaba. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi kesehatan sesungguhnya mencakup konsep ekonomi kesejahteraan

4. Ciri Khusus Sektor Kesehatan

Pada uraian sebelumnya dikatakan bahwasannya ekonomi kesehatan merupakan penerapan ilmu ekonomi di bidang kesehatan, oleh karena itu ekonomi kesehatan merupakan perpaduan diantara dua cabang ilmu yang telah mumpuni, yakni ilmu ekonomi dan ilmu kesehatan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini.

- a. Terjadinya penyakit yang tak diduga oleh pengetahuan orang mengenai keperluan mereka terhadap komoditas ekonomi, misalnya rumah, pakaian, makanan, dan sebagainya sangat berbeda, disamping

itu, pada umumnya setiap orang mengalami kesulitan dalam memprediksi penyakit yang akan dihadapinya pada masa yang datang dan tidak memahami pelayanan kesehatan apa yang dibutuhkan. Ketidaktahuan ini dapat menjadi semangat supaya orang secara kolektif menghadapi risiko penyakit itu pada sebuah sistem asuransi.

- b. Eksternal efek merupakan konsekuensi logis secara positif maupun negatif yang dirasakan orang lain sebagai akibat dari perilaku individu. Di bidang kesehatan, perilaku individu, seperti kegiatan mencegah penyakit dengan cara imunisasi, akan berdampak positif pada pengurangan risiko orang lain. Sebab imunisasi memutus rantai penularan, sehingga manfaat bagi masyarakat berlipat ganda dibandingkan manfaat bagi individu. Pada bahasa ekonomi, disebutkan bahwasannya lebih kecil daripada manfaat marginal masyarakat. Jika semua orang mengetahui hal ini, mekanisme pasar biasanya akan memiliki permintaan imunisasi yang rendah. Secara ekonomi, maka pelayanan kesehatan dengan pengaruh eksternal harus dikelola oleh pemerintah.
- c. Sehat Dan Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak. Menurut beberapa ekonom maupun professional kesehatan mengatakan bahwasannya hidup sehat, tempat tinggal, pakaian, dan makan merupakan keperluan dasar manusia yang wajib diupayakan supaya terpenuhi,

terlepas dari apakah seseorang mampu membelinya atau tidak. Hal tersebut mengakibatkan alokasi pelayanan kesehatan seringkali didasarkan pada keperluan daripada *demand*. Distribusi model ini sudah memperoleh perhatian yang sangat besar saat ini. Ide mengenai peningkatan tarif pelayanan kesehatan biasa diiringi pada pertanyaan mengenai dampak pada *fairness*. Subsidi merupakan kebijakan untuk menjamin hak kesehatan terutama masyarakat miskin atau tidak mampu.

- d. Demand Pada Pelayanan Kesehatan Ciri khusus lainnya adalah permintaan pada pelayanan kesehatan akan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan mobil, papan, pangan, sandang, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan pada skala aplikasi pribadi berbeda dengan barang ekonomi yang lain. Pertama, ketika mengkonsumsi pelayanan kesehatan, masyarakat sebenarnya mengharapkan beberapa orang mendapatkan kesehatan. Kedua, konsumen jasa kesehatan berada pada posisi yang sangat rentan, sebab seringkali tak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Ketiga, konsekuensi dari situasi ini yakni bahwasannya kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagian besar tidak tentang keputusan individu. Kenyataannya menjadi hak seseorang dalam menentukan tempat dimana ia berobat, namun pihak providerlah yang menentukan jenis pemeriksaan dan jenis pengobatan.

Penerapan teori permintaan dalam ilmu ekonomi butuh mempertimbangkan kekhususan permintaan pelayanan kesehatan tersebut di atas.

- e. **Komponen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan.** Jasa merupakan komponen utama dalam suatu organisasi pelayanan, organisasi kesehatan merupakan suatu contoh organisasi dimana sistemnya padat karya. Salah satu contoh kongkret yang dapat kita lihat dalam produksi sebuah jenis jasa pelayanan kesehatan, seperti pada operasi usus buntu, dibutuhkan beberapa kualifikasi tenaga kedokteran dan keperawatan. Pada sektor kesehatan ataupun unit pelayanan kesehatan dalam perubahan upah sangatlah sensitif, dalam artian terjadinya perubahan persentase upah walaupun sangat kecil akan mengakibatkan kenaikan biaya kesehatan general yang signifikan. Oleh karena itu, kesehatan sebagai "social-good Ones personal health is everybody's", kesehatan merupakan indikator langsung dari kesejahteraan sosial. Kesehatan atau penyakit seseorang berdampak langsung pada masyarakat luas. Pertama, jika penyakitnya menular, dapat menular ke orang lain. Kedua, penyakit tak menular pun menjadi beban masyarakat dalam penanggulangannya, baik pada sistem asuransi maupun sistem yang didukung subsidi. Keadaan ini membuat kebijakan pembangunan kesehatan selalu menghambat

alokasi sumber daya yang optimal untuk memberikan dampak sosial yang setinggi-tingginya dengan sumber daya yang terbatas.

- f. Motif Non Profit. Usaha kesehatan bertujuan untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan, tidak mencari keuntungan pada ukuran moneter. Olehnya itu, penggunaan sumber daya pada distribusi, produksi, dan pengaturan konsumsi pelayanan kesehatan, biasa memperhitungkan optimalisasi sosial daripada maksimalisasi keuntungan. Oleh karena itu, upaya pemasaran produk pelayanan kesehatan bukanlah konsumsi yang maksimal, melainkan konsumsi yang optimal dari masyarakat pemakai pelajayana kesehatan yang disesuaikan terhadap kepeluannya. Selain itu, dilihat dari aturan ini, persaingan dalam industri kesehatan tak etis. Nyatanya, usaha mencari keuntungan pada penyediaan pelayanan kesehatan sebab alasan dari tak adanya aturan dan mekanisme kontrol yang ketat. Di Indonesia, beberapa institusi medis yang didirikan dengan yayasan sebagai badan hukum. Jelas, yayasan adalah entitas sosial dan nirlaba, itulah sebabnya tidak dikenakan pajak.
- g. Kesehatan Sebagai Konsumsi Sekaligus Investasi. Usaha kesehatan pada jangka pendek akan dilihat sebagai sektor yang dapat dikonsumsi tanpa pengembalian investasi yang jelas, sehingga sektor kesehatan selalu berada di bawah skala yang berorientasi pada

pembangunan, terutama jika berorientasi pada pembangunan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang.

Menurut Notoatmojo (2021), Pelayanan kesehatan adalah suatu model pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya mencegah dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang terarah, yaitu ditujukan terhadap masyarakat. Ciri utama pelayanan kesehatan adalah berikut ini:

- a. *Uncertainty* atau ketidakpastian, merupakan ketidakmampuan untuk menentukan kapan, di mana, dan seberapa besar permintaan akan suatu pelayanan kesehatan. Ketidakpastian ini seringkali menciptakan mekanisme asuransi.
- b. *Asymmetry of information*, merupakan keadaan dimana konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan penyedia (dokter) lebih mengetahui banyaknya manfaat dan kualitas pelayanan yang mereka jual. Situasi ini membuat konsumen rentan terhadap pemasok dan karenanya memerlukan kontrol dan pemantauan pemerintah untuk melindungi konsumen.
- c. *Externality*, merupakan konsumsi pelayanan kesehatan, yang dalam hal ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pembeli, tetapi juga non-pembeli. Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk

subsidi agar pembiayaan tak hanya menjadi tanggungan sendiri tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

d. Ciri Khusus Ekonomi Kesehatan

Ciri-ciri khusus bidang kesehatan tersebut di atas menjadikan penerapan ilmu ekonomi di bidang kesehatan juga memiliki ciri-ciri khusus. Seperti halnya, pada penerapan ekonomi positif, karakteristik motivasi non-tenaga kerja, adanya pengaruh eksternal, dan sebagainya yang harus dipertimbangkan ketika menjelaskan perilaku penyedia (*supply*). Sangat lemah dalam menjelaskan perilaku konsumen, yaitu tidak tahu banyak tentang barang yang tersedia.

Pada aplikasi normatif juga berupaya menyeimbangkan peran masyarakat dan pemerintah (termasuk subsidi) guna menggapai optimalisasi sosial. Namun, efisiensi saja tidaklah tujuan ekonomi kesehatan, namun harus valid. Namun, efisiensi saja tidaklah tujuan ekonomi kesehatan, namun harus valid. Secara sederhana, memperoleh manfaat sosial terbesar dengan biaya serendah mungkin adalah tujuan atau aksiologi ekonomi kesehatan.

e. Bidang Kajian

Bidang penelitian (*ontology*) ekonomi kesehatan terbagi menjadi bidang penelitian ilmu ekonomi, yakni bidang penelitian makro dan

mikro. Dalam bidang penelitian makro akan mengkaji keseluruhan sektor kesehatan dan keterkaitannya dengan sektor sosial ekonomi lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui kontribusi sektor kesehatan terhadap pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, kontribusi sektor kesehatan adalah ukuran moneter. Selain itu, studi makro ini mengkaji dampak implementasi kebijakan dan pembangunan di sektor lain pada derajat kesehatan. Kemudian, dampak positif pembangunan sektor yang lain pada derajat kesehatan juga menjadi fokus penelitian makro ini. Seperti halnya kebijakan subsidi terhadap akses pelayanan kesehatan, dampak peningkatan produksi pangan terhadap gizi masyarakat, dan lain-lainnya.

Dalam alokasi anggaran sektoral, studi makro melihat bagaimana biaya kesehatan terkait dengan pembangunan ekonomi, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi kecukupan dan kesehatan, dan banyak lagi.

Bidang penelitian mikro adalah masalah atau program khusus sektor kesehatan. Rincian tersebut berkaitan dengan sisi produksi (*supply*) dan sisi konsumsi (*utilization* atau *call for*) pelayanan ataupun program kesehatan.

Dalam hal produksi, ekonomi kesehatan mencakup studi tentang biaya berbagai perusahaan proyek kesehatan (misalnya fasilitas, bahan, tenaga kesehatan, dan sebagainya). Analisis biaya dari beberapa alternatif memberikan tinjauan mengenai efisiensi biaya dan efektivitas biaya tiap programnya.

Masih di sisi produksi, bidang penelitian lain yakni sisi pembiayaan secara menyeluruh, misalnya: sumber biaya program kesehatan dari *out-of-pocket*, swasta, pemerintah, dan sebagainya, serta berapa biayanya, apa trennya, bagaimana untuk memindahkan sistemnya. Selain itu, ekonomi kesehatan mengkaji berbagai aspek alokasi sumber daya, yang dapat bersifat vertikal, antar proyek, antar garis anggaran proyek, dan sebagainya.

Dari segi konsumsi (permintaan), ekonomi kesehatan mengkaji pola pemakaian pelayanan kesehatan dan perbedaannya menurut pekerjaan, kelompok umur, wilayah perkotaan dan pedesaan, strata pendidikan, kelas pendapatan, fasilitas, dan lain-lainnya. Selain itu, penelitian tentang konsumsi juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu, seperti biaya, jaminan kesehatan, subsidi, dan tarif mengenai pola konsumsi pelayanan kesehatan.

f. Hubungan Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Kesehatan

Pembangunan bisa dimaknai sebagai usaha yang teratur untuk menggunakan beberapa peluang yang teratur. Di tingkat nasional, hal ini memperlihatkan suatu kontinum dengan banyak dimensi yang harus diperhatikan aspek kesehatan, demografi, dan ekonominya.

Saat ini, konsep pembangunan ekonomi dipakai terhadap dua hal, yakni: Pertama, membedakan antara masyarakat dan negara dalam skala dari yang miskin ke yang kaya. Kedua, menunjukkan transisi dari negara miskin ke negara yang relatif kaya.

Pembangunan ekonomi tak lagi dianggap sebagai sebuah proses yang sederhana, suatu proses penyuntikan modal ke dalam sistem ekonomi dengan tujuan memberikan manfaat otomatis bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia. Hal ini menyadarkan kita bahwa proses penghimpunan modal dapat berdampak negatif, sebab modal bukanlah jalan keluar, sehingga perencanaan pembangunan menjadi sangat rumit, sebab wajib memperhitungkan seluruh aspek perekonomian, termasuk permasalahan kesehatan.

Pembangunan kesehatani adalah istilah yang biasa dipakai guna memperlihatkan proses perpindahan kesehatan masyarakat dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih baik dan disesuaikan pada

standar kesehatan. Sifat perubahan ini bisa diketahui dengan melihat kasus kematian bayi. Masyarakat yang tak sehat, kematian bayinya sebagian besar diakibatkan oleh penyakit pernapasan atau diare.

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi, terutama di Amerika Serikat, memperlihatkan bahwasannya perubahan GNP tidak hanya tercermin pada perkembangan tenaga kerja ataupun modal saja, namun juga pada faktor residual yang meningkatkan kualitas faktor produksi. Dalam artikel ini, peran kesehatan dan pendidikan dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia menjadi penting.

Salah satu faktor yang sangat memberikan pengaruh berupa produktivitas sumber daya manusia yang bergantung pada kesehatan sumber daya manusia sendiri. Tingkat konsumsi gizi dan kalori yang rendah pada generasi muda di pedesaan tentunya akan menciptakan tenaga kerja yang tak produktif, sehingga mengakibatkan sedikit penurunan kecerdasan. Keadaan ini secara langsung akan mempengaruhi kecenderungan produktivitas menurun, sehingga mengakibatkan tingkat produksi yang rendah.

1. Sumbangan Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa peneliti sepakat bahwasannya gizi buruk dan derajat kesehatan masyarakat terkait erat pada kemiskinan, dengan demikian

jika kesehatan membaik, pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan meningkat, melalui sumber daya manusia yang lebih produktif.

Asnidawati (2020) mengidentifikasi dampak gizi terhadap produktivitas dengan jelas, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan status gizi akan menurunkan angka kematian dan kesakitan, terutama bagi penduduk usia produktif, yang dapat menambah peningkatan keikutsertaan mereka yang belum melahirkan dan meningkatkan hari kerja mereka yang melakukan aktivitas kerja.

Selain itu dikatakan bahwa perbaikan gizi dan kesehatan tenaga kerja akan memberikan peningkatan terhadap produktivitas melalui peningkatan kemampuan individu itu sendiri. Dampak program kesehatan dan gizi pada penduduk usia muda akan tercermin dalam GNP masa depan sebagai akibat dari perubahan kehadiran dan hasil lembaga pendidikan. Pada saat yang sama, dampak lain dari program gizi dan kesehatan juga akan memberi pengaruh pada GNP melalui pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dan secara tak langsung melalui partisipasi pada pendidikan.

2. Sumbangan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Kesehatan

Peningkatan nilai GNP berimplikasi pada penurunan angka kesakitan dan kematian, serta peningkatan status gizi, baik bagi seluruh masyarakat maupun bagi individu tertentu. Perbaikan gizi menjadi prioritas untuk membentuk kualitas manusia Indonesia. Apalagi dalam kondisi krisis sekarang ini, yang sudah menciptakan krisis yang lebih serius. Akibat daya beli yang rendah, 60-70% anak mengalami gizi buruk akibat dampak krisis ekonomi. Selain itu, krisis ekonomi berdampak pada menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat. Berhubungan dengan hal ini maka untuk menjadi sehat titik awalnya dimulai dengan pemecahan masalah gizi.

Krisis ekonomi yang kita alami telah mencapai tingkat kesulitan yang tinggi, sebab rendahnya daya beli masyarakat guna mencukupi keperluan pangan konsumsi tiap hari. Keperluan pangan yang tak terpenuhi bisa menimbulkan masalah gizi dan kesehatan terutama bagi kelompok rentan, misalnya, ibu menyusui, ibu hamil, serta balita dan bayi.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan saling berinteraksi. Pembangunan ekonomi menciptakan sumber daya tambahan guna melakukan peningkatan terhadap gizi masyarakat,

teknologi, pelayanan, sanitasi, dan perumahan. Pembangunan ekonomi memberi peningkatan pada kesehatan, dan jika beban penyakit berkurang, kesehatan meningkat, dan ketidakpastian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa variabel sering berhubungan secara timbal balik. Misalnya saja perbedaan status gizi tertentu antar negara miskin dan negara kaya merupakan indikator adanya derajat kesehatan yang lebih baik. Tetapi dalam keadaan lain, hal ini justru merupakan petunjuk adanya penyakit-penyakit dengan kualitas mematikan seperti kanker dan penyakit jantung.

SISTEM JAMINAN NASIONAL

A. Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Pemeliharaan kesehatan di Indonesia telah berlangsung mulai zaman penjajahan Belanda. Sesudah Indonesia merdeka, pelayanan kesehatan tetap ada. Menyusul pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia tetap membutuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya. Menteri Kesehatan Prof. GA Siwabessy 1966-1978 mencetuskan gagasan guna mengadakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan seperti yang diterapkan di beberapa negara maju. Program pun ini berkembang pesat. Ketika program jaminan kesehatan diterapkan, penerima manfaat dari program tersebut masih terbatas pada pegawai negeri sipil dan keluarganya. Akan tetapi Prof. GA Siwabessy yakin suatu saat semua masyarakat Indonesia akan memiliki akses terhadap program jaminan kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan meliputi empat periode berikut ini:

1. Tahun 1968 - Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 1 Tahun 1968 dengan merancang Badan

Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil (PNS) dan para pensiunan beserta keluarganya.

2. Tahun 1989 - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 dan 23 Tahun 1989. BPPDK berubah status dari lembaga di lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB yaitu memberikan jaminan kesehatan kepada PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis mandiri dan keluarganya.
3. Tahun 1992 - PHB mengalami perubahan status menjadi PT. Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1992. PT. Askes (Persero) mulai menjangkau pegawai BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM). Program yang kemudian dikenal sebagai Program Askeskin ini menargetkan 60 juta orang miskin dan rentan. Pemerintah pusat membayar iuran anggota. PT. Askes (Persero) juga membuat Rencana Jaminan Kesehatan Masyarakat (PJKMU) yang dirancang untuk melayani mereka yang tidak ditanggung oleh Jamkesmas, Askes Sosial atau asuransi swasta. PJKMU merupakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya

diserahkan kepada PT Askes (Persero). Selama periode ini, tercatat 6,4 juta orang dari 200 kabupaten/kota sebagai peserta PJKMU.

4. Tahun 2014 - Pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan resmi beroperasi. Ini dimulai pada tahun 2004 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan menunjuk PT. Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT. Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

B. Tantangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional terhadap semua rakyat Indonesia, terkhusus pegawai negeri sipil, pensiunan PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya dan badan usaha lainnya atau masyarakat umum.

BPJS Kesehatan adalah penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang termasuk salah satu dari lima program pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yakni Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan

Kesehatan. Hal tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan juga melaksanakan fungsi pemerintahan (*governance function*) pada bidang pelayanan publik, yang sebelumnya dilaksanakan sebagian oleh badan usaha milik negara dan yang lainnya lagi oleh instansi pemerintah. Perpaduan antara dua fungsi subjek komersial dan fungsi pemerintah saat ini tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang melaksanakan fungsi pelayanan publik pada pengelolaan bidang jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga mempunyai modal awalnya dari APBN dan berikutnya mempunyai kekayaan sendiri, termasuk aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial dari sumber yang diamanatkan secara hukum. Kekuasaan BPJS Kesehatan mencakup semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bisa mewakili negara pada hubungan bersama beberapa badan internasional atas nama Indonesia. Kekuasaan ini adalah ciri tersendiri dari badan hukum dan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan pelaksanaan tugasnya menjadi tanggung jawab Presiden selaku kepala pemerintahan negara.

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas kesehatan Tingkat 1 adalah pengelolaan dana untuk fasilitas tersebut. Terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu bahasan yang terkemuka pada Rakerkesda dan Rakorkes, mengingat pemerintah sudah mengesahkan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pusat, yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan membayar dana pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, terutama untuk biaya kesehatan. Peraturan Presiden ini mengatur bahwasannya Puskesmas bisa memakai dana kepala yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan dan disesuaikan terhadap ketentuan yang masih berlaku.

Pada umumnya pengelolaan jumlah pegawai di fasilitas kesehatan primer dikhususkan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan, menunjang biaya operasional pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan minimal 60% dari total pendapatan JKN, termasuk pelayanan personal hygiene yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Adapun dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan mencakup biaya bahan medis habis pakai, alat kesehatan, obat, dan dukungan

biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan adalah suatu bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap sumber daya manusia di fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung (tenaga kesehatan) maupun tak langsung.

Menkes menjelaskan bahwa semua jajaran direksi rumah sakit dan beberapa dokter atau klinisi mengatakan sudah waktunya memberikan pelayanan kesehatan dalam tatanan yang lebih baik untuk mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Saat menerapkan model pembayaran Ina-CBGs, rumah sakit perlu merespon dari perspektif yang berbeda dari model pembayaran biaya layanan, seperti pembayaran yang diterima rumah sakit di masa lalu sebelum era JKN. Tarif Ina-CBGs berupa blanket charge yang diterapkan untuk mengendalikan pembiayaan kesehatan bagi rumah sakit. Mau tidak mau, rumah sakit perlu melakukan perubahan agar tidak mengalami defisit dalam menggunakan model pembayaran Ina-CBGs untuk memberikan pelayanan.

Selama dua tahun sejak 1 Januari 2014, Otoritas Jaminan Kesehatan ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara layanan jaminan kesehatan nasional, keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional menjadi tantangan ke depan, dengan partisipasi pada tahun 2016 menerima bantuan donasi Donasi dari mereka yang hanya

menyetujui Rp. 23.000 per peserta, kolektibilitas peserta non gaji masih belum maksimal.

C. Penerapan Tarif Kapitasi Di Puskesmas

Beberapa tahun yang lalu BPJS kesehatan mengeluarkan peraturan baru No 2 tahun 2015 mengenai norma kapitasi jaminan kesehatan nasional. Aturan ini cukup membuat polemik di jajaran pemberi pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas, olehnya itu peraturan inipun di revisi yang sekarang ini tetap pada tahap pembahasan yang akan diujicobakan di salah satu Puskesmas di Ibukota Provinsi. Berdasarkan usulan dari kementerian kesehatan dan beberapa asosiasi. Peraturan itu diterapkan bertahap mulai dari daerah yang siap dulu. Ada kesepakatan kalau ibu kota provinsi sudah memiliki fasilitas yang memadai.

Dari data yang ada sejumlah puskesmas di Ibu Kota propinsi belum memenuhi syarat untuk menerima dana kapitasi penuh dari BPJS kesehatan karena itu norma kapitasi akan diterapkan di puskesmas lain. Penyusunan aturan pembekuan norma kapitasi baru menurut peraturan BPJS No 2/2015 menuai banyak kritik. Salah satunya tak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama siap menjalankan aturan tersebut mengingat kondisi FKTP disetiap daerah beragam. Pembekuan aturan tersebut

addendum atau tambahan klausul perjanjian kerja sama antara FKTP dan BPJS kesehatan sesuai peraturan BPJS kesehatan No 2 tahun 2015 tak berlaku. Jadi pembayaran norma kapitasi berdasarkan perjanjian kerja sama sebelumnya.

Sesungguhnya BPJS menerima masukan semua pihak terkait kalau masih ada bagian yang harus direvisi karena tidak relevan jika disepakati pasti bisa berubah. Dana kapitasi adalah dana yang dibayarkan setiap bulan pada FKTP atau puskesmas untuk membiayai layanan menurut jumlah peserta. Dalam peraturan BPJS kesehatan no 2/2015 puskesmas akan mendapat dana kapitasi penuh sebesar Rp.6000 jika punya minimal 3 dokter, satu dokter gigi dan mampu melayani 24 jam. Kalau satu puskesmas tingkat rujukannya tak lebih dari 100 persen dan memiliki rasio dokter peserta maksimal 1:5000 peserta. Bisa masuk zona prestasi. Dana yang diberikan bisa lebih besar lagi.

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lebih dari 14.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia jumlah itu ditargetkan meningkat sering bertambahnya peserta jaminan kesehatan nasional. Sejalan dengan itu peningkatan dan evaluasi kerja layanan JKN yang di kelola BPJS kesehatan dari pusat sampai daerah. Tujuan revolusi mental dalam BPJS adalah mengubah pola pikir pada layanan masyarakat, semua duta BPJS harus memiliki kultur budaya disiplin bertanggung jawab dan efisien

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jajaran BPJS di himbau agar tetap bekerja maksimal meski di kritik banyak pihak selain itu perbaikan dan evaluasi diperlukan demi kemajuan tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia.

D. Pentingnya Regulasi Penetapan Tarif

Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berlaku mulai awal 2014, akan tetapi salah satu pertanyaan publik dan mungkin praktisi medis yaitu bagaimana menghitung tarif yang akan berlaku bagi anggotanya. Cocok pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 mengenai Standar Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Lanjutan. Inilah perbedaan diantara istilah Kapitasi dan INA CBG (*Indonesia Case Bank Group*) yang dipakai untuk menghitung tarif pelayanan kesehatan untuk rencana JKN.

Biaya kapitasi yaitu jumlah pembayaran bulanan yang dibayarkan di awal oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan dasar (Faskes) dasar yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar, terlepas dari jenis dan volume pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien.

Untuk mendukung keberhasilan program JKN, BPJS Kesehatan memakai metode pembiayaan baru untuk fasilitas medis tertentu, terutama rumah sakit. Metode pembiayaan yang diterapkan di era JKN

merupakan metode pembayaran berwawasan ke depan yang diharapkan dapat mencapai harapan di atas. Salah satu metode pembayaran prospektif yang saat ini digunakan di Indonesia yaitu *casemix (case based payment)*, yang diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008. Mulai diterapkannya sistem casemix di Indonesia, besaran tarif mengalami tiga kali perubahan, yaitu tarif INA-DRG tahun 2008, tarif INA-CBGs tahun 2013, dan tarif INA-CBGs tahun 2014. Gunakan grouper UNU (UNU grouper) guna menganalisis kode dan grup program.

Tarif INA-CBG pada Jaminan Kesehatan Nasional Sejak 1 Januari 2014, tarif INA-CBG yang dipakai pada dalam program JKN dilaksanakan sesuai pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang salah satunya tarif berdasarkan jenis dan kelas rumah sakit, adapun pengelompokannya, meliputi: tarif rumah sakit tingkat A, tarif rumah sakit tingkat B, tarif rumah sakit tingkat B pendidikan, tarif rumah sakit tingkat C, tarif rumah sakit tingkat D, dan arif rumah sakit khusus rujukan nasional. Pengelompokan tarif didasarkan pada penyesuaian yang dilakukan setelah meninjau Tarif Dasar Rumah Sakit (HBR) yang diperoleh dari perhitungan Biaya Total Rumah Sakit. Jika ada lebih dari satu rumah sakit dalam satu kelompok, dipakai rata-rata tingkat basal. Tarif Rumah Sakit dibagi menjadi 5 (lima) zona berdasarkan Indeks

Harga Konsumen (IHK) dan sudah disepakati bersama oleh BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Lanjutan (AFKTL).

Regionalisasi tarif INA-CBGs, antara lain:

Regional I yakni: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;

Regional II yaitu: Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung Bali, dan NTB;

Regional III yaitu: NAD, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat;

Regional IV yaitu: Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

Regional V yaitu: Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku utara, Papua dan Papua Barat

PAJAK DAN KESEJAHTERAAN

A. Definisi Pajak

Istilah pajak telah dikenal dari dalam dan luar negeri, dahulu di Indonesia pajak sudah ada pada masa kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan dengan wilayah lautan terluas dan mampu mempertahankan kejayaan dengan adanya pajak yang dikelola dengan baik. Selain kerajaan Sriwijaya, dikenal pula kerajaan Mataram dengan memanfaatkan pajak dalam mendukung pembiayaan pemerintahannya. Kerajaan dengan posisi di wilayah pesisir pun memanfaatkan pajak dari sumber penghasilan di kerajaannya.¹ Istilah pajak di Indonesia dikenal dengan *Huistaks* yang merupakan pajak dan diperuntukkan kepada warga negara yang berdomisili di sebuah tempat atau daerah tertentu. Penggunaan pajak secara teratur dan permanen telah dilakukan pada masa kolonial Belanda dan dikenal dengan upeti. Misalnya: sewa bangunan, tanah atau saat ini diketahui dengan pajak bangunan dan bumi. Di Negara Mesir, istilah pajak dikenal dengan *Scribes*. Pada Bangsa Athena di Yunani istilah pajak yaitu *Eisphora* yang dimanfaatkan dalam membiayai perang. Di Inggris, pajak dikenal pada masa Kekaisaran Roma. Sedangkan pajak di Amerika dikenal sebagai pajak modern, dan

saat ini pajak berkembang menjadi *Tax Audit*, Restitusi, Bea Materai, Pajak Penjualan, *Tax Treaty*, Bea Cukai, dan bahkan pajak Penghasilan.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak bertujuan untuk menunjang kepentingan masyarakat, misalnya pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain yang mendukung kepentingan masyarakat umum. Namun, pajak identik dengan berkurangnya penghasilan dalam mendukung pembangunan yang manfaatnya akan kembali pada kesejahteraan seluruh rakyat di Indonesia. Saat ini di seluruh negara, pajak adalah sumber penghasilan negara dimana semakin meningkat nilai pajak dari pemerintah maka semakin tinggi penerimaan atau pendapatan yang akan didapatkan negara tersebut. Pajak yang didapatkan oleh negara akan dipakai guna mendorong pembangunan negara, dengan demikian masyarakat akan hidup sejahtera.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dijelaskan bahwa tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mewujudkannya, suatu negara memerlukan banyak dana, yang dituangkan pada APBN. Perolehan dana dari pajak nasional adalah

sumber dana yang paling mungkin, dan juga mencerminkan kemandirian pembangunan suatu negara. Perpajakan mencakup aspek efektif dan efisien sebagai sumber penerimaan negara, dan juga merupakan bentuk tanggung jawab dan bentuk gotong royong seluruh warga negara dalam mencapai keberlanjutan nasional. Tentu saja, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga didukung.

B. Manfaat Pajak

Pajak atau iuran yang disetorkan oleh rakyat kepada perbendaharaan negara menurut undang-undang mempunyai arti yang besar dalam kehidupan berbangsa, terutama pada penyelenggaraan pembangunan negara, oleh sebab itu pajak merupakan sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan semua sektor yang terkait. Dari hasil penelitian Shandy, mengenai dampak pajak terhadap kesejahteraan, disimpulkan bahwa penerimaan pajak berkorelasi negatif dan relatif kuat dengan jumlah penduduk miskin, dan berkorelasi negatif dan sangat kuat dengan persentase penduduk miskin. Hal ini menunjang temuan beberapa penelitian yang sama dan yang dijalankan oleh peneliti sebelumnya di Indonesia. Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan pajak memberikan ruang bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan sosial dan lainnya yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Pajak sangat penting dalam mendukung pembiayaan belanja negara, dengan demikian mengatasi masalah anggaran, mendukung pengeluaran negara dan kesejahteraan rakyat, agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dari pajak untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, bahan bakar bersubsidi, energi serta pangan dan sandang secara tertib. Selain itu, peran perpajakan juga merupakan semacam retribusi bagi golongan ekonomi menengah ke atas, dan setiap golongan miskin dan tidak mampu akan terbina dari dana tersebut. Pajak membantu mendanai pengeluaran negara, dan dalam menjalankan tugas negara sehari-hari, selain melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi atas bahan-bahan yang diproduksi dari luar negeri.

C. Kaitan Pajak dan Kesejahteraan

Untuk mewujudkan kesejahteraan, negara membutuhkan sarana serta biayadimana salah satunya diperoleh dari pajak masyarakat. Dalam hal ini, pajak merupakan bentuk partisipasi dan kewajiban sukarela masyarakat dalam membangun negara. Pajak pada dasarnya meliputi hidup negara secara ekonomis, dan merupakan sumber pendapatan utama negara selain dari sumber daya alam yang dimilikinya. Melalui

penerimaan yang diperoleh dari pajak-pajak inilah, kegiatan pembangunan dapat terlaksana dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

BAB XII

KORUPSI, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN

A. KORUPSI

1. Defenisi Korupsi

Kata "korupsi" diambil dari bahasa Latin yaitu "corruptio" (Fockema Andrea: 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary: 1960). Juga, "corruptio" dikatakan diambil dari kata Latin yang lebih tua "corrumpere". Dari istilah latin "corruption, corruption" (Inggris), "corruption" (Perancis) dan "corruption/korruptie" (Belanda).

Kata korupsi secara harfiah berarti korup, jelek, bejat, tidak jujur, suap, tidak bermoral, mengkhianati kesucian. Di Malaysia ada aturan anti korupsi dan memakai kata "resuah" diambil dari bahasa Arab "risywah", yang menurut Kamus Umum Arab-Indonesia artinya serupa dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). Risywah (suap) secara istilah adalah pemberian seseorang kepada hakim atau orang lain untuk memenangkan perkaranya atau memperoleh jabatan dengan cara yang tidak patut (al-Misbah al-Munir-al Fayumi, al-Muhalla-Ibn Hazm). Seluruh ulama sependapat untuk melarang risywah sehubungan dengan hukum pemutusan hubungan kerja, meskipun perbuatan itu termasuk dosa

besar. Seperti beberapa *Nash Qur'aniyah* dan *Sunnah Nabawiyah* telah menyarankan, di antaranya: "Mereka suka mendengar berita palsu dan makan banyak hal yang dilarang" (Surat Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menjelaskan "akkaaluna lissuhti" dengan risywah.

Pada The Oxford Unabridged Dictionary atau Kamus Lengkap Oxford, korupsi dimaknai sebagai "pelanggaran atau penyimpangan integritas dengan penyuaapan atau pembalasan dalam kinerja jabatan publik". Adapun definisi singkat yang digunakan Bank Dunia adalah "*abuse of public office for personal gain*". Definisi ini juga sama dengan yang digunakan oleh Transparency International (TI), yang menyatakan bahwa "korupsi melibatkan perilaku pegawai sektor publik, baik politisi atau pegawai negeri, melalui penyalahgunaan posisi kekuasaan mereka secara tidak adil dan ilegal atau dalam hubungan dekat.

Korupsi merupakan usaha memperkaya diri dengan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan, kata para ahli. Dalam setiap aspek kehidupan, akar penyebab korupsi selalu menemukan celah. Tidak terkecuali aspek perilaku, organisasi, sosial, sikap, dan ekonomi.

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi korupsi yang sangat luas, tak sekedar berkaitan pada korupsi di instansi pemerintah yang merugikan keuangan negara, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat. Solihin (2000) menjelaskan bahwa definisi korupsi dari

beberapa ahli yang dia kutip dalam makalahnya tentang anti korupsi dan tata pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut:

- a. Shleifer dan Vishny (1993):** Korupsi merupakan penjualan barang milik pemerintah oleh pegawai negeri guna mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, pegawai negeri sering memungut biaya ilegal dari izin (misalnya, izin, bea cukai, atau pembatasan masuk oleh pesaing). Pegawai negeri ini menerima bayaran untuk melakukan tugas-tugas penting atau menggunakan properti pemerintah untuk keuntungan pribadi.
- b. Silalahi (1997):** korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat pemerintah, tetapi juga di kalangan pegawai swasta, misalnya banyak bank swasta memiliki kredit macet yang disebabkan oleh kolusi antara direktur bank dan pengusaha. Apalagi korupsi aparatur negara bukan hanya disebabkan oleh upah yang rendah, karena korupsi besar-besaran yang sebenarnya adalah mereka yang digaji dengan baik tetapi tidak puas.
- c. Juniadi Suwantojo (1997):** korupsi merupakan penggunaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan oleh satu orang atau lebih dalam proses pengadaan, penetapan penerimaan pajak, atau pemberian fasilitas atau jasa lain yang melanggar norma yang berlaku. Menerima dan/atau membelanjakan kegiatan, uang

atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, dan perizinan dan/atau jasa lainnya untuk kepentingan orang pribadi atau kolektif yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara dan/atau keuangan/masyarakat.

- d. Black's Law Dictionary:** korupsi didefinisikan sebagai tindakan memanfaatkan hak pihak lain untuk memberikan keuntungan tidak resmi, yang secara salah menggunakan posisi atau jabatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sesuai dengan kewajiban dan hak orang lain.
- e. Robert Klitgaard:** Korupsi merupakan tindakan menyimpang dari jabatan publik seseorang di negara, memperoleh status atau keuntungan moneter di negara tersebut, yang melibatkan individu atau pribadi, kerabat dekat, kelompok sendiri, atau pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
- f. Philip:** korupsi merupakan perilaku dan tingkah laku pejabat publik yang menyimpang dari tugas resmi publik untuk keuntungan pribadi, atau untuk beberapa orang yang terkait erat dengan pelaku korupsi (seperti anggota keluarga dan kerabat dekat orang yang korup, serta teman-teman korupsi).

Korupsi bisa dikelompokkan menjadi beberapa aspek berikut ini:

1. **Aspek ekonomi:** korupsi dalam perekonomian dilihat sebagai “harga pasar” yang wajib dibayar konsumen untuk “membeli” barang-barang tertentu (dalam bentuk keputusan, lisensi, atau lebih khusus lagi, tanda tangan).
2. **Aspek politik:** Pemerintahan yang korup mempengaruhi wibawa pemerintah dalam pandangan masyarakat. Dukungan untuk pemerintah telah berkurang karena hilangnya kepercayaan publik. Selanjutnya, hal ini akan mempengaruhi legitimasi pemerintah sebagai pengemban pemberdayaan sosial.
3. **Aspek sosiologis:** “nepotisme” (menempatkan anggota keluarga atau teman pada jabatan pemerintahan tanpa memenuhi persyaratannya).

a. Faktor Penyebab Korupsi

Determinisme budaya sering dijadikan acuan dalam mengkaji penyebab timbulnya korupsi. Seperti yang dikemukakan Fiona Robertson-Snape (1999), bahwasannya interpretasi budaya tentang korupsi Indonesia terkait dengan bukti kebiasaan Jawa kuno. Padahal, jika kita melihat korupsi, pada dasarnya adalah fenomena sosiologis dengan implikasi ekonomi dan politik terkait dengan beberapa deskripsi teoritis. Teori-teori ini termasuk teori program sarana-berakhir.

b. Kerugian ekonomi akibat korupsi

Korupsi memberikan dampak yang sangat buruk bagi negara dan kehidupan bernegara karena bersifat koruptif, tidak jujur dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Penyimpangan anggaran akibat korupsi menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat dan secara makro mengalihkan dana publik ke kantong pribadi dan mengurangi kemampuan negara memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya: pengembangan, penelitian, perlindungan lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Pada tingkat mikro, korupsi meningkatkan ketidakpastian pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab munculnya korupsi. Hal ini bisa diterangkan dengan pendapatan atau upah yang tak terpenuhi. Pandangan ini bukannya tidak bisa salah, karena dalam teori kebutuhan Maslow, seperti dikutip Suliste Jantoro, korupsi hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang memenuhi dua kebutuhan minimum, dan logika lugas hanya bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang nyaris tak bisa bertahan hidup. Akan tetapi, saat ini korupsi dilaksanakan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro: 2004).

Berita ekonomi.bisnis.com tanggal 19 Oktober 2019, menurut hasil riset beberapa ahli ekonomi sejak 2001 hingga 2015, jumlah kerugian

akibat praktik korupsi di Indonesia telah melampaui 203,9 triliun rupiah. Penelitian ini dilaksanakan oleh beberapa ekonom dari beberapa institusi.

Jakarta, CNN Indonesia - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian negara sebesar Rp 39,2 triliun akibat praktik korupsi pada semester I tahun 2020. Majelis hakim terdakwa hanya berkisar Rp102.985.000.000,- dan ganti rugi sebesar Rp625.080.425.649, US\$128.200.000, dan S\$2.364.315. atau sekitar Rp 2,3 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kemungkinan dampak ekonomi dari kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat lebih besar dari dampak kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun, menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

B. KESEJAHTERAAN

Pembangunan bisa didefinisikan sebagai transformasi budaya, sosial, dan ekonomi, serta secara sadar ke arah yang diinginkan melalui kebijakan dan strategi. Sebagai contoh, transformasi struktur ekonomi yang terlihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi industri dan jasa memberikan kontribusi yang meningkat terhadap pendapatan nasional. Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian akan semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial terlihat pada distribusi kekayaan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya sosial ekonomi, misalnya

seperti fasilitas rekreasi, air bersih, perumahan, sanitasi, pendidikan, dan keikutsertaan pada proses penetapan keputusan politik. Pada saat yang sama, transformasi budaya sering dikaitkan dengan kebangkitan nasionalisme dan semangat nasionalis serta perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, misalnya dari idealisme ke materialisme / sekularisme. Dari penilaian tinggi hingga penguasaan materi, dari institusi tradisional hingga organisasi modern dan rasional (D.T. Tikson dalam Zulkarnaen (2011)).

Kemudian dipaparkan oleh Todaro (Suharto, 2005) bahwa setidaknya pembangunan wajib mempunyai tiga tujuan yang saling berkaitan, yakni:

1. Untuk memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa dengan membebaskan diri dari perbudakan dan ketergantungan terhadap orang lain atau negara, dan dari kebodohan dan penderitaan.
2. Untuk menggapai kualitas hidup tidak hanya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan materil, tetapi juga untuk mencapai rasa percaya diri dan kemandirian bangsa. Seperti halnya nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan dan budaya, dan penyediaan dan peningkatan lapangan kerja.

3. Untuk melakukan peningkatan pada penyediaan dan pendistribusian kebutuhan dasar, misalnya perlindungan, makanan, perumahan, dan kesehatan terhadap semua anggota masyarakat.

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial dan bisa secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan pengukuran moneter. Menurut Campbell (1976); Sumawan dan Tahira (1993); dan Milligan et al. (2006), kesejahteraan bisa didasarkan pada dua hal yakni: 1) kesejahteraan subjektif, dan 2) kesejahteraan objektif. Manfaat ditujukan pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan senang atau sedih, ketenangan pikiran atau kecemasan, kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup.

1. Ekonomi Kesejahteraan

Kesejahteraan bisa disaksikan dalam beberapa dimensi, akan tetapi bisa dimulai dengan ukuran yang digunakan, yaitu kesejahteraan material atau taraf hidup manusia (Stiglitz et al., 2009). Kesejahteraan masyarakat banyak dibahas melalui teori kesejahteraan Pareto. Pada prinsip pemikiran Pareto, suatu perubahan kebijakan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, hanya jika kebijakan yang dimaksud menyebabkan paling tidak ada satu orang yang kesejahteraannya meningkat atau dalam kondisi yang lebih baik, sedangkan individu lain

kondisi kesejahteraannya berada pada kondisi yang tidak berubah (tetap) kesejahteraannya (Mankiw, 2000).

Stiglitz (2011), mengukur kesejahteraan masyarakat melalui dimensi berikut: standar hidup material (termasuk pendapatan, konsumsi dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas kependudukan (termasuk pekerjaan, politik dan pemerintahan), modal sosial, yaitu kekerabatan dan hubungan lainnya, lingkungan hidup atau lingkungan hidup sekarang ini dan masa yang akan datang, masalah keamanan komersial/ekonomi dan istilah non-ekonomi lainnya.

Kesejahteraan masyarakat yang diukur dari masalah ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menjadi indikator dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi dari pertumbuhan beberapa sektor ekonomi, yang secara tak langsung memperlihatkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi suatu daerah, indikator ini penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai dan berfungsi untuk menetapkan arah masa depan.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak dalam masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan menyelenggarakan fungsi sosial yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pelayanan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial yang termuat pada Pasal 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2009. Kesejahteraan adalah hal yang subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya, dengan pedoman, tujuan, dan gaya hidup yang berbeda, akan memberikan nilai yang berbeda terhadap faktor penentu kebahagiaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), kesejahteraan merupakan kondisi di mana semua kebutuhan fisik dan mental keluarga bisa terpenuhi sesuai dengan standar hidup. Status kesejahteraan bisa diukur dari proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Suatu rumah tangga bisa diklasifikasikan sebagai makmur jika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar sama atau lebih rendah dari pada kebutuhan non-dasar. Di sisi lain, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang lebih tinggi daripada kebutuhan non-dasar dapat diklasifikasikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah.

Kesejahteraan merupakan suatu sistem kehidupan dan penghidupan spiritual, material, dan sosial yang diikuti oleh rasa aman, kesusilaan, dan ketentraman jiwa, keluarga dan masyarakat, yang memungkinkan setiap warga negara berupaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan masyarakat guna menjunjung tinggi

kemanusiaan, serta hak-hak mereka sejauh mungkin bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka dan komunitas mereka (Rambe, 2004).

Friedlander (dalam Sukoco, 1991) juga mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisir dari pelayanan dan institusi sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan. Hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mencapai potensi penuh dan meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Albert dan Hahnel (2005) mengelompokkan teori kesejahteraan menjadi tiga macam antara lain berikut ini:

1. **Classical utilitarian**, yang mana pendekatan ini yang mengedepankan bahwasannya kebahagiaan atau kepuasan seseorang bisa diukur. Prinsip ini bagi individu yaitu meningkatkan tingkat kebahagiaannya dengan sebanyak-banyaknya. Adapun bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya adalah prinsip dalam kehidupan mereka;
2. **Neoclassical welfare theory**, yang mana fungsi kesejahteraan adalah fungsi dari seluruh kepuasan individu;
3. **New contraction approach**, yang mengungkit terdapatnya kebebasan maksimum pada kehidupan seseorang atau pribadi. Maksud

dari pendekatan ini adalah individu akan mengejar barang dan jasa dengan kebebasan yang maksimal tanpa campur tangan dari aspek-aspek tertentu.

C. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan suatu negara tentunya tak lepas dari kinerja variabel makroekonomi negara tersebut, seperti yang dikatakan Ravallion (2001), korelasi antar negara juga berperan dalam tingkat kemiskinan suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat untuk pembangunan ekonomi, tetapi bukan hanya statistik yang menggambarkan tingkat pertumbuhan yang perlu diperhatikan, tetapi siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, apakah itu minoritas atau mayoritas masyarakat. Bukan mengurangi kemiskinan alih-alih mengurangi ketimpangan, jika sebagian besar berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan bisa dikurangi dan kesenjangan antara kaya dan miskin menyempit (Todaro, 2006). Situasi ini menuntut pemerintah untuk merevisi kualitas perekonomian Indonesia, jika tidak, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan tetap menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pembangunan sebuah negara. Setiap negara akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang optimal. Pada beberapa negara di dunia, kondisi utama pengurangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi, masalah hidup di bawah garis kemiskinan juga semakin meningkat.

Todaro (2006) mengatakan bahwa faktor kemiskinan bisa mempengaruhi kecepatan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah kondisi yang diciptakan oleh kemiskinan yang merajalela yang menghalangi orang miskin mengakses kredit, tak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, dan kurangnya peluang investasi materi dan moneter, serta yang mengarah pada pertumbuhan per kapita yang lebih tinggi.

Untuk mengurangi kemiskinan, beberapa orang mungkin benar untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak mungkin dan menarik sebanyak mungkin investasi modal asing. Namun, melihat ke belakang, hanya mengandalkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak benar-benar menjamin pengurangan kemiskinan secara otomatis.

Masalah pembangunan yang dihadapi suatu negara disebabkan oleh banyak faktor, dan kemiskinan adalah salah satunya. Kemiskinan selalu menjadi perdebatan dan perbincangan di kalangan ekonomi mulai dari definisi, penyebab, akibat, siapa saja yang termasuk, dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya hidup dalam situasi kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga mencakup banyak faktor, misalnya kurangnya kekuatan untuk memutuskan jalan hidup sendiri, penentangan terhadap ancaman kriminal, perlakuan hukum yang tidak adil, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang rendah, (Suryawati, 2005). Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dampak kemiskinan dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun yang terlibat seringkali tidak menyadari keberadaannya (Suparlan, 1995). Kemiskinan adalah salah satu masalah yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan diperlihatkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau minimum, yakni kesehatan, pendidikan, papan, pangan, dan sandang (Harry Ramadhana, 2008).

Kemiskinan adalah masalah penting di Indonesia saat ini, dan karena itu telah menjadi fokus pemerintah Indonesia. Selama lebih dari setengah abad, Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia jauh dari kata makmur. Dibandingkan dengan

negara tetangga Singapura, masalah Singapura rumit pada awal kemerdekaan tahun 1965. Hari ini, bagaimanapun, Singapura memiliki pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. Dibandingkan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia masih adalah negara berkembang dari waktu ke waktu. Kemiskinan memiliki sifat yang sangat kompleks dan multidimensi, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan menghambat pendidikan bagi jutaan anak, sulit untuk membiayai perawatan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, pengangguran meningkat dan populasi sangat banyak.

a. Dampak Kemiskinan Akibat Ekonomi

Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang sangat kompleks, meskipun sebagian besar negara tersebut telah berhasil mencapai pembangunan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi. Kemiskinan merupakan gambaran ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka kehidupan yang layak, namun kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda antar daerah. Sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan di daerah, kemiskinan menjadi salah satu tema utama

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pembangunan, yang seringkali diukur dari perubahan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan timbul disebabkan kelompok pelaku ekonomi mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam proses pembangunan, atau ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan masyarakat miskin dengan keterbatasan kemampuan usaha dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi (UU No. 25 tahun 2000 tentang Proenas).

Kemiskinan merupakan gambaran ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, namun kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda antar daerah, dan perbedaan ini tercermin dari kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan. Kemiskinan dipahami sebagai kurangnya pendapatan yang dilakukan oleh orang miskin, kekurangan uang dan komoditas untuk menjamin kelangsungan hidup. Syami (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan anggota keluarga atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup normal anggota masyarakat lainnya pada umumnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi umat manusia, dengan kata lain kemiskinan merupakan masalah sosial global, artinya

kemiskinan merupakan masalah sosial yang menyangkut segala macam kehidupan manusia. Meskipun dampak kemiskinan berbeda. Meskipun kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena terkait dengan ketidakcukupan ekonomi, sosial dan budaya, politik dan partisipasi sosial. Kemiskinan bukan hanya sekedar tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang yang lebih rendah dari standar kesejahteraan yang diukur dengan kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, tetapi kemiskinan memiliki makna yang lebih dalam karena berkaitan dengan aspek-aspek di luar ketidakmampuan guna mencapai pendapatan.

Faktor yang memberikan pengaruh pada tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil pertumbuhan di semua sektor usaha. Mempercepat laju pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus didorong dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pekerja untuk menjalani kehidupan yang layak, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan bisa dikelompokkan menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. Kemiskinan natural, yakni kemiskinan yang dihasilkan dari kurangnya sumber daya alam yang mendukung masyarakat.
- b. Kemiskinan struktural, yakni kemiskinan disebabkan oleh struktur tertentu yang membatasi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang mengacu pada situasi komparatif antara seseorang, kelompok atau komunitas lain.

b. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997), beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul dari distribusi pendapatan yang tidak merata akibat pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata. Orang miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya yang rendah.
2. Kemiskinan disebabkan oleh keragaman kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang berarti produktivitas rendah dan, pada gilirannya, upah yang lebih rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, ketertinggalan, diskriminasi atau genetika.
3. Perbedaan akses keuangan menyebabkan kemiskinan.

Terdapat empat penyebab utama kemiskinan, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya pencapaian pendidikan menyebabkan terbatasnya kemampuan pengembangan diri dan sempitnya kesempatan kerja. Tingkat pendidikan juga menentukan dalam hal bersaing untuk pekerjaan yang tersedia. Tingkat pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Tingkat kesehatan yang rendah. Tarif kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan stamina fisik yang rendah dan kekuatan pikiran dan inisiatif.
3. Kesempatan kerja terbatas. Kemiskinan akibat kondisi pendidikan dan kesehatan diperparah dengan terbatasnya kesempatan kerja. Selama ada pekerjaan atau kegiatan usaha, selama ada harapan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
4. Kondisi Isolasi. Banyak orang miskin yang tidak berdaya secara finansial karena mereka terasing dan terisolir. Mereka tinggal di daerah terpencil, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan olahraga progresif yang dinikmati masyarakat.

c. Dampak Dari Kemiskinan Terhadap Masyarakat

Banyak dampak akibat kemiskinan antara lain berikut ini:

1. Pengangguran adalah efek dari kemiskinan, karena pendidikan dan keterampilan sulit diperoleh masyarakat. Jadi sulit bagi orang untuk mengembangkan dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka karena sulit untuk bekerja.
2. Angka kematian meningkat, banyak orang Indonesia mati kelaparan atau bunuh diri karena tidak pandai mengalami kemiskinan alamiah.
3. Putus sekolah Tidak sekolah (tingkat pendidikan rendah) membuat masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan penghasilan. Biaya pendidikan, putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan, yang menyebabkan masyarakat miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah, akan menjadi penghalang untuk meningkatkan keterampilan dan mewujudkan impian mereka.

Hal ini menyebabkan kemiskinan yang mendalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan dunia dan kehilangan akses ke pekerjaan yang layak. Keturunan kemiskinan adalah efek berbahaya dari kemiskinan. Apabila anak putus sekolah dan bekerja karena dipaksa bekerja, maka akan menimbulkan gangguan pada diri anak

itu sendiri, seperti gangguan perkembangan fisik dan mental serta pola berpikir.

Contoh anak tunawisma, hidup di jalanan, tidak sekolah, menyanyi untuk makan, dan sebagainya. Generasi penerus adalah pengaruh jangka panjang dan buruk karena anak berhak atas kebahagiaan, pendidikan, dan gizi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pada masa dewasa mereka, dengan konsekuensi bagi generasi mendatang.

4. Angka kriminalitas meningkat, masyarakat Indonesia terpaksa mencari nafkah melalui kriminalitas karena tidak memiliki modal yaitu pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

BAB XIII

CIRI INDUSTRI KESEHATAN

BH5F P(NS)2 LIMOOUCINE

1. BARRIER TO MARKET

Dalam industri kesehatan ada pembatasan dalam proses pemasaran, seperti tidak ada iklan, discount, atau hadiah. Walaupun budaya tersebut saat ini sudah mulai terdengar dalam proses pemasaran beberapa rumah swasta.

2. HEALTH IS AN INVESTMENT

Kesehatan merupakan investasi seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja / warga yang sehat merupakan modal awal bagi perusahaan, maupun Negara.

3. HEALTH IS A SOCIAL GOODS

Pelayanan kesehatan merupakan *social goods*, artinya jasa tersebut dibutuhkan oleh orang banyak demi untuk meningkatkan status kesehatannya.

4. HUMAN RIGHT

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap orang / warga, oleh karenanya negara berkewajiban memenuhi hak tersebut.

5. HIGH TECHNOLOGY

Dalam proses pelayanan kesehatan dibutuhkan teknologi yang tinggi / canggih baik untuk proses diagnosa maupun terapi , termasuk di dalamnya adalah SDM spesialistik yang memadai

6. HIGH INFLATION RATE

Dalam memberikan pelayanan kesehatan tentunya membutuhkan peralatan kesehatan dan alat diagnostik yang canggih, Tentunya fasilitas kesehatan ini termasuk bangunan fisiknya mempunyai laju inflasi yang tinggi sehubungan dengan biaya penyusutannya pertahun.

7. FRAGMENTED COMMODITY

Pelayanan kesehatan terhadap setiap individu adalah berbeda, sesuai kebutuhan masing-masing dan karakteristik penyakitnya.

8. PUBLIC AND PRIVATE GOODS

Pelayanan kesehatan merupakan barang publik dan mengacu pada sarana pemenuhan kebutuhan manusia, umumnya disediakan oleh pemerintah, mengingat produk dan jasa tersebut dibutuhkan oleh banyak orang, seperti Puskesmas.

Ciri-ciri barang publik antara lain berikut ini:

- Tersedia untuk digunakan, dikonsumsi, atau dinikmati orang, meskipun jumlahnya bertambah, kepuasan semua orang tidak akan berkurang.
- Tersedia untuk semua orang, tidak dibatasi oleh aturan pembayaran.

- Mustahil untuk menghindari mereka yang tidak ingin menghabiskan uang untuk menikmatinya (Mills dan Gilson, 1999).

Pelayanan kesehatan preventif diklasifikasikan sebagai barang publik. Oleh karena itu, proyek ini harus disubsidi oleh pemerintah atau bahkan diberikan secara gratis. Pada saat yang sama, layanan kesehatan dengan efek kuratif diklasifikasikan sebagai barang pribadi dan harus dibayar atau dibiayai sendiri oleh pengguna atau sektor swasta.

9. NOT FOR PROFIT

Meskipun dalam praktiknya juga terdapat industri kesehatan yang menguntungkan, seperti beberapa rumah sakit swasta, namun idealnya memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) bukanlah tujuan utama pelayanan kesehatan. Pendapat umum yang dipegang secara tradisional adalah bahwa "Orang tidak boleh mengambil keuntungan dari penyakit orang lain".

Padahal, pada umumnya pelayanan kesehatan pada awalnya diselenggarakan untuk motif sosial, misalnya dalam bentuk yayasan. Namun kini arahnya telah berubah, terutama setelah pemilik modal dan dunia usaha melihat sektor kesehatan sebagai peluang investasi yang menggiurkan. Idealnya, memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) bukanlah tujuan utama dari pelayanan kesehatan. Pandangan yang

dipegang adalah bahwa "orang tidak boleh mendapat manfaat dari penyakit orang lain".

10. NO OVER UTILIZATION

Konsumen menggunakan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya atau penyakit yang dideritanya, sehingga penggunaan atau pemakaian pelayanan kesehatan tidak berlebihan karena berdasarkan indikasi kebutuhannya.

11. SUPPLY INDUCED DEMAND > MORAL HAZARD

Ketersediaan peralatan atau fasilitas yang lengkap dalam pelayanan kesehatan bisa memicu permintaan pemeriksaan yang tidak berdasarkan indikasi medis, sehingga konsumen harus membayar mahal untuk itu. Ini bisa terjadi karena adanya asymmetric information artinya konsumen tidak/kurang memiliki informasi tentang pelayanan kesehatan sehingga produsen atau/supplier merekomendasikan pelayanan kesehatan tanpa indikasi medis (melainkan indikasi uang) sehingga terjadilah moral hazard.

12. SOCIAL VS COMMERCIAL COMMODITY

Padahal, pada umumnya pelayanan kesehatan pada awalnya diselenggarakan untuk motif sosial atau social goods, namun kini telah terjadi pergeseran ke arah barang komersial, terutama karena pemilik modal dan dunia usaha melihat sektor kesehatan sebagai komoditas yang menguntungkan.

13. LIFE THREATENING

Hak untuk hidup mensyaratkan hak atas kesehatan. Kekurangan atas konsumsi pelayanan kesehatan akan mengancam jiwa/kehidupan, yang pada akhirnya akan membawa kematian.

14. INTENSIVE LABOR

Otomasi tidak membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang bebas dari campur tangan manusia. Tren spesialisasi dan hiper-spesialisasi telah menyebabkan peningkatan komponen tenaga kerja layanan kesehatan, seperti layanan rumah sakit.

15. MIXED OUTPUT

Apa yang pasien konsumsi adalah paket tes diagnostik, perawatan, perawatan dan nasihat kesehatan. Paket bervariasi dari orang ke orang dan sangat tergantung pada jenis penyakitnya.

16. ONE TIME CONSUMPTION

Pelayanan kesehatan hanya satu kali di konsumsi berbeda dengan komoditi lainnya yang bisa dimiliki sampai kapanpun.

17. OLIGOPOLY

Pelayanan kesehatan bersifat oligopolistik, artinya terdapat beberapa penyedia atau penyelenggara pelayanan kesehatan yang menghasilkan output yang sama, dan masing-masing pemberi layanan tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan harga output tersebut.

18. UNCERTAINTIES

Uncertainties atau ketidakpastian menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak dapat ditentukan dalam hal kapan, di mana dan berapa biayanya.

19. CONSUMER IGNORANCE (ASYMMETRIC INFORMATION)

Konsumen sangat bergantung pada penyedia layanan kesehatan. Karena pada umumnya konsumen belum mengetahui banyak tentang jenis penyakit, jenis pemeriksaan, dan jenis pengobatan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, tergantung pada penyedia untuk memutuskan jenis dan jumlah layanan kesehatan yang perlu dikonsumsi konsumen.

Asymetry of Information menunjukkan bahwa konsumen jasa kesehatan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sedangkan penyedia (dokter dan tenaga kesehatan lainnya) lebih mengetahui manfaat dan kualitas jasa yang dijualnya. Ekonom kesehatan lain seperti Feldstein, Jacos, Rappaport, dan Phelps juga menemukan fitur ini, sementara di layanan kecantikan dan beras, informasi asimetris hampir tidak terlihat.

Konsumen mengetahui berapa harga pasar, manfaat apa yang mereka nikmati, kualitas berbagai layanan, dan berapa banyak yang mereka butuhkan. Dalam pelayanan medis, seperti pada kasus bedah ekstrim,

hampir tidak mungkin bagi pasien untuk mengetahui apakah ia membutuhkan pelayanan tersebut.

Kondisi ini sering disebut sebagai konsumen lalai atau konsumen bodoh, apalagi mengetahui berapa biaya dan berapa, bahkan jika pasien mungkin seorang profesor tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia perlu dioperasi atau tidak. Bisa dibayangkan jika penyedia atau penjual mengejar keuntungan maksimal dan tidak memiliki integritas yang kuat dalam norma-norma agama dan sosial, maka penyedia dapat dengan mudah melakukan penyalahgunaan atau moral hazard.

Sifat asimetris ini memudahkan munculnya *supply-induced demand creation*, yang mengakibatkan gagalnya tercapainya keseimbangan pasar untuk pelayanan kesehatan. Maka jangan heran jika peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan tidak menurunkan harga dan meningkatkan kualitas, justru sebaliknya, yaitu harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah (inspeksi yang tidak perlu).

20. INELASTIC DEMAND

Demand akan layanan kesehatan berbeda dengan permintaan sektor ekonomi. Pada dasarnya, orang tidak menyukai layanan kesehatan dibandingkan dengan pakaian, rumah, mobil. Harapan konsumen terhadap pelayanan kesehatan adalah akses cepat terhadap kesehatan. Konsumen jasa kesehatan berada pada posisi yang rentan, sangat

ditentukan oleh penyedia jasa kesehatan. Kebutuhan yang terjadi bukanlah keputusan konsumen, sekalipun mereka memutuskan kemana mencari pengobatan, tetapi bukan jenis pengobatannya.

21. NOT A CHOICE BUT A DISASTER

Kesehatan bukanlah segalanya, tapi tanpanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kesehatan memang bukan pilihan tapi bisa mendatangkan bencana apabila kita tidak penuhi atau kekurangan mengkonsumsinya. Oleh karena itu kesehatan adalah hak dasar atau hak asasi manusia.

22. EXTERNALITIES

Eksternalitas menunjukkan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan mempengaruhi tidak hanya pembeli tetapi juga non-pembelian. Sebagai contoh, konsumsi rokok memiliki risiko tinggi bagi bukan perokok, dan karena karakteristik ini, layanan kesehatan memerlukan berbagai bentuk subsidi, karena pembiayaan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab mereka sendiri tetapi juga kebutuhan. Tanggung jawab bersama (publik).

Ada pengaruh eksternal terhadap penggunaan pelayanan kesehatan. Pengaruh eksternal adalah pengaruh positif atau negatif yang dialami orang lain sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Imunisasi terhadap penyakit menular, misalnya, akan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manfaat marjinal sosial dari imunisasi

jauh lebih besar daripada manfaat marjinal pribadi individu. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memastikan bahwa program imunisasi harus dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A'raf A. Dinamika Keamanan Nasional. *J Keamanan Nas.* 2015;1(1):27–40.
- Afriyenis W. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *J Kaji Ekoomi Islam* [Internet]. 2016;1(1):1–16. Tersedia pada: <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&rticle=502181>
- Ahiakpor, J. C. W. and West, E. G. (1991) 'Adam Smith and Modern Economics', *The Canadian Journal of Economics*, 24(4), p. 994. doi: 10.2307/135704.
- Aksol MI, Sodik MA. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Gizi Balita. *IIK Str Indones.* :1–7.
- Andhika LR. Public Goods Bukankah Untuk Rakyat? *J Ekon dan Kebijakan Publik.* 2017;8(1):41.
- Arku G. The housing and economic development debate revisited: Economic significance of housing in developing countries. *J Hous Built Environ.* 2006;21(4):377–95.
- Bakry A. Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *J MEDTEK.* 2010;2(1):1–13.
- Bruni, L. and Guala, F. (2001) 'Vilfredo Pareto and the epistemological foundations of choice theory', *History of Political Economy*, 33(1), pp. 20–49. doi: 10.1215/00182702-33-1-21.
- Burkaltseva DD, Borsch LM, Blazhevich OG, Frolova EE, Labonin IV. Financial and economic security of business as a primary element in the economic system. *Espacios.* 2017;38(33):3.
- Candela, R. A. and Wagner, R. E. (no date) 'Teori Tindakan Vilfredo Pareto : Sebuah Alternatif untuk Ekonomi Perilaku Kode JEL : B31 ; B41 ; D11 ekonomi menantang klaim bahwa persaingan sempurna membentuk equilibrium efisien Pareto .', pp. 1–29.

- Chotimah HC, Sandec JP, Dwi C E, Yusvarini DR, Hong S. Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. *J Transform Glob*. 2019;4(1):65–76.
- Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Lebih Dekat Dengan Pajak. Kementerian Keuangan RI. 2013
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Pajakpedia. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.. 2014
- Fiorito R, Kollintzas T. Public goods, merit goods, and the relation between private and government consumption. Vol. 48, *European Economic Review*. 2004. 1367–1398 hal.
- Hasan M, Azis M. Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat. 1999. 1–523 hal.
- Hasibuan B. Valuasi Ekonomi Lingkungan Nilai Gunaan Langsung Dan Tidak Langsung Komoditas Ekonomi. *Signifikan J Ilmu Ekon*. 2014;3(2):113–26.
- Haslinda H. Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Non-Ekonomi Terhadap Peningkatan Permintaan Perumahan di Kota Watampone. *Balanc J Ekon dan Bisnis Islam*. 2019;1(2):149–72.
- Heckman, J. J. (2015) 'Introduction to A Theory of the Allocation of Time by Gary Becker', *Economic Journal*, 125(583), pp. 403–409. doi: 10.1111/eoj.12228.
- Heckman, J. J. (2016) 'Gary Becker: Model Economic Scientist James', *Physiology & behavior*, 176(1), pp. 100–106. doi: 10.1257/aer.p20151106.Gary.
- Juliana J, Marlina R, Saadillah R, Mariam S. Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna J Ekon dan Keuang Syariah*. 2018;2(2):120–31.
- Lestari M, Suhadak. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017). *J Adm Bisnis*. 2019;70(1):98–105.

- Maharani S. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MEMILIH PERUMAHAN SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 2011;54–60.
- Maiti, Bidinger. "Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember." Vol. 53, *Journal of Chemical Information and Modeling*. 1981. 1689–1699 hal.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Mata Padi Presindo, 2014
- Nadhir M. *Bahan Ajar Ekonomi Kesehatan*. 2017;(April):1–44.
- Nasaruddin MM, Manaf M, Saleh H. Pengaruh Pengembangan Kawasan Perumahan Terhadap Sosial Ekonomi dan Minimalisasi Gejala Urban Sprawl. *Urban Reg Stud J*. 2020;2(1):15–24.
- Nazara S. Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan. Vol. 11, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 2010. hal. 83–98.
- Nur Solihat A, Arnasik S. Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. *OIKOS J Kaji Pendidik Ekon dan Ilmu Ekon*. 2018;II(X).
- Pratikto R, Ikhsan M. Inflasi Makanan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia (*Food Inflation and Monetary Policy Implication in Indonesia*). *J Ekon dan Pembang Indones*. 2017;17(1):58–74.
- Purba RS, Studi P, Pembangunan E, Ekonomi F, Bisnis DAN, Utara US. Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di indonesia. 2020;
- Rafiy M. *Ekonomi Kesehatan, Pengantar dan Aplikasi*. 2019. hal. 1–16.
- Rahmatullah R, Inanna I, Nurdiana N. Ethnopedagogi dalam pembelajaran ekonomi. *Semin Nas Lemb Penelit UNM*. 2019;284–8.
- Rahmatullah R. Pembelajaran Ekonomi Berjatidiri Bangsa. *JEKPEND J Ekon dan Pendidik*. 2018;1(1):10.

- Rimawati E. Modul Ekonomi Kesehatan_Prodi S1 KesMas FKM UDINUS. 2004;1–10.
- Rosser, J. B. (2003) 'A Nobel Prize for Asymmetric Information: The economic contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz', *Review of Political Economy*, 15(1), pp. 3–21. doi: 10.1080/09538250308445.
- Sari DS, Muttaqin DZ, Hubungan D, Fisip I, Administrasi D, Fisip B, et al. Zakat Dan Keamanan Ekonomi Negara Dalam Hubungan Internasional. *J Masy Dan Filantr Islam [Internet]*. 2019;2(1):22–9. Tersedia pada: <http://journal.unpad.ac.id/jmfi/article/view/25298>
- Setyawan F. Sistem pembiayaan kesehatan. 2015;119–26.
- Shandy dkk. Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Unika Soegijapranata. Semarang. 2020
- Sihite J. Evaluasi Dampak Erosi Tanah Model Pendekatan Ekonomi Lingkungan dalam Perlindungan DAS: Kasus Sub-DAS Besai DAS Tulang Bawang Lampung. *ICRAF se-Asia*. 2001;(11):1–86.
- Slamet PH. Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala Pendidik [Internet]*. 2009;xxx(2):189–203. Tersedia pada: http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http%3A%2F%2Flppmp.uny.ac.id%2Fsites%2Flppmp.uny.ac.id%2Ffiles%2F2%2520Slamet%2520PH.pdf&hl=id&sa=T&oi=gpp&ct=res&cd=0&d=12706274777225940229&ei=J-FIXouSJY3KyQTnwpngCQ&scisig=AAGBfm075Lkbr0IlsUHAp81RXaxXiHN5Rg&n
- Steven, P. (1967) 'Leading Contemporary Economist', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sulastyawati D. Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol 1. No.1. 2014
- Suryandari, Murmalita A. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017;1–136.

- Susetyo H. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif. *Lex Journalica* [Internet]. 2008;6(1):1–10. Tersedia pada: <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/287/260>
- Ucak, A. (2015) 'Adam Smith: The Inspirer of Modern Growth Theories', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195(284), pp. 663–672. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.258.
- Veblen, T. (2008) 'The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers', *Veblen, Thorstein*, 20(4), pp. 575–595.
- W HS. Hubungan antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur. *Binus Bus Rev.* 2013;4(2):841–50.
- Yusuf D. Pola Konsumsi Masyarakat : Studi Pengeluaran Konsumsi 5 Komoditas Makanan Terbesar Rumah Tangga Perdesaan Di Sulawesi Tengah. *J Katalogis.* 2019;7:15.

RIWAYAT PENULIS



Prof. Dr. dr. H. M. Alimin Maidin. MPH merupakan putra kelima dari sebelas bersaudara yang lahir di Amparita pada tanggal 14 April 1955, memiliki dua orang putra dan tiga orang putri dari hasil perkawinan dengan Dra. Hj. Fatmawati Tjambi, MM.

Riwayat Pendidikan: Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di Kabupaten Pinrang Prov. Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan SAA tamat 1973, SMA tamat 1975 di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara. Melanjutkan Kuliah di Fakultas Kedokteran Unhas yang ditamatkannya pada tahun 1984, gelar MPH diperoleh dari Ann Arbor University, Michigan USA di tahun 1990, Doktor Fakultas Kedokteran 2004, Pengukuhan Guru Besar FKM Unhas sejak 1 Maret 2006.

Riwayat Pekerjaan: Direktur Hasanuddin Centre for Tobacco Control and NCD Prevention (Hasanuddin CONTACT), Fakultas Kesehatan Masyarakat, universitas Hasanuddin, 2018-sekarang, Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2014-2016, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin tahun 2010-2014, Konsultan AUSAID 2000-2002, Konsultan World Bank 2002, Konsultan UNICEF 1993-2005 dan 2007, Konsultan WHO 2006 – September 2007.

Penghargaan: Ketua Remaja Tauladan di Makassar 1979, Mendapatkan Rekor MURI (Museum Rekord Indonesia) 2008, Setya Lencana 20 Tahun PNS oleh Presiden RI 2010, Penyuluh Pantan 15 Tahun Non Stop HIV/AIDS di Sulsel 2008 oleh Gubernur Sulsel.

Karya Penulis:

1. Rambu Solo' di Toraja Dalam Perspektif Ekonomi Kesehatan Tahun 2020 dengan ISBN 978-623-95376-2-3
2. Manajemen Strategi Tahun 2021 dengan ISBN 978-623-95376-4-7.
3. Pelembagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar Tahun 2021 dengan ISBN 978-623-95376-3-0.
4. Pengaruh Terapi *Spiritual Qur'anic Emotional Freedom Technique* (Sqeft) Terhadap Penurunan Nilai Kecemasan Dan Kadar Kortisol Darah Pada Residen Napza Tahun 2021 dengan ISBN 978-602-0924-76-2